PERANAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN MADRASAH, MADRASAH DINIYAH, DAN PESANTREN DI KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR

DISERTASI
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Studi Islam

Oleh
Ainun Rosyidah
NIM. FO.5.51.10.29

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang beranda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Ainun Rosyidah
NIM	: FO.5.51.10.29
Program	: Doktor (S-3)
Institusi	: Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, Mei 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

A0A71AEF768371882

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Ainun Rosyidah

PERSETUJUAN

Disertasi ini telah disetujui oleh Promotor
Pada, 22 Nopember 2017

Oleh

PROMOTOR

Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag

PROMOTOR

Dr. Hj. Hanun Asrohah, M.Ag

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Disertasi An AINUN ROSYIDAH telah diujikan pada ujian tahap Pertama
Hari/tanggal: Kamis, 2 Agustus 2018 dan layak di ujikan
Ke tahap Terbuka

Tim Penguji:

1. Dr. H. Yunus Abu Bakar, M.Ag — Ketua .....
2. Prof. Dr. Hj. Husniyatus Salamah Z, M.Ag — Sekretaris .....
3. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag — Promotor/Penguji .....
4. Dr. Hj. Hanun Asrohah, M.Ag — Promotor/Penguji .....
5. Prof. Dr. H. Zainuddin Maliki, M.Si — Penguji Utama .....
6. Prof. Dr. H. Imam Bawani, MA — Penguji .....

Surabaya, Oktober 2018
Direktur

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP. 196004121994031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: AINUN ROSYIDAH
NIM	: F05511029
Fakultas/Jurusan	: Pasca Sarjana/Studi Islam
E-mail address	: ainunrosyidah1409@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☐ Tesis ☑ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Peranan Dinas Pendidikan Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Madrasah, Madrasah Diniyah dan Pesantren di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Juni 2019

Penulis

AINUN ROSYIDAH

ABSTRAK

Peranan Dinas Pendidikan Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Madrasah, Madrasah Diniyah dan Pesantren di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur

Ainun Rosyidah

Kata Kunci:
Peranan Dinas Pendidikan, kualitas, madrasah, madrasah diniyah, pondok pesantren

Kebijakan terkait dengan pendidikan adalah sangat penting, apabila kebijakannya salah maka akan berakibat fatal untuk masa depan sebuah lembaga pendidikan. Terkhusus lembaga-lembaga pendidikan yang selama ini serasa terpinggirkan, yaitu pendidikan madrasah, diniyah dan pondok pesantren.Kesimpulan besar disertasi ini menunjukkan bahwa peranan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan sangatlah urgen.Tentu tidak hanya sebagai instansi yang memiliki tanggungjawab terhadap perjalanan sebuah lembaga pendidikan yang secara khusus lembaga pendidikan Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren.Dalam konteks otonomi daerah desentralisasi juga mengisyaratkan terjadinya perubahan kewenangan dalam pemerintahan terkait pendidikan disemua sektor, termasuk lembaga-lembaga yang berada dinaungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun lembaga pendidikan yang di bawah naungan Kementerian Agama masih bersifat sentralistik. Penelitian ini lebih fokus pada kebijakan Dinas Pendidikan melalui Kasi Pergurag Kabupaten Pasuruan terkait dengan madrasah, diniyah dan pondok pesantren. Posisi ketiga lembaga itu yang diperlakukan sama dengan sekolah umum. Dalam penelitian ini, dilakukan studi eksploratif terhadap data yang relevan dengan objek kajian yang bersumber dari wawancara dan observasi.Oleh karena itu, studi ini dimaksudkan menelusuri data dalam berbagai sumber.Peneliti melakukan penelusuran literatur yang berhubungan secara langsung dengan objek yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kasi Perguruan Agama dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan madrasah, madrasah Diniyah, dan Pondok Pesantren dalam perspektif kebijakan pemerintah pada regulasi otonomi daerah yaitu peraturan bupati. Objek kajian penelitian ini adalah kebijakan pemerintah Kabupaten Pasuruan terkait dengan implementasi peraturan-peraturan pemerintah daerah yang berhubungan dengan tugas dan fungsi organisasi terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan. Sumber data penelitian ini terdiri atas manusia berupa kata-kata dan tindakan hasil wawancara dengan informan dan dokumen perundang-undangan pendidikan pada pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan. Temuan penelitian ini adalah; *Pertama*, perhatian pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan, melalui Dinas Pendidikan terhadap perkembangan dan peningkatan kualitas pendidikan madrasah, madrasah diniyah, dan pondok pesantren sangat signifikan. *Kedua*, sistem pendampingan dan pembimbingan lembaga pendidikan madrasah, madrasah diniyah, pondok pesantren sangat intens sehingga setiap program bisa dikawal secara baik. Peningkatan mutu bisa terwujud dengan baik karena adanya keterlibatan baik itu pemerintahan kabupaten melalui regulasi Perda dan juga swadaya *stakeholder* lembaga-lembaga pendidikan terkait untuk mewujudkan visi misi besar pendidikan di Kabupaten Pasuruan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

The role of education ministry to improve the education quality of Madrasah, Madrasah Diniyah and Islamic Boarding School (Pesantren) in Pasuruan East Java

Ainun Rosyidah

Keywords:*The role of Education Ministry, Quality, Madrasah, Madrasah Diniyah, Islamic Boarding School*

The education policy is very important to an educational institution, bad policies will affect the future of educational institutions. especially educational institutions that have been marginalized, Madrasah, Madrasah Diniyah and Islamic Boarding School (Pesantren). Not only as an institution that has the responsibility for the course of an educational institution, especially educational institutions as madrasah, diniyah and islamic boarding school. In the context of regional autonomy, decentralization also implies the change of authority in government, including education in all sectors and institutions under the Education and Culture Ministry. The educational institutions under the Religious Affairs Ministry are still centralized. This dissertation focuses on the policy of the Education Ministry through Pasuruan Islamic Education section chief associated with madrasah, diniyah and Islamic Boarding School. The position of that three institution is treated same as public schools. This study explore the relevant data that is derived from primary data and secondary data. Therefore, this study is intended to trace the data from various sources. To get the primary data, the studyer search from a literature that relate directly to the study object. The goal of this study is to analyze the role of the Education and Culture Ministry through Pasuruan Islamic Education section chief in order to improve the education quality of madrasah, madrasah diniyah and Islamic Boarding School under government regulation perspective related to regional autonomy such as regent regulation. The object of this study is the pasuruan government policy related to the implementation of local government regulation related to the duties and functions of the organization, especially the Education and Culture Ministry to actualize the vision and mission of the education ministry. The primary source of this study consists of human interactions in the form of words and actions as the result of interviews with informants and the education regulation documents from Pasuruan government. The findings of this study are; first, the importance of Pasuruan Government attention, in this case the education ministry on the development and education quality improvement of Madrasah, Madrasah Diniyah and Islamic Boarding School. Second, there is an intensive mentoring and guidance system for the institution of Madrasah, Madrasah Diniyah, and Islamic Boarding School to ensure the programs is done. Third, education institution can achieve quality improvement through the involvement of pasuruan government using regulation also education institution stakeholder to realize the education vision in pasuruan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ملخص

الدور المكتبالتربية في تحسين جودة التعليم المدرسيّ والمدارسالدينية والمعاهد الإسلامية فى باسوروانالجاوةالشّرقيّة

عينرشيدة

كلمات البحث: دور مكتب التربية والتعليم والجودة والمدرسةوالمدرسة الدينيةوالمدرسة الداخلية. السياسة المتعلقة بالتعليم مهمّة جدّا, اذا كانت السياسة خاطئة فستكون قاتلة لمستقبل المؤسسة التعليميّة. وخاصة المؤسسة التعليميّة التى شعرت حتى الآن مهمشة هى المؤسّسات التربويّة والمدارسالدّينيّةوالمعَاهد الإسلاَميّة.الاستنتاج الْكبيْر منْ هذهِ الأطروْحة يدل على أنّ دور مكتب التّعليم والثّقافة منْمحُافظة بَاسوروان مهمّ جدّا. وبالتّأكيد ليسَبمُجرّد الْوكالةالمسؤولة عن إستمرار مؤَسّسةتعليميّة تقومُ على وجه التّحديد المؤسّسات التربويّة والمدارسالدّينيّةوالمعَاهد الإسلاَميّة. في سياق المِنطقة المستقلّة الدّاخليّة لامرْكزِية ينطوي أيضا على حدوثِ تغييرات في السلطة الحكوميّة بما في ذلك التعليم في جميع القطاعاتِ بما في ذلك المؤسّسات الموجودة في وزارة التّعليم والثّقافة. امّا المؤسّسات التعليميّة تحت رعاية وزارة الشّؤون الدّينيّة فمرْكزِية.وهذه الدراسة تتَركّز على سياسة مكتب التعليم من جهة رئيس القسْم من المدرسة الدينية(pergurag)فى محافظةباسوروان المرتبطة بالمدرسة والمدرسة الدينية والمعهد الإسلاميّ. وهذه المؤسّسات الثّلاث تعامل على المساوة بالمدارس العامّة. في هذه الدراسة دراسة استكشافيّة للبيانات ذات الصلة للموضوع الدراسيّالذى يصدر من البيانات الأوليّة والبيانات الثانويّة. لذلك، تُهدف هذه الدراسة إلى تتبّع البيانات في مصادر مختلفة .للعثور على البيانات الأوّليّة، يقوم الباحث بالبحث في المطْبوعات التتّصل مباشرة بالموضوع الدراسيّ. ،تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور وزارة التربيّة والتعليم والثقافة من جهة رئيس القسم من المدرسة الدينية(pergurag)لأجل تحسين نوعيّة التعليم المدرسيّ والمدرسة الدينية وَالمعهد الإسلاميّ من منظور السياسة الحكوميّة المتعلّقة بالاستقلالِيّة الإقليميّة التي هي تنظيمالمحافظ.والهدف من هذه الدراسة هو سياسة حكومة ولاية باسوروان المتعلقة بتنفيذ لوائح الحكومة الإقليميّة المتعلّقة بواجبات ووظائف المنظّمة، وخاصّة وزارة التربية والتعليم والثقافة لتحقيق رؤية وبعثةمكتب التعليم. مصدر البيانات الرئيسي لهذا البحث يتكون من البشر في شكل الكلمات والإجراءات نتيجة المقابلات مع المخبرين ووثائق القانون التربوي على حكومة ولاية باسوروان. نتائج هذا البحث هي أولا، اهتمام الحكومة المحلية باسوروان على جهةوزارة التربية والتعليم على تطوير وتحسين نوعية التعليم المدرسة والمدرسة الدينية والمدرسة الداخلية كبيرة جدا. وثانيا، نظام التوجيه على مؤسسات التعليم بالمدرسة والمدرسة الدينيةوالمدرسة الداخلية كثيفا جدا بحيث كل برنامج يمكن أن يكون محروسا جيدا. وثالثايمكن تحقيق الزيادةعلى الجودة بشكل جيد بسبب المشاركة الجيدة للحكومة المحلية من جهة تنظيم اللوائح المحلية وكذلك أصحاب المصلحة المعتمدة على الذات من المؤسسات التعليمية ذات الصلة

لتحقيقرؤيةومهمة التعليم العظيمة في منطقة باسوروان.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN iii

PERSETUJUAN TIM PENGUJI iv

PERSETUJUAN PUBLIKASI v

ABSTRAK vi

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 6

D. Kegunaan Penelitian 6

E. Kerangka Teoritik 8

F. Penelitian Terdahulu 12

G. Sistematika Penulisan 18

BAB II : KAJIAN TEORITIK

A. Kebijakan Publik dalam Pendidikan di Daerah 21

B. Birokrasi Berbasis Otonomi 28

1. Otonomi Pendidikan dan Struktur Pelaksanaan Pendidikan 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Instansi Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia 36

3. Tugas dan Peran Dinas Pendidikan dalam Kebijakan Pemerintahan Daerah 39

C. Madrasah, Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren dalam Otonomi Pendidikan 43

1. Madrasah 43

2. Madrasah Diniyah 57

3. Pesantren 63

D. Otonomi Pendidikan dalam Konteks Reformasi Pendidikan di Indonesia 73

E. Posisi Madrasah, Madrasah Diniyah, dan Pesantren dalam Otonomi Pendidikan 84

F. Peningkatan Mutu Pendidian Islam di Madrasah, Madrasah Diniyah dan Pesantren 87

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian 95

B. Pendekatan Penelitian 99

C. Sumber Data Informasi 100

D. Teknik Pengumpulan Data 100

E. Teknik Analisis Data 103

F. Operasional Analisi Data 112

BAB IV: PERANAN DINAS PENDIDIKAN

A. Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Peranan Perguruan Agama Dinas Kabupaten Pasuruan .. 121

C. Peningkatan Pendidikan Agama Islam di Pasuruan 130

D. Bentuk-bentuk Kebijakan Tentang Pendidikan 155

BAB V : PEMBAHASAN HASIL TEMUAN

A. Sistem Pendidikan Madrasah, Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren 168

1. Sistem Pendidikan Madrasah 168

2. Sistem Pendidikan Madrasah Diniyah 173

3. Sistem Pendidikan Pesantren 176

B. Langkah-langkah Strategis Peningkatan Mutu Pendidikan 182

C. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pendidikan Agama 192

D. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat 196

E. Pendidikan Agama Visioner 205

BAB VI: PENUTUP

A. Kesimpulan 212

B. Saran 217

C. Proposisi-proposisi 218

DAFTAR PUSTAKA 219

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jenis-jenis Kebijakan Publik 23

Tabel 2.2 Perbandingan antara Madrasah swasta dan negeri 54

Tabel 3.1 Tentang Penggalian data melalui wawancara 117

Tabel 4.1 Struktur Bidang Pergurag Dinas Pendidikan Pasuruan 118

Tabel 4.2 Program Kegiatan Pergurag Dinas Pendidikan Pasruruan 2017 .. 129

Tabel 4.3 Jumlah lembaga, guru dan peserta didik 130

Tabel 4.4 Tentang anggaran hibah 170

Tabel 5.1 Struktur Kurikulum Madarasah 170

Tabel 5.2 Kurikulum Madrasah Diniyah 174

Tabel 5.3 Kitab Acuan Pondok Pesantren 2017 180

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Regulasi atas otonomi daerah di berbagai sektor berdampak pula terhadap penerapan pendidikan. Diberlakukanya otonomi daerah merubah sistem pendidikan yang awalnya sentralistik menjadi desentralistik. Pada tataran Madrasah yang notabene milik negara praktis tidak memunculkan banyak masalah, tetapi sekolah atau lembaga pendidikan agama, madrasah diniyah atau pesantren tentu perubahan regulasi otonomi yang secara otomatis pula memiliki konsekuensi terhadap perkembangan baik dari sistem, pola atau implementasi kurikulum dan lain sebagainya. Jika fakta ini tidak segera dicarikan solusi, maka pendidikan di Indoenesia umumnya dan khususnya di Pasuruan akan gulung tikar. Padahal pendidikan merupakan barometer keberhasilan dan kesuksesan suatu negara di masa mendatang. Oleh karenanya, pengembangan, peningkatan dan perbaikan pendidikan harus dilakukan secara holistik dan simultan, tidak boleh parsial walaupun mungkin dilakukan bertahap. Perbaikan sektor kurikulum, tenaga guru dan fasilitas, serta sarana pembelajaran, tidak akan terlalu membawa perubahan signifikan jika tidak disertai dengan perbaikan pola dan kultur manajemen yang mendukung perubahan-perubahan tersebut. Dinamika guru dalam pengembangan program pembelajaran tidak akan bermakna bagi perbaikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses dan hasil belajar siswa, tanpa adanya kebijakan yang strategis dari Pemerintahan terkait.

Demikian pula penambahan dan penguatan sumber belajar berupa perpustakaan dan laboratorium tidak akan terlalu bermakna jika manajemen sekolahnya tidak memberi perhatian serius dalam optimalisasi pemanfaatan sumber belajar tersebut dalam proses belajar siswa. Manajemen memang merupakan sesuatu yang amat bermakna dalam perubahan menuju sebuah perbaikan.[1]

Apresiasi masyarakat terhadap sistem pendidikan Islam semakin menggembirakan. Kondisi struktur sosial-historis masyarakat muslim yang mengalami kemajuan membangkitkan kesadaran mereka akan arti pentingnya pendidikan. Masyarakat muslim yang mengalami proses perubahan politik, ekonomi, budaya dan juga pendidikan, mereka menyadari bagaimana membangun sistem pendidikan Islam yang mampu berafiliasi dengan kemajuan zaman. Yaitu, suatu kesadaran akan kesetaraan kelas akademis dengan karakter instrumental yang dimilikinya untuk disejajarkan, atau bahkan melampui, kelas sosial yang berkembang di dalam relasi kenegaraan. Dengan kata lain, suatu kesadaran berusaha memperjuangkan orang professional akademik dalam relasi sosial-politik kenegaraan yang selama ini cenderung hegemonik, sehingga pada gilirannya dihadapkan pada sebuah kebijakan akademik yang lebih otonom.

[1] Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis SebuahMoudl Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta : Prenada Media, 2004), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu wujud kesadaran akademik dimaksud adalah desentralisasi dan otonomisasi penyelenggaraan pendidikan.[2] Dalam konteks Indonesia hal ini telah ditandai banyaknya lembaga pendidikan yang di luar miliki pemerintahan bisa berkembang dengan baik. Diantaranya adalah tumbuh kembangnya Pondok Pesantren di wilayah Nusantara.

Corak reformasi-reposisi ini disebut dengan Manajemen Berbasis Sekolah/MBS (*School Based Managenent*). MBS merupakan bentuk alternatif sekolah dalam melakukan program desentralisasi di bidang pendidikan yang ditandai dengan otonomi yang luas di tingkat sekolah dan madrasah, partisipasi masyarakat yang tinggi tanpa mengabaikan kebijakan pendidikan nasionalnya. Sekolah diberikan kebebasan dan keleluasaan dalam mengelola sumber daya dan sumber dana sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah dengan mengakomodasi seluruh kebutuhan masyarakat setempat. Dalam hal ini, masyarakat juga dituntut memahami pendidikan, membantu, dan mengontrol pengelolaan pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan ini dikenal dengan istilah Manajemen Berbasis Masyarakat (*Community Based Management*) atau Sekolah Berbasis Masyarakat (*Community Based School*).[3]

Berdasarkan kondisi tersebut, maka dunia pendidikan terutama Pergurag (Perguruan Agama) harus mampu berperan aktif menyiapkan sumberdaya manusia terdidik yang mampu menghadapi berbagai tantangan

---

[2] Imam Tolhah, *Membuka Jendela Pengurai Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 183.
[3] "Ibid"., 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan, baik lokal, regional, nasional, maupun internasional. Siswa tidak cukup hanya menguasai teori-teori, tetapi juga mau dan mampu menerapkan dalam kehidupan sosial. Ia tidak hanya mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku sekolah, tetapi juga mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Peranan Pergurag dianggap penting sebagai salah satu mediator dan kreator dalam rangka memajukan sebuah pendidikan yang memiliki karakter religius, pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip dan metodologi kearah pembentukan kecakapan hidup dan kemampuan praktis pada peserta didiknya melalui kurikulum yang berintegrasi yang dikembangkan di sekolah dan madrasah, inilah substansi dari sebuah aplikasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan.

Penelitian berjudul *Peranan dinas pendidikan dalam peningkatan kualitas pendidikan madrasah, madrasah diniyah dan pesantren di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur* ini mencoba mengungkap dan mendiskripsikan peranan Dinas Pendidikan yang didalamnya terdapat Pergurag dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pasuruan yang mencakup lembaga madrasah, diniyah dan pesantren. Kemajuan secara strategis atas lembaga pendidikan tersebut sangat bergantung sejauhmana kebijakan-kebijakan yang dilahirkan mampu menjadikan pendidikan di berbagai sektor bisa diandalkan jauh kedepan.

Kerangka pengembangan atas kebijakan sangatlah penting. Karena lembaga pendidikan merupakan lembaga yang mampu menanamkan ciri-ciri,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sifat dan watak serta jiwa kemanusiaan yang berdasar pada spiritual dan akhlak mulia bagi peserta didiknya. Di samping itu, pendidikan yang tetap menjadikan wawasan keindonesiaan juga sangat diperlukan bagi seorang pendidik, karena melalui jiwa ini para pendidik akan memiliki orientasi pendidikan yang bisa diunggulkan dan menjadi *problem solving.*

Lembaga pendidikan diharapkan mampu mengantarkan peserta didik yang memiliki kemampuan ganda, baik kemampuan yang mencakup keperluan-keperluan duniawi maupun kepentingan ukhrawi. Untuk mencapai pendidikan yang mampu mengantarkan peserta didik memiliki kemampuan di berbagai dimensi. Terkait dengan itulah sangat dibutuhkan sebuah regulasi dan peraturan yang selalu menguntungkan terkait dengan kemajuan pendidikan madrasah, diniyah dan pondok pesantren.

B. Rumusan Masalah

Untuk mengetahui bagaimana peran Pergurag terhadap kualitas pendidikan madrasah, diniyah dan pesantren di Pasuruan, maka dapat ditentukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana profil lembaga pendidikan madrasah, diniyah dan pesantren di Pasuruan?
2. Bagaimana peran Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dalam menciptakan lembaga pendidikan madrasah, diniyah dan pesantren yang berkualitas melalui kebijakan-kebijakan yang strategis?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui profil lembaga pendidikan Madrasah, diniyah dan pesantren di Pasuruan.
2. Untuk mengetahui peran Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dalam mengawal sekaligus menciptakan lembaga pendidikan madrasah, diniyah dan pesantren yang berkualitas melalui kebijakan-kebijakan yang strategis.

Selain tujuan tersebut, esensi penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan kebijakan-kebijakan yang strategis yang menjadikan pendidikan yang berkualitas dan sistem atau proses pembelajaran baru yang bersifat inovatif. Temuan-temuan dalam penelitian ini nantinya akan diwujudkan dalam bentuk proposisi-proposisi.

D. Kegunaan Penelitian

Mayoritas peneliti, akan selalu mempertimbangkan apakah penelitian memiliki kemanfaatan baik yang bersifat pribadi maupun masyarakat luas atau tidak. Sejauh itu pula seorang peneliti akan bersusah payah, berjuang dan melakukan apa saja yang berkaitan dengan prosedur penelitian hanya sekadar hasil yang ingin dicapai. Ada tiga kemanfaatan yang bisa diambil dari penelitian kali ini:

1. Bagi pengambil kebijakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, khususnya dan pemerintah pada umumnya akan selalu mempertimbangkan dari berbagai aspek sebelum regulasi dan aturan terkait dengan pendidikan digulirkan. Secara teori, penelitian ini akan bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka membuat kebijakan-kebijakan yang bersinggungan dengan gerak dan arah peningkatan pendidikan. Pasuruan salah satu kebupaten yang layak menjadi percontohan didalam pengelolaan pendidikan terutama lembaga-lembaga pendidikan yang selama ini diabaikan, diantaranya madrasah, diniyah dan pondok pesantren.

2. Bagi Lembaga Madrasah, Madrasah Diniyah dan Pesantren

Penelitian bisa difungsikan sebaai bahan pertimbangan bagi lembaga berkat dengan peningkatan kualitas baik itu pendidik dan peserta didik sekaligus dalam rangka meningatkan kuantitas secara input. Tentu dari masing-masing *stakeholder* terus menerus mengupayakan ke arah perbaikan diberbagai sektor pendidikan.Semua itu berguna untuk mengkaji dan membaca fenomena-fenomena lembaga pendidikan baik madrasah, diniyah dan pesantren khususnya di Pasuruan.Yang nantinya bisa menjadi pertimbangan bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai dimensi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kerangka Teoritik

Sebagaimana penelitian lainnya yang menjadikan kebijakan publik sebagai kajian penelitian, maka penilitian berupaya untuk memberikan gambaran secara konprehensif terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Pasuruan terkait dengan kebijakan Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan madrasah, madrasah dinyah, dan pesantren di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Sehingga kerangka teoritik kajian ini adalah kebijakan pemerintah tentang keberlangsungan pendidikan.

Konsep dasar dari kerangka teoritik adalah sejak diundangkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai regulasi revisi atas undang-undang No. 22 tahun 1999, maka berbagai kewenangan serta pembiayaan kini dilaksankan oleh pemerintah daerah (Pemda) dengan lebih nyata dan riil.[4] Dalam fenomena ini, langkah-langkah yang digunakan untuk menghasilkan suatu teori luas tentang fenomena sentra kualitatif *grounded* pada datanya. Sebagai sebuah prosedur sistematik, rancangan ini menarik perhatian beragam bagi peneliti pendidikan.[5]

John Cresswell menambahkan bahwa rancangan *grounded theory* merupakan satu prosedur kualitatif sistematis yang digunakan untuk menghasilkan teori yang menjelaskan di tingkat konseptual luas, suatu proses, tindakan, atau interaksi tentang suatu topik substantif yang melihat suatu proses.[6] Terkait dengan penelitian kebijakan pemerintah daerah tentang

---

[4] Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan public* (Bandung: Alfabeta, 2014), 1.
[5] John Creswell, *Educational Research, Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative*, Edisi Ke-5, terj, Helly PS, dkk (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 843.
[6] "Ibid"., 844.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan, sebagaimana Paulo Freire, menyatakan bahwa kekuasaan dalam hal ini adalah pemerintah dipandang memiliki kekuatan yang bisa jadi negatif pun pula positif untuk memediasi antara kebijakan dengan sistem pendidikan.[7]Di satu sisi, memang dominasi tidaklah mutlak, yang dalam hal ini adalah kekuasaan bersifat ekslusif dan sebagai kekuatan negatif. Di sisi lain, kekuasaan merupakan daya dorong dari semua perilaku manusia di mana masyarakat mempertahankan hidupnya, berjuang dan berusaha mewujudkan cita-cita kehidupan termasuk pendidikan yang lebih baik.[8]

Lembaga pendidikan madrasah, madrasah diniyah dan pesantren masih sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat termasuk masyarakat muslim sendiri. Madrasah, Diniyah dan pesantren masih dianggap sebagai lembaga kelas dua.Sehingga masyarakat masih meragukan bahwa lulusan dari lembaga tersebut tidak bisa diakomodir untuk masuk sekolah umum atau negeri termasuk masuk Perguruan Tinggi umum (negeri).[9] Padahal secara yuridis dipayungi Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Di dalam UUSPN Pasal 30 ayat (4) disebutkan: "Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan Diniyah, pesantren, pengasramaan, dan bentuk lain yang sejenis." [10] Kemudian dalam PP. Nomor 55 Tahun 2007 pasal 14 ayat (1) dan (2)

---

[7] Paulo freire, *The Politic of Education: Culture, Power, and Liberation,* terj, Agung Prihantoro, dkk (Yogyakarta: REàD, 2007), 9.
[8] "Ibid"., 10.
[9] Mujamil Qomar, *Dimensi Manajemen Pendidikan Islam* (Jakarta: Erlangga, 2015), 227.
[10]Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasioal, (ttp: Pustaka Widyatama, tt), hal. 22, *lihat juga* Mujamil Qomar, 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebutkan: (1) Pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan Diniyah dan Pesantren. (2) Pendidikan Diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.[11]

Pada prinsipnya, pemerintah telah memberikan ruang yang sama terhadap keberlangsungan pendidikan keagamaan dengan pendidikan umum. Hanya dalam konteks tertentu masyarakat masih mendikotomi antara keduanya.Sebagai sebuah sistem pendidikan, pendidikan Madrasah, madrasah Diniyah, dan Pesantren tidak dapat dipisahkan dari atmosfer kebijakan politik suatu Negara.Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat, sehingga bentuk dan perubahan sistem politik suatu Negara dapat memberikan dampak fundamental dalam bidang pendidikan.[12] Dari sinilah, untuk mempridiksi bagaimana pola dan bentuk pendidikan di masa depan sangat tergantung bagaimana kebijakan pemerintah yang muatan politisnya lebih besar dari pada memikirkan pendidikan secara substansial.

Pada tataran tersebut, proses kebijakan Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah yang birokratis tentu berdampak pada arah kebijakan pendidikan Islam.Kebijakan birokrasi sebagai manifestasi kekuatan pemerintah untuk mengontrol kegiatan-kegiatan sosial-politik termasuk keberlangsungan dan keberadaan lembaga pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah sendiri maupun diselenggarakan oleh masyarakat.[13]

---

[11] Sebagaimana yang dikutip Mujamil Qomar, 228.
[12] Ahmad Ali Riyadi, *Poliitk Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2006), 15.
[13] "Ibid"., 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apa yang dimaksud dari hal-hal di atas, maka penelitian ini sejatinya adalah mendiskripsikan kebijakan-kebijakan public yang oleh pemerintah daerah dijadikan dasar acuan untuk menyelengagrakan suatu kegiatan termasuk keberlangsungan pendidikan. Eystone (1971: 18) telah merumuskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan kebijakan publik, yaitu: "*the relationship of governmental unit to its environment*", antar hubungan yang berlangsung di antara unit/satuan pemerintah dengan lingkungannya.[14]Secara substansial hasil dari sebuah kebijakan sangat terkait dengan aktor pembuat kebijakan itu sendiri.aktor atau pejabat yang membuat kebijakan adalah orang-orang yang memiliki kewenangan yang sah dan legal. Sehingga sangat penting untuk membedakan antara pembuatan kebijakan primer dan pembuatan kebijakan suplementer.Pembuat kebijakan primer adalah orang-orang atau *stakeholder* yang mempunyai wewenang konstitusional.Sedangkan pembuat kebijakan suplementer adalah diantaranya instansi adimistrasi, harus mendapat wewenang untuk bertindaknya dari lembaga yang lainnya, dalam hal ini adalah pembuat kebijakan primer.[15]

Secara singkat, bahwa penelitian kali ini menggunakan kerangka teoritik kebijakan publik tipologi kebijakan suplementer.Untuk mengkaji dan menganalisa kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan Madrasah, Madrasah Diniyah, dan Pesantren.

---

[14] Sholihin Abdul Wahab, *Anaisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 13.
[15] "Ibid"., 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan bahasan dan obyek penelitian, maka perlu adanya kajian terhadap penelitian terdahulu.Ada banyak faktor kesulitan untuk tidak bisa mereview penelitian terdahulu secara optimal, karena masih minimnya penelitian tentang kebijakan pemerintah tentang peningkatan kualitas pendidikan keagamaan. Sesuai dengan pengamatan penulis ada beberapa kajian penelitian yang memiliki kesamaan bahasan, di antaranya:

Pertama,penelitian yang dilakukan oleh Abdul Basit dengan judul *Analisis Terhadap Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Di Bidang Sosial Keagamaan.*[16]Yang menjelaskan bahwa Perda yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam bidang sosial keagamaan umumnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi. Hal ini merupakan wujud dari pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah, seperti yang tertera dalam pasal 136 ayat 2 bahwa perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.

Jika dianalisis dari produk perda yang ada, tampaknya reformasi yang didorong oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas lebih menitikberatkan pada reformasi dari sisi kelembagaan dan sistem pemerintah. Padahal, reformasi kelembagaan dan reformasi sistem kurang berjalan dengan baik manakala reformasi dari sisi kultur tidak dilaksanakan. Di Kabupaten

[16] LIhat Abdul Basit, *Analisis Terhadap Kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas di Bidang Sosial keagamaan,* (Purwokerto: JPA P3M, 2008), Vol. 9, No. 2, 143-168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyumas reformasi kultur dilakukan melalui program-program kerja yang digulirkan oleh masing-masing dinas dan lembaga teknis daerah. Menurut penulis, untuk memberdayakan kultur amat diperlukan adanya dukungan dari perda sebagai payung tertinggi di daerah sehingga dinamika dan kreativitas masyarakat lebih berkembang.

Hal terpenting yang bisa dilakukan dalam menyikapi adanya perda-perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyumas adalah perlunya masyarakat berpartisipasi dengan sebaik-baiknya.Kita bisa memberikan masukan dan saran untuk pengembangan daerah.Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah dijamin secara tegas bahwa partisipasi mamsyarakat sangat diharapkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan. Dengan adanya partisipasi langsung dari masyarakat diharapkan akan muncul perda-perda yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat, pendidikan, dan agama.

Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Abdul Basit, penelitian ini lebih memfokuskan pada upaya-upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan melalui Perda dan aplikasinya dalam mengupayakan peningkatan pendidikan madrasah, madrasah diniyah, dan pesantren yang lebih berkualitas. Sehingga Perda yang dibuat itu berimplikasi secara signifikan terhadap persaingan kualitas pendidikan madrasah, madrasah diniyah dan pesantren yang selama ini di pandang sebelah mata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, Dalam Jurnal kebijakan Publik Pada pemerintah, yang ditulis oleh Davy Nuruzzaman dengan judul *Permasalahan Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah*.[17] Dalam pemaparannya, Nuruzzaman menjelaskan Sampai dengan saat ini, penetapan model demokrasi dalam sistem Pemerintahan Daerah yang sekarang diterapkan belum mencapai hasil yang diharapkan. Perilaku birokrasi dan kinerja pemerintah daerah belum dapat mewujudkan keinginan dan pilihan publik untuk memperoleh jasa pelayanan yang memuaskan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik oleh pemerintah daerah dalam hal ini dapat dilakukan dengan strategi-strategi yang dapat membangun sistem pelayanan yang baik untuk mewujudkan kualitas dari kebijakan publik yang baik pula.Upaya ini dapat terwujud apabila terdapat konsistensi dari sikap pemerintah daerah bahwa keberadaannya adalah semata-mata mewakili kepentingan masyarakat di daerahnya. Otonomi diberikan kepada masyarakat. Sehingga keberadaannya harus memberikan pelayanan yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki otonomi tersebut.

Perangkat birokrasi yang ada baru dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas apabila kinerjanya selalu didasarkan pada nilai-nilai etika pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik yang baik tentu memiliki beberapa aspek, yaitu : sistem, kelembagaan, sumber daya manusia, dan keuangan. Dalam hal ini pemerintah harus benar-benar memenuhi keempat aspek tersebut, karena dengan begitu, masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sehingga akan tercipta suatu sistem yang baik serta keberlangsungan jalannya pemerintahan melalui kebijakan publik dapat berjalan dengan baik pula.

[17] Davy Nuruzzaman, *Permasalahan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah*, (Jurnal-Kebijakan-Publik Pemerintah, 2012), Tahun II-Nomor 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbeda dengan Davy Nuruzzaman, penelitian ini tidak mengungkap masalah etika publik lebih luas, namun difokuskan pada implementasi Perda kabupaten Pasuruan tentang peningkatan kualitas pendidikan di Madrasah, Madrasah Diniyah, dan Pesantren oleh Dinas Pendidikan bukan kementerian Agama yang selama ini terjadi di daerah lain.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Lemlit IAIN (UINSA) Sunan Ampel Surabaya tentang *Studi Kebijakan Pemerintah Daerah Di Bidang Pendidikan Agama; Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Madrasah Ibtidaiyah di Kota Surabaya dan Kota Malang*.[18] Produk kebijakan Publik Pemerintah Kota Surabaya dan Kota Malang di bidang pendidikan agama tidak berinteraksi dengan pelibatan aspirasi dan partisipasi kebutuhan Madrasah Ibtidaiyah dalam perumusan kebijakan publik dan masih menimbulkan perlakuan diskriminatif antara posisi Madrasah Ibtidaiyah dengan Sekolah Dasar. Namun demikian dalam kebijakan telah ditemukan beberapa model formulasi kebijakan berupa; (1).Pemberian Bantuan Dana Madrasah Ibtidaiyah; (2).Pemberian Bantuan Studi Lanjutan Guru Madrasah Ibtidaiyah; (3). Pemberian Bantuan Pembangunan Gedung Madrasah Ibtidaiyah; (4). Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Pengajaran Madrasah Ibtidaiyah, sebagai bentuk tawaran program Pemerintahan Daerah Kota Malang. Sedangkan Pemerintahan Daerah Kota Surabaya menawarkan formasi kebijakan berupa; (1).Pemberian Bantuan

[18] Amirullah el-Ikruq, dkk, *Studi Kebijakan Pemerintah Daerah Di Bidang Pendidikan Agama; Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Madrasah Ibtidaiyah di Kota Surabaya dan Kota Malang,* (Surabaya: Lemlit-IAIN, tth)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dana Madrasah Ibtidaiyah; (2).Pemberian Bantuan Guru Honorer Maadrasah Ibtidaiyah; (3) Pemberian Bantuan Pembangunan Gedung Madrasah Ibtidaiyah.

Implementasi operasional kebijakan publik Pemerintahan kota Malang di bidang pendidikan agama Madrasah Ibtidaiyah dihadirkan melalui landasan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota dan Peraturan Dinas Pendidikan Kota Malang. Disamping itu, telah dirancang Tim Pelaksanan Teknik sebagai bagian struktur pelaksanaan program.Berbeda dengan implementasi kebijakan publik Pemerintahan Daerah Kota Surabaya di bidang pendidikan agama Madrasah Ibtidaiyah, yang hanya berlandaskan pada Peraturan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.Namun demikian, baik Pemerintahan daerah Kota Malang maupun Pemerintahan Daerah Kota Surabaya, dalam pelaksanaan program tidak memberikan ruang kontrol publik sebagai bagian integral dalam kebijakan Publik. Sehingga kebijakan publik tersebut beralih kearah yang samar sebagai milik publik, dan masih dalam kategori kebijakan yang tidak transparan sebagai kebijakan publik.

Sementara dampak kebijakan publik Pemerintahan Daerah Kota Surabaya dan Kota pada aspek kebijakan terkait dengan output pendidikan menegaskan bahwa bentuk-bentuk program yang sangat dibutuhkan oleh Madrasah Ibtidaiyah. Namun lebih lanjut sangat membutuhkan pemetaan kebutuhan dasar Madrasah Ibtidaiyah.Sehingga dibutuhkan studi kelayakan dan kedekatan dengan ruang publik sejak awal, utamanya kebutuhan Madrasah Ibtidaiyah dan akuntabilitas publik.Sementara pada aspek *policy out*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

come, kebijakan tersebut mendapat respon sebagai bentuk kepedulian.Namun juga semakin mendekatkan kenyataan diskriminasi perlakuan kebijakan. Ditambah pula munculnya tingkat kerumitan di sektor birokrasi sebagai pelaksana teknik kebijakan publik.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lemlit IAIN (UINSA), penelitian ini lebih difokuskan pada produk kebijakan yang tertuang dalam Perda Kabupaten Pasuruan yang lebih intens pada formulasi akademik dan operasional pendidikan yang terkait dengan pendidikan madrasah, madrasah diniyah, dan pesantren yang selama ini (di daerah lain) lebih dibebankan kepada kementerian Agama kabupaten. Hal inilah yang menjadikan keunikan penelitian ini dibanding dengan penelitian secara umum. Artinya, bahwa yang selama ini dinas pendidikan hanya memikirkan lembaga-lembaga yang berada dalam kewenangan, dalam hal ini adalah SD-SLTA dan sementara terhadap lembaga pendidikan MI-MA yang nota bene dalam naungan Kemenag.

Keempat, Penelitian yang dilakukan dalam Jurnal Pendidikan Inovatif Vol. 3, Nomor 1, September 2007 dengan judul *penelitian Analisis Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Jambi* oleh Sutrisno dan Muhammad Rusdi. Profil kebijakan Pendidikan dalam rangka peningkatan mutu di Provinsi Jambi memiliki beberapa karakteristik: (1) Provinsi Jambi belum memiliki Perda yang tertuang secara spesifik; (2) Pemerintah Provinsi Jambi masih berupaya untuk dapat meningkatkan anggaran pendidikan, sebagai wujud dari implementasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

amandemen UUD 1945; (3) kebijakan pendidikan yang dijalankan masih bersifat insidental, sporadis dan belum terencana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh pembangunan *database* yang belum berorientasi pada pengembangan mutu pendidikan; (4) kordinasi antara Bappeda dengan Diknas sangat diperlukan dalam menetapkan sasaran peningkatan mutu pendidikan; (5) kebijakan peningkatan mutu pendidikan yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, pendidikan perlu mendapatkan perhatian yang serius sesuai dengan PP. 19 Tahun 2005 tentang SNP dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Berbeda dengan penelitian Sutrisno dan Rusdi, penelitian ini lebih memfokuskan pada kajian kebijakan pemerintah di kabupaten Pasuruan yang tertuang dalam Perda yang akan diimplementasikan oleh Dinas Kabupaten Pasuruan. Sejauhmana implikasi dari sebuah kebijakan pemerintah dalam upayanya meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah, madrasah diniyah, dan pesantren yang selama ini cenderung terabaikan. Adakah nilai-nilai positif yang dirasakan oleh masyarakat terutama tentang mutu pendidikan keagamaan di Kabupaten Pasuruan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengurai secara sistematik pokok kajian dalam penelitian ini, maka sistematika pembahasannya adalah sebagaimana berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab I terdiri dari: Pendahuluan yang mencakup tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II akan mengulas tentang: Kajian teoritik yang mencakup, *Pertama,* tentang kebijakan publik dalam pendidikan, *Kedua,* tentang birokrasi berbasis otonomi yang melingkupi otonomi pendidikan, instansi pelaksanaan pendidikan, tugas dan peran dinas pendidikan. Kemudian *ketiga* akan dikaji tentang madrasah, madrasah diniyah, dan pondok pesantren. *Keempat* lebih fokus pada otonomi pendidikan dalam konteks reformasi pendidikan di Indonesia, *Kelima* membicarakan terkait dengan posisi madrasah, madrasah diniyah dan pondok pesantren dalam otonomi pendidikan, dan *Keenam* menjabarkan tentang peningkatan mutu pendidikan agama Islam

Bab III: Metode Penelitian, mencakup tentang; *pertama* lokasi penelitian, *kedua* pendekatan penelitian, *ketiga* Sumber data informasi, *keempat* teknik pengumpulan data, *kelima* teknik analisis data, dan *keenam* operasional analisis data.

Bab IV: Dalam bab ini akan diuraikan hasil dari temuan-temuan di lapangan baik melalui hasil wawancara, observasi dan diskusi mengenai *pertama,* tentang profil dinas pendidikan Kabupaten Pasuruan. *Kedua,* menguraikan tentang peranan Pergurag, *ketiga,* menjelaskan dan menggambarkan tentang peningkatan pendidikan agama Islam Kabupaten

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasuruan dan *keempat* menguraikan tentang bentuk-bentuk kebijakan-kebijakan tetang pendidikan.

Bab V: Pada bab ini akan disajikan pembahasan hasil temuan dan analisis semua data yang telah diperoleh selama proses penelitian berlangsung. *Pertama*, sistem pendidikan madasah, madrasah diniyah dan pondok pesantren *kedua*, langkah-langkah strategis peningkatan pendidikan Agama, *ketiga*, menjelaskan tentang implementasi kebijakan daerah tentang pendidikan agama. *Keempat*, akan mneguraikan tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat terkait dengan kebijakan pendidikan dan *kelima*, membicarakan tentang pendidikan agama yang visioner dan untuk bab VI akan memberikan paparan terkait dengan penutup yang berisikan kesimpulan, saran dan proposisi-proposisi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Kebijakan Publik dalam Pendidikan di Daerah

Kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat oleh negara, yang bisa jadi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.[1] Kebijakan pada hakikatnya merupakan sebuah aktivitas yang khas (*a unique activity*), dalam artian ia mempunyai ciri-ciri tertentu yang agaknya tidak dimiliki oleh kebijakam jenis lain. Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan-kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu lazimnya dipikirkan, didesain, dirumuskan, dan diputuskan oleh mereka yang oleh David Easton disebut sebagai orang-orang yang memiliki otoritas (*publik authorities*) dalam sistem politik.[2]Dalam sistem politik/masyarakat tradisional yang sederhana, contohnya para ketua adat atau ketua suku. Sedangkan di sistem politik atau masyarakat modern yang kompleks, mereka itu adalah eksekutif, legislator, hakim, administrator, monarki, dan sejenisnya. Mereka inilah, masih menurut pendapat Easton, merupakan orang-orang yang dalam kesehariannya terlibat langsung dalam urusan-urusan politik dari sistem politik, dan dianggap oleh sebagian besar warga sistem politik itu sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan bertanggung jawab atas urusan-urusan politik tadi. Secara generik terdapat empat jenis kebijakan publik sebagaimana bagan berikut:

---

[1] H.A.R Tilaar & Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan; Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 264.

[2] David Easton, *A System Analysis of Political Life,* (New York: Willey, 1965), 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jenis-jenis Kebijakan

Tabel: 2.1

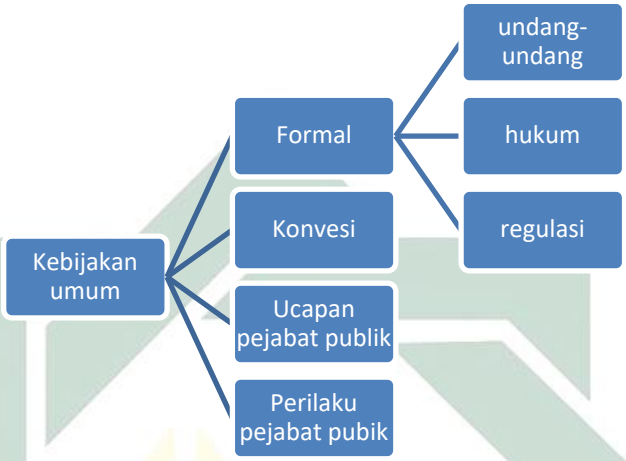

Sebagaiana jenis-jenis kebijakan tersebut, hanya kebijakan formal yang memiliki kodifikasi dari hasil-hasil keputusan secara tertulis dalam bentuk legal formal untuk selanjutnya diundangkan.[3]Jenis kebijakan seperti inilah yang secara perundang-undangan menjadi hukum dan regulasi yang diterapkan di masyarakat, lembaga dan lain sebagainya.

Mengingat posisi strategisnya yang demikian itu, mereka dengan sendirinya dianggap berhak untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu atas nama warga sistem politik, sepanjang tindakan-tindakan ttersebut masih berada dalan batas-batas koridor peran dan kewenangan mereka. Di negara-negara yang menganut paham demokrasi konstitusional, kebijakan publik itu dibuat dan dijalankan oleh "*people who have been authorized to act by popular consent and in accordance with established norms and procedures*"[4]

[3] Riant Nugroho, *Metodologi Penelitian Kebijakan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 8-9.
[4] David Easton, *The Political System*, (New York: Knopf, 1953), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(orang-orang yang telah diberi wewenang untuk bertindak dengan persetujuan populer dan sesuai dengan norma-norma dan prosedur). Di negara-negara demokratis seperti itu kebanyakan para pembuat kebijakan publik terdiri dari pejabat-pejabat yang dipilih (*elected officials*). Dalam konteks politik seperti itu, para pejabat terpilih tadi, baik yang menepati posisinya di lembaga-lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) maupun lembaga eksekutif (presiden/wakil presiden), memainkan peran penting dalam proses pembuatan kebijakan. Kendati demikian, pada setiap sistem proses modern tentu ada pula pejabat-pejabat pembuat kebijakan yang menduduki posisinya justru bukan dipilih, melainkan diangkat (*appointed*).[5]

Di Indonesia sendiri, contoh-contoh para pejabat dalam kategori ini, misalnya Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jaksa Agung, komisioner-komisioner pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), anggota-anggota pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) atau Gubernur Bank Indonesia. Para pejabat publik penting ini, meski proses rekrutmenya melewati mekanisme seleksi dan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR, namun pengangkatannya dilakukan dengan keputusan presiden. Selain para pejabat tersebut, ada pula para pejabat administratif atau birokrat di eselon tertentu, yang kemungkinan juga memiliki kewenangan terbatas dalam pembuatan kebijakan publik (*limited policymaking authority*).

[5] Tilaar, *Kebijakan Pendidikan*, 265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah hal yang menentukan dalam kebijakan publik, termasuk terhadap perjalanan pendidikan.[6] Meski demikian, satu persoalan penting yang patut diperhatikan di sini, apakah para pejabat itu menempati jabatannya denga cara dipilih (*elected*) atau diangkat (*appointed/non elected*) memiliki komitmen untuk kemajuan pendidikan dapat kita sebut sebagai orang-orang yang memanajeri dan memegang amanah publik (*managers of the public trust*). Oleh sebab itu, baik langsung atau tak langsung perilaku mereka harus akuntabel, bertanggung jawab pada publik. Sebagai konsekuensinya,tindakan-tindakan apa pun yang mereka lakukan akan selalu menjadi sorotan dan pertimbangan publik. Membangun sebuah komitmen diri (*self commitment*) agar senantiasa mampu berperilaku sejalan dengan amanah publik itu menjadi sebuah tuntutan yang digantungkan pada mereka, sejak menduduki jabatan publik tersebut.Jika suatu saat mereka tergelincir melakukan perbuatan tak pantas, seperti terlibat skandal seks atau korupsi, bukan tak mungkin bisa berakibat terhambatnya perjalanan karir, bahkan dipecat atau dilengserkan dari jabatannya. Contoh tentang pelengseran/pemecatan dari jabatan atau pemindanaan pejabat-pejabat publik karena skandal korupsi di Indonesia sangat banyak. Misalnya, yang dialami oleh beberapa bupati/walikota daerah karena terbukti melakukan *mark up*dana proyek pembagunan, termasuk dana pendidikan atau puluhan anggota DPRD di berbagai daerah yang dijebloskan ke penjara lantaran terbukti mengorupsi secara “berjamaah” Dana Anggaran Pendapatan

[6] Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan Yang Unggul; Kasus Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Jembrana*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajara, 2008), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Belanja Daerah (APBD). Penjelasan yang baru dikemukakan di atas ternyata membawa implikasi tertentu terhadap konsep kebijakan publik teramsuk terkait dengan kebijakan pendidikan bai secara nasional maupun daerah.

Oleh karena perumusan tentang hakikat visi dan misi pendidikan tergantung kepada aspek-aspek politi-sosial-ekonomi di mana manusia hidup. Sementara pada sisi lain, pendidikan merupakan suatu ilmu pengetahuan praksis yaitu merupakan kesatuan antara teori dan praktik maka analisis kebijakan pendidikan merupakan salah satu input yang penting pula dalam perumusan kebijakan-kebijakan publik yang menyangkut pendidikan daerah.[7]

Dua aspek yang tidak lepas kaitannya dengan kebijakan adalah perspektif administrasi dan perspektif publik. Dalam perspektif administrasi, kebijakan diartikan sebagai tindakan politik untuk memengaruhi perilaku orang lain**.** Bahwa dapat pula diartikan sebagai tindakkan politik atau serangkaian prinsip dan konsep yang lahir dari pemikiran seseorang atau kelompok sehubungan dengan kebijakan publik.[8]Sementara dalam persektif publik adalah merupakan proses kebijakan yang melahirkan proses pengetahuan untuk diaplikasikan. [9] *Pertama***,** kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan pada tujuan tertentu, daripada sekadar sebagai bentuk perilaku atau tindakan menyimpang yang serba acak (*at random*), asal-asalan, dan serba kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik,

[7] "Ibid"., 138.
[8] Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 34.
[9] Willian N Dunn, *Public Policy Analysis; An introduction*, (New Jersey: Pearson Education, 1994), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semisal kebijakan pembangunan atau kebijakan sosial dalam sistem-sistem politik modern, bukan merupakan tindakan yang serba kebetulan atau asal-asalan.Melainkan peran sentral yang mengkoordinasikan rencana-rencana strategis pembangunan yang disusun oleh berbagai instansi pemerintahan, merupakan contoh yang baik mengenai hal itu.

*Kedua***,** kebijakan yang pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya, kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti dengan keputusan-keputusan/petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan yang lebih detail, bersangkut paut dengan proses implementasi dan mekanisme pemaksaan pemberlakuannya.[10]

Ketiga, kebijakan itu ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, termasuk pendidikan.Misalnya, dalam mengatur dana-dana operasional siswa, tnjangan profesi atau tentang kurikulum.

Keempat, kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuknya yang positif, kebijakan publik mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi penyelesaian atas masalah tertentu. Sementara dalam bentuk negatif, ia kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat

[10] Yoyon, *kebijakan Pembaharuan pendidikan*, 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah untuk tidak bertindak. atau tidak melakukan tindakan apa pun dalam masalah-masalah di mana campur tangan pemerintah itu sebenarnya justru amat diperlukan. Sebagai contoh, dalam iklim perdagangan dan pasar bebas (*free market and free trade*) dewasa ini pemerintah cenderung tutup mata dan telinga alias membiarkan saja perdagang-pedagang tradisional (buah-buah, garmen, mebel) babak belur, bahkan terpaksa gulung tikar, karena mereka tidak lagi sanggup bersaing dengan produk-produk impor yang diperjualbelikan secara masif lewat gerai-gerai swalayan modern.

Dengan kata lain, yang ingin ditegaskan di sini, pemerintah dapat saja menempuh suatu kebijakan yang sangat liberal, kebijakan pembiaraan, atau cuci tangan sama sekali, baik terhadap seluruh atas sebagian sektor kehidupan, dan menyerahkan semua urusan tersebut sepenuhnya pada mekanisme pasar. Sudah barang tentu, dalam kasus seperti itu adanya bentuk campur tangan/keterlibatan pemerintah dapat membawa dampak tertentu bagi sebagian atau seluruh warga masyarakat, yakni para pelaku ekonomi mikro tradisional yang bersangkutan. [11] Di negara hukum seperti Indonesia, kebijakan publik paling tidak dalam bentuknya yang positif, dibuat berlandaskan hukum dan kewenangan tertentu. Para warga masyarakat akan dengan sendirinya menerima sebagai sesuatu yang absah (*legitimate*) bahwa pajak atau iuran pembangunan daerah wajib dibayar. Para koruptor, teroris, dan pengedar narkoba harus diganjar hukuman yang berat. Para difabel (penyandang cacat) yang mampu bekerja dicarikan jenis pekerjaan yang

[11] Yoyon, kebijakan Pembaharuan pendidikan, 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai, sedangkan mereka yang tak mampu bekerja harus mendapat santunan sosial.[12] Kebijakan publik seperti itu, memiliki daya ikat yang kuat terhadap masyarakat secara keseluruhan (*community as a whole*) dan memiliki daya paksa tertentu yang tidak dimiliki oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh organisasi privat, atau organisasi nonpemerintah/swasta yang umumnya hanya memiliki daya ikat internal dan terbatas. Masing-masing kategori tindakan tersebut akan kita bahas secara ringkas dalam uraian berikut. Meski harus diingat bahwa dalam praktik hal itu tidak mesti terjadi secara runtut, namun bisa menyelesaikan teka-teki problem pendidikan melalui kebijakan publik.[13]

B. Birokrasi Berbasis Otonomi

Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan bentuk sistem penyerahan urusan pemerintahan dan pelimpahan wewenang kepada daerah yang berada di bawahnya.Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur urusan rumah tangga daerah dengan landasan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.[14] Otonomi daerah merupakan manifestasi dari sebuah keinginan dalam hal mengatur dan mensirkulasikan segala kebijakan sebagai wujud dan cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut.

---

[12] Yoyon, kebijakan Pembaharuan pendidikan, 35.
[13] Christoper Winship, *Analisis Kebijakan Sebagai Pemecahan Teka-teki*, dalam Handbook of Public Policy, Ed. Michael Mon, dkk, (New York: Oxford University Press, 2006), 139.
[14] Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Gubernur: Kedudukan, Peran dan kewenangannya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara definitif, pengertian otonomi daerah menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 sebagai amandemen Undang-undang No. 22 tahun 1999 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Otonomi merupakan sistem yang memungkinkan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia. [15] Sementara desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah.

Menurut Piliang dalam Peni Chalid, desentralisasi dan otonomi daerah merupakan bentuk sistem penyerahan urusan pemerintahan dan pelimpahan wewenang kepada daerah yang berada di bawahnya. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pada tingkat yang terendah, otonomi berarti mengacu pada perwujudan *free will* yang melekat pada diri-diri manusia sebagai satu anugerah paling berharga dari Tuhan.*Free will* inilah yang mendorong manusia untuk mengaktualisasikan diri dan menggali seluruh potensi terbaik dirinya secara maksimal.Berawal dari individu-individu yang otonom tersebut kemudian membentuk komunitas dan menjadi bangsa yang unggul. Otonomi individu menjadi modal dasar bagi terbentuknya otonomi pada level yang lebih tinggi.

[15] "Ibid"., 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Otonomi daerah adalah manifestasi dari keinginan untuk mengatur dan mengaktualisasikan seluruh potensi daerah secara maksimal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.Otonomi daerah dipandang penting karena otonomi merupakan kebutuhan hakiki di mana daerah memiliki keinginan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah memberikan peluang untuk bersaing secara sehat dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat dan juga antardaerah.Untuk itu, otonomi daerah perlu diperkuat dengan peraturan yang jelas dan rambu-rambu yang disepakati bersama untuk menjamin keteraturan sosial dan mencegah timbulnya kerawanan sosial yang tidak perlu, terutama dalam rangka mempertegas harus ada pembaharuan pendidikan.[16]

Otonomi daerah adalah wacana yang hangat dibicarakan dan diperdebatkan karena menyangkut bagaimana upaya negara untuk menyejahterakan rakyat.Di Indonesia, wacana otonomi daerah menguat di tahun 1990-an. Dalam kurun waktu cukup lama, Indonesia telah melaksanakan pemerintahan yang terpusat dengan paradigma pembangunan sebagai landasan nilai yang menjadi acuan kebijakan pemerintah.Sistem sentralistik yang mengakar kuat dan mendarah daging membuat isu desentralisasi atau otonomi daerah menjadi ‘barang asing’ yang bahkan definisinya pun tidak mudah untuk dipahami. Meskipun keluarnya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang

[16] Sam M. Chan, Analisis SWOT: Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan hubungan keuangan pusat-daerah sudah cukup merendam tuntutan aspirasi daerah.[17]

1. Otonomi Pendidikan dan Struktur Pelaksanaan Pendidikan

Ada tiga persoalan yang patut diantisipasi dalam desentralisasi pembangunan pendidikan yaitu: Apakah pemberian otonomi kepada daerah akan menjamin setiap warga negara memperoleh haknya dalam pendidikan? Dan apakah dengan pemberian kewenangan menyelenggarakan pendidikan kepada daerah dapat menjamin peran serta masyarakat akan meningkat? Dan apakah penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan di daerah dapat mencapai hasil-hasil pendidikan yang bermutu?

Untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut, penulis akan kembali ke kitab yang menjadi rujukan, yaitu kitab perundang-undangan tentang penyelenggaraan otonomi pemerintahan daerah. Karakteristik yang melekat pada UU No. 32/2004 telah membawa implikasi terhadap menejemen pendidikan nasional. Implikasi tersebut di antaranya bahwa setiap proses penyelenggaraan pendidikan harus pula berlandaskan *buttom up approach*, karena di samping pembangunan pendidikan nasional harus *acceptable* bagi masyarakatnya, juga harus *accountable* dalam melayani publik terhadap kebutuhan pendidikan.

Secara teknis operasional, pembangunan pendidikan tingkat atas eksistensinya tergantung rekomendasi kebuthan pada tingkat bawahannya secara berjenjang, dalam arti substansi, proses, dan konteks penyelenggaraan pendidikan pada tingkat Kabupaten/Kota tidak mutlak

[17]Suryo Sakti Hadiwijoyo, Gubernur: Kedudukan, Peran dan kewenangan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) 35-36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama, baik dengan daerah lainnya yang sederajat maupun dengan daerah Provinsi. Secara teoritis, keragaman itu akan memunculkan sinergisme yang didukung oleh keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan.[18]

Dengan demikian, bahwa besar dan luasnya kewenangan dalam penyelenggaraan pedidikan akan tergantung kepada sistem politik dalam memberikan keleluasan tersebut. Akan tetapi, sekalipun keleluasan itu diberikan tidak dapat diartikan sebagai pemberian kebebasan mutlak tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional, sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara administrator pendidikan pada tingkat pusat dengan administrator pendidikan di tingkat kelembagaan satuan pendidikan. Sesungguhnya konflik kepentingan tersebut tidak perlu terjadi apabila para administrator tersebut memahami hakikat dan urgensi perlunya desentralisasi dalam pembangunan, yang walaupun terjadi tarik menarik kepentingan tersebut harus berdasarkan pada prinsip saling ketergantungan untuk menghasilkan sinergitas bagi tujuan-tujuan pembangunan pendidikan yang lebih luas.

Secara teoretis struktur organisasi desentralisasi ditunjukkan dengan tingkat pengambilan keputusan yang terjadi dalam organisasi. Dalam struktur desentralisasi, sebagian keputusan diambil pada tingkat hierarki oraganisasi tertinggi, dan apabila sebagian besar otoritas didelegasikan pada tingkatan yang rendah dalam organisasi, maka

[18] Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2012), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oraganisasi tersebut tergolong pada organisasi yang terdesentralisasi. Dengan demikian, inti dari desentralisasi adalah adanya pembagian kewenangan oleh tingkat organisasi di atas kepada oragnisasi di bawahnya. Implikasi dari hal ini tersebut adalah desentralisasi akan membuat tanggung jawab yang lebih besar kepada pimpinan di tiap level organisasi dalam melaksanakan tugasnya serta memberikan kebebasan dalam bertindak. Dengan desentralisasi akan meningkatkan independensi para administrator serta komitmennya terhadap kelangsungan hidup organisasi.[19]

Istilah desentralisasi manajemen mengandung makna bahwa proses pendelegasian atau pelimpahan kekuasaan atau wewenang dalam sistem organisasi diberikan dari pimpinan atau atasan ke tingkat bawahan.[20] Secara umum tujuan desentralisasi manjemen di dalam kehidupan berorganisasi adalah untuk meningkatkan efisiensi manjemen dan kepuasan ketja pegawai melalu pemecahan masalah-masalah yang berhubugan langsung dengan daerah lokal. Dengan demikian desentralisasi manajemen pendidikan adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada daerah untuk membuat keputusan manajemen dan menyusun perencanaan sendiri dalam mengatasi masalah pendidikan, dengan mengacu kepada sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, dalam praktik desentralisasi manajemen pendidikan dapat diterapkan di

[19] Chan, Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah, 6.
[20] "Ibid"., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam beberapa tingkat dan struktur organisasi penyelenggaraan pendidikan, mulai dari tingkat nasional sampai tingkat satuan pendidikan.

Rondinelli dan Cheema, lebih luas memaparkan maksud-maksud perlunya desentralisasi, dengan mengatakan bahwa:

Decentralization in the transfer of planning, decision making, or administrative authority from the central government to its field organizations, local administrative units, semi-autonomous and parastatal organizations, local government, or non government organizations. … different froms of decentralization can be disintingished primary by the extent to which authority to plan, decide and manage is transferred from central government to other organization and the amount of autonomy the 'decentralization organizations' achieved in carrying out their tasks.[21]

Dalam konsepnya, desentralisasi manajemen pendidikan merupakan upaya untuk mendelegasikan sebagian atau seluruh wewenang di bidang manajemen pendidikan yang seharusnya dilakukan oleh unit atau pejabat organisasi di tingkat pusat kepada unit atau pehabat di bawahnya atau dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Atau dari pemerintah pada masyarakat. Salah satu wujud dari desentralisasi manajemen pendidikan iu ialah terlaksananya proses keleluasaan dalam manajemen penyelenggaraan pendidikan.[22]

Namun demikian, dalam praktiknya tidak seluruh kewenangan tersebut dapat didesentralisasikan. Kewenangan perumusan atau pembuatan kebijakan nasional mengenai pendidikan yang meliputi kurikulum, persyaratan-persyaratan pokok tentang jenjang pendidikan, persyaratan pembukaan program baru, persyaratan tentang guru atau

[21] Dennis A. Rondinelli & G. Shabbir Cheema, *Decentralization and Development, Policy Implementation in Developing Countries*, (California: Sage Publication Inc, 1988),18.
[22] "Ibid"., 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidik di setiap jenjang pendidikan, dan kegiatan-kegiatan strategis lainnya yang dipandang lebih efektif, efisien, dan tepat jika tidak didesentralisasikan masih dilakukan dan diperlukan sentralisasi. Sedangkan setiap kewenangan implementasi dan evaluasi kebijakan nasional dalam hal-hal tertentu, dilakukan oleh pemerintah pusat dan dapat pula diserahkan atau didesentralisasikan ke unit di bawah, di daerah atau kepada masyarakat. Demikian juga kewenangan pembuatan kebijakan yang berdimensi daerah tidak dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan bisa segera didesentralisasikan.

UU No. 32/2004 dan kitab UU No. 33/2004 menjadi dasar implementasi desentralisasi pemerintahan. Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah provinsi, kabupaten dan kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut kebutuhan, kemampuan dan tingkat perkembangan sendiri.[23]

Pembaruan sistem pemerintah tersebut mempunyai implikasi langsung terhadapp sistem pendidikan nasional, terutama yang berkaitan dengan masalah substansi, proses dan konteks manajemen penyelenggaraan pembangunan pendidikan. Namun, penyelenggaraan sistem pendidikan nasional untuk masa-masa mendatang, walaupun telah memiliki perangkat pendukung perundang-undangan, juga masih dihadapkan pada sejumlah faktor yang menjadi tantangan dalam

[23] "Ibid"., 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerapan desentralisasi pendidikan di daerah. Seperti tingkat perkembangan ekonomi dan sosial budaya setiap daerah, tipe dan kualitas kematangan SDM yang diperlukan oleh daerah setempat, perkembangan ilmu dan teknologi, perkembangan dunia industri dan tingkat perkembangan lembaga-lembaga satuan pendidikan di setiap daerah. Ini semua mengisyaratkan perlunya pemikiran dan kajian yang lebih matang dalam menyiapkan situasi lokal atau lembaga satuan pendidikan, agar desentralisasi dalam manajemen penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dapat dilaksanakan dengan baik.

Apabila UU No. 32/2004 dilaksanakan secara konsisten, secara teoretis kehendak Pasal 21 ayat (1) kitab UUD/1945 kemungkinan besar terealisasikan, karena pelayanan pemerintah kepada masyarakat di bidang pendidikan dan pengajaran, rentangnya tidak terlalu jauh. Dengan demikian, peranan proses manajemen dalam pembangunan pendidikan akan semakin strategis.[24]

2. Instansi Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia

Dalam konteks nasional, pendidikan Islam Merupakan sub-sistem dari pendidikan nasional. Sebagai sistem, pendidikan Islam hanya berlaku di pondok-pondok pesantren dan lembaga pendidikan Islam lainnya yang sepenuhnya berlandaskan ajaran Islam. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional maka pendidikan Islam tersebut

[24] "Ibid"., 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi salah satu bentuk pendidikan luar sekolah yang juga harus berorientasi pada pendidikan nasional.[25]

Integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional dengan demikian bukan merupakan integrasi dalam arti penyelenggaraan dan pengelolaan madrasah oleh Departemen Pendidikan Nasional, tetapi lebih pada pengakuan yang lebih mantap bahwa madrasah adalah bagian dari sistem pendidikan nasional walaupun pengelolaannya dilimpahkan pada Departemen Agama.

Undang-Undang Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989 telah memperkuat posisi madrasah terhadap sekolah, namun disisi lain dianggap memperlemah posisi madrasah sebagai lembaga pendidikan agama yang fokus utamanya agama dan pengetahuan umum tambahan. Posisi ini diperkuat pada era Otonomi Daerah melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang secara *de jure* juga mengakui eksistensi madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Dalam Bab VI tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pasal 17, 18 tentang pendidikan dasar dan menengah dijelaskan bahwa Pasal 17:[26]

(1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.

[25]Ahmad Ludjito, "*Pendekatan Integralistik Pendidikan Agama pada Sekolah di Indonesia*", dalam Chabib Thoha, dkk., *Reformasi Filsafat Pendidikan Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). 301.

[26]Sebagaimana yang teah dijelaskan Chabib Thoha, dkk.,*Reformasi Filsafat Pendidikan Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). 302-303.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat dengan sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

(3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 18 :

(1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.

(2) Pendidikann menengah terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.

(3) Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

(4) Ketentuan mengenai pendidikakn menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.[27]

Secara *de jure*, persoalan madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam sudah terselesaikan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang diakui sama dengan sekolah. Namun secara *de facto* madrasah yang berada di bawa naungan Departemen Agama sebagian berlokasi di pendesaan. Mayoritas siswanya juga dari kalangan keluarga kurang mampu. Karena itu, madrasah mengalami sejumlah

[27] Chabib Thoha, dkk.,*Reformasi Filsafat Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). 303.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kendala yang cukup berat dalam menjalankan proses pembelajaran, seperti sarana dan prasarana yang minim, kurangnya buku-buku dan fasilitas penunjang pembelajaran lainnya, serta kurangnya tenaga guru baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Eksistensi madrasah selama ini dilihat dari analisis edukatif variabel mutu pendidikan, bahwa biaya dari pemerintah bukan satu-satunya faktor penentu untuk memajukan lembaga pendidikan madrasah. Yang paling penting adalah variabel sumber daya manusia (SDM) dan dukungan masyarakat di sekitarnya. Selama ini madrasah bersifat bottom up atau lahir dan dikembangkan oleh masyarakat (umat Islam), sedangkan sekolah umum lebih bersikap top down atau merupakan program dari pemerintah pusat. Karena madrasah berkembang dari bawah, sehingga risikonya madrasah ridak mendapat dukungan dana yang kuat dari pemerintah. Kalaupun ada dana, nilainya jauh lebih kecil dari sekolah-sekolah umum.[28]

3. Tugas dan Peran Dinas Pendidikan dalam Kebijakan Pemerintahan Daerah

Tarik ulur reposisi madrasah dalam pendidikan satu atap di bawah Departemen Pendidikan Nasional masih hanya sekedar wacana, walaupun di beberapa daerah dan kebijakan-kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan. Namun secara umum dalam implementasi kebijakan pendidikan masih dijumpai adanya diskriminasi terhadap madrasah oleh Dinas Pendidikan terkait. Tarik ulur antara apakah pendidikan Madrasah,

[28] "Ibid"., 305.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Madrasah Diniyah, dan Pesantren menjadi tanggungjawab Kemendiknas atau Kemenag hingga kini masih simpang siur, sehingga keberadaan madrasah, madrasah diniyah, dan pesantren cenderung dan mayoritas dikelola secara mandiri.

Hal yang masih dipertimbangkan adalah implikasi plus dan minus jika madrasah direposisikan satu atap di bawah Departemen Pendidikan Nasional. Sisi positif antara lain: *Pertama,* terwujudnya persamaan hak dan kewajiban pendidikan anak bangsa. *Kedua,* Madrasah tidak lagi dianaktirikan oleh pemerintah daerah. *Ketiga,* pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi rakyat miskin, mengingat madrasah mayoritas berlatarbelakang ekonomi menengah ke bawah. Adapun sisi negatif antara lain : *Pertama,* tidak semua pemerintah daerah bisa menerima kehadiran madrasah, khususnya di daerah-daerah yang mayoritas non-muslim. *Kedua,* kekhawatiran madrasah akan kehilangan ciri khasnya (kurikulum pendidikan agama). *Ketiga,* ketidaksiapan madrasah untuk menerima pembaharuan-pembaharuan, baik secara institusional maupun manajerial.[29]

Alternatif solusi yang mungkin bisa dipertimbangkan lebih lanjut antara lain: *Pertama,* APBN & APBD harus mampu mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 % non gaji, dan seluruh penyelenggaran pendidikan baik di bawah Depdiknas maupun Depag dialokasikan secara proporsional. Artinya seluruh penyelenggaraan

[29] "Ibid"., 306

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan bisa memenuhi kebutuhan riil pendidikan. Meskipun dalam implementasinya mungkin masih didapati kebijakan-kebijakan yang diskriminatif. *Kedua,* madrasah tetap di bawah naungan Depag tidak dilepaskan secara total, namun ada bebarapa kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah dengan konsekuensi adanya pembagian urusan mengenai wewenang yang jelas antara Departemen Agama dan Depdiknas dalam mengelola pendidikan madrasah, khususnya yang menyangkut persoalan tenaga kependidikan dan kurikulum. *Ketiga,* urusan kelembagaan menjadi tanggung jawab Depag, sedang urusan kurikulum dan ketenagaan dilimpahkan ke pemda.

Ada beberapa cara yang perlu dipertimbangkan dalam memecahkan problema besar kemadrasahan. Ki Supriyoko melihat paling tidak ada dua cara yaitu cara konvesional dan cara modern.[30] Cara yang paling konvesional adalah menyampaikan "ilmu umum" yang porsinya sama dengan yang diberikan di sekolah, kemudian ditambah dengan "ilmu agama". Cara ini bagus akan tetapi hanya efektif dijalankan oleh madrasah dengan siswa yang diasrama alias dipondokkan. Madrasah yang eksistensinya di tengah pesantren biasanya bisa menjalankan cara ini secara produktif, namun pada madrasah nonpesantren yang siswanya tidak menginap, cara ini sangat berat untuk dijalankan.

Cara modern yang bisa dijalankan adalah membenahi metode pembelajaran (*learning method*), meningkatkan mutu guru (*teacher*

[30] "Ibid"., 302.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

quality), atau melengkapi sarana dan fasilitas belajarnya (*facility*). Ketiga pembenahan ini bisa dilakukan secara sendiri-sendiri tetapi lebih produktif dijalankan secara terintegrasi. Lebih daripada itu bahkan di antara cara konvesional dengan cara modern tersebut pun bisa dipadukan secara produktif.

Bagaimanapun juga, pembaharuan-pembaharuan yang akan dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Islam (madrasah) harus tetap mempertimbangkan aspek realitas struktural dan kultural yang terjadi. Kebijakan-kebijakan mengembangkan madrasah perlu mengakomodasikan tiga kepentingan, yaitu : *Pertama*, kebijakan itu harus memberi ruang tumbuh yang wajar bagi aspirasi utama ummat Islam, yakni menjadikan madrasah sebagai wahana untuk membina ruh atau praktek hidup Islami. *Kedua*, kebijakan itu memperjelas dan memperkukuhkan madrasah sebagai ajang membina warga negara yang cerdas, berpengaruh, berkepribadian, serta produktif sederajat dengan sistem sekolah. *ketiga*, kebijakan itu harus bisa menjadikan madrasah mampu merespon tuntutan-tuntutan masa depan.[31]

Oleh karena itu madrasah juga harus mulai berbenah diri untuk memperbaiki manajemen melalui berbagai upaya alternatif untuk mengatasi berbagai problematika baik secara internal maupun eksternal, sehingga mampu meningkatkan kualitas dan daya saing di era globalisasi.

[31]Ali Imran, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia, Proses, Produk & Masa Deoannya*, (Surabaya: Bumi Aksara, 1993), 49, dan lihat juga A. Malik Fajar, Reoreintasi, 95-96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Atas dasar itulah maka untuk memajukan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan madrasah sangat bergantung pada kemampuan dan kesadaran masyarakat setempat. Kalau tingkat ekonomi masyarakat kurang mendukung, madrasah cenderung sulit berkembang dan terkesan asal jalan. Sebaliknya, bila kamampuan ekonomi masyarakat yang mendukung madrasah sangat kuat, maka kualitas madrasah dapat sejajar dengan sekolah-sekolah umum atau sekolah-sekolah negeri lainnya.

Disinilah diperlukan kepandaian penyelenggaraan madrasah untuk menjalin kerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat disekitarnya. Bagaimana agar masyarakat dapat turut merasa memiliki, sehingga dengan suka rela ikut berpartisipasi membesarkan madrasah. Untuk itu, madrasah hendaknya dikelola secara baik dan profesional sehingga dapat bersaing dengan sekolah lainnya. Sudah bukan masanya lagi penyelenggaraan madrasah bekerja hanya berorientasi ibadah semata-mata tanpa memperhatikan profesionalisme dan manajemen yang baik. Dewasa ini persaingan antarasekolah cukup ketat, sehingga sekolah atau madrasah yang tidak dikelola dengan baik akan kehilangan kepercayaan masyarakat.

C. Madrasah, Madrasah Diniyah, dan Pesantren dalam Otonomi Pendidikan

1. Madrasah

Pendidikan keagamaan di jalur sekolah secara berjenjang dan berkelas sebagai istilah untuk jenis pendidikan Islam lebih dikenal dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebutan madrasah. Sebenarnya madrasah dalam peta pendidikan nasional sudah lama dikenal. Sejak kapan kemunculan madrasah tidak diketahui secara pasti dan masih *debatable*. Ada dua karya fenomenal sebagai hasil penelitian serius dengan standart akademik yang dapat mewakili kajian madrasah di Indonesia yang juga menunjukkan kesimpangsiuran informasi keberadaan madrasah.

Karel A. Steenbrink, sarjana Teologi Universitas Katolik Nijmegen Belanda, lewat penelitiannya menelusuri pertumbuhan madrasah di Indonesia. Menurutnya, kemunculan madrasah adalah respon pesantren sebagai akibat adanya lembaga pendidikan modern secara berjenjang yang dikenalkan pemerintah kolonial Belanda.[32] Tesis Steenbrink ini ditolak Maksum. Ia mensinyalir bahwa pertumbuhan dan perkembangan madarasah pada awal abad ke-20 merupakan pengaruh dari gerakan pembaruan Islam di Indonesia yang memiliki kontak cukup intesif dengan gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah.[33] Dari perdebatan ini, ada dua kemungkinan kebenaran eksistensi historis awal kemunculan lembaga madrasah di Indonesia, yakni adanya pembaruan Islam dan adanya pengaruh kebijakan pendidikan yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda. Terlepas dari perdebatan ini, menurut hemat penulis , yang jelas

[32] Yang menarik dari karya Karel A. Steenbrink adalah dari judul karyanya .Ia mencantumkan tiga institusi lembaga pendidikan di Indonesia secara berurutan, yakni pesantren, madrasah, dan sekolah. dari sini seolah-olah ada kesan bahwa kemunculan lembaga sekolah merupakan evolusi dari madrasah. Sedangkan lembaga madrasah marupakan evolusi dari pesantren. Lebih jauh lihat karya Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* (Jakarta: LP3ES, 1986).

[33] Maksum, *Madrasah: Sejarah dan perkembangannya* (Jakarta: Logos, 1996), 81-82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

madrasah adalah salah satu bentuk lembaga pendidikan yang mempunyai ciri khas Islam dan perlu mendapat perhatian atau apresiasi yang memadai dari berbagai kalangan sebagai pendidikan berciri khas Islam yang asli muncul dari rahim tradisi Indonesia.[34]

Sejumlah poin penting yang dapat menjadi pedoman di antaranya: 1) Madrasah meliputi tiga tingkatan: MI setingkat dengan SD, MTs setingkat dengan SMP, MA setingkat dengan SMA; 2) Ijazah madrasah dinilai sama dengan ijazah sekolah umum yang sederajat; 3) Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat lebih atas; dan 4) Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.[35] Tentunya hal itu membawa konsekuensi-konsekuensi yang harus dipenuhi madrasah yang merupakan muatan atau substansi madrasah. Konsekuensi itu berubah perubahan kurikulum dan jumlah jam pelajaran yang harus mengikuti pola Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sekaligus mempertahankan ciri khas Islam yang menjadi identitas madrasah.[36]

Philip H. Coombs dalam bukunya "*What is Educational Planning*", paling tidak ada 4 tahapan permasalahan yang dilewati dunia

[34] Ahmad Ali Riyadi, *Politik Pendidikan: Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional*, Ar-Russ, 2006, Jogjakarta. 86-87.
[35] Keputusan Bersama Menteri Agama: Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1975 No. 037 /U tahun 1975 dan No. 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Madrasah di pasal 1 bab 1 dan pasal 2 bab II.
[36] Ahmad Ali Riyadi, *Politik Pendidikan: Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional*, Ar-Russ, 2006, Jogjakarta, 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan,[37]yaitu : 1) *Tahap Rekonstruksi,*desentralisasi dihadapkan pada permasalahan pengkondisian otoritas pendidikan, desentralisasi pendidikan, serta perencanaan fasilitas pendidikan, 2) *Tahap Ketenagakerjaan/Penyiapan* SDM, pendidikan dihadapkan pada penyiapan tenaga kerja yang terampil dan cakap (tenaga ahli), 3) *Tahap Perluasan/Pengembangan Pendidikan* meliputi pengembangan kurikulum, metode, pengujian, demokrasi pendidikan, serta adaptasi sistem pendidikan dan ekonomi, 4) *Tahap Inovasi*, berhubungan dengan perencanaan pendidikan dan strategi-strategi pengembangan.

Kalau kita analisis dari permasalahan yang dihadapi madrasah, ada beberapa problem yang sampai sekarang masih menjadi masalah pelik, khususnya madrasah swasta, antara lain :

a. Problem Manajemen

Lemahnya manajemen penyelenggaraan pendidikan berkaitan erat dengan kemampuan managerial para penyelenggara pendidikan yang masih dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang terbatas dan pengaruh budaya pedesaan yang cenderung mengacu pada pola management "*alon-alon asal kelakon*". Dalam pengamatan penulis, ada beberapa problem manajerial yang dihadapi masalah :

Pertama, Bidang Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kependidikan. Masalah yang dihadapi adalah masih adanya tenaga pendidik atau guru yang mengajar kurang sesuai dengan kompetensi

[37] Lebih jelas baca : Philip H. Commbs, *What is Educational Planning*, (Paris United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 1970), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dimilikinya (*miss-match and underqualified*), disamping itu masih banyak pula guru-guru swasta yang mempunyai peran ganda sebagai pengajar di lembaga pendidikan lain, sehingga kurang bisa berperan secara maksimal. Kondisi tenaga kependidikan –terutama profesionalisme guru– masih perlu mendapat perhatian serius karena hal ini juga akan berpengaruh terhadap out put pendidikan yang dihasilkan. Menurut hasil penelitian dari Departemen Agama RI, bahwa semakin nampak persoalan yang dihadapi madrasah adalah tenaga pendidik yang memiliki spesialisasi pendidikan umum. Misalnya guru Biologi dapat mengajar Kimia atau Fisika, ataupun guru IPS dapat mengajar Bahasa Indonesia, bahkan guru Pendidikan Agama Islam mengajar Bahasa Inggris. Banyak diantaranya yang tidak berkualitas dalam menyampaikan materi sehingga mereka kurang mampu menyajikan dan menyelenggarakan pendidikan yang benar-benar berkualitas. Diantara faktor yang menyebabkan kurangnya profesionalisme guru, sehingga pemerintah berupaya agar guru yang tampil di abad pengetahuan adalah guru yang benar-benar profesional yang mampu mengantisipasi tantangan dalam dunia pendidikan.

Kedua, Bidang Kurikulum, permasalahan klasik yang dihadapi pada umumnya adalah ketidakmapanan kurikulum pendidikan. Pergantian kurikulum yang terlalu cepat dan kebelumsiapan tenaga-tenaga kependidikan menjadi faktor penyebab ketidakjelasan arah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

target kurikulum. Divisi lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut relevansi kurikulum pendidikan dengan dunia kerja. Out put yang dihasilkan pendidikan dipertanyakan, apalagi jika dihadapkan pada permasalahan IPTEK.

Ketiga, Bidang Sarana dan Prasarana, keterbatasan finansial merupakan kendala utama bagi upaya pengembangan pendidikan. Terutama adalah berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, baik fisik maupun non-fisik. Seperti terbatasnya fasilitas belajar mengajar, buku-buku teks, alat peraga, ruang praktikum, dan sebagainya. apalagi kalau kita melihaat alokasi anggaran pendidikan di Indonesia masih jauh dari kebutuhan. Lebih tragis lagi kalau kita melihat anggaran pendidikan untuk madrasah yang hanya berasal dari anggaran keagamaan, berbeda dengan sekolah umum di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional, bagaimana mungkin mencukupi kebutuhan-kebutuhan penunjang pendidikan, sementara untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan saja masih ditopang oleh bantuan masyarakat, walaupun sekarang ada Bantuan Operasional Siswa (BOS) yang hanya cukup untuk membiayai operasional pendidikan.

Keempat, masalah *networking* atau pengembangan jaringan sementara ini jaringan yang dikembangkan madrasah kebanyakan masih terbatas pada pelibatan peran masyarakat dalam skala lokal, misalnya yayasan dan wali peserta didik, tetapi masih banyak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

madrasah yang mencoba membuat networking dengan perusahaan atau lembaga-lembaga ekonomi produktif melalaui kerjasama investasi, program, pelatihan dan sebagainya.

b. Problem Konseptual Teoritis dan Operasional Praktis

Perjalanan pendidikan Islam di Indonesia senantiasa dihadapkan pada persoalan yang komplek, mulai dari *konseptual-teoritis* sampai dengan *operasional-praktis*. Hal ini dapat dilihat dari ketertinggalan pendidikan Islam dibandingkan dengan pendidikan umum, sehingga terkesan pendidikan Islam sebagai pendidikan "kelas dua".[38]

Azyumardi Azra mencatat beberapa fenomena yang menyebabkan pendidikan Islam selalu dalam posisi tersingkirkan, antara lain, [39]*pertama,* pendidikan Islam sering terlambat merumuskan diri untuk merespon perubahan dan kecenderungan perkembangan masyarakat, sekarang dan masa datang. *Kedua,* sistem pendidikan Islam kebanyakan masih cenderung mengorientasikan diri pada bidang-bidang humaniora dan ilmu-ilmu sosial ketimbang ilmu-ilmu eksakta semacam fisika, kimia, biologi, dan matematika modern. *Ketiga*, usaha pembaharuan dan peningkatan sistem pendidikan Islam sering bersifat sepotong-sepotong atau tidak komprehensif dan menyeluruh, hanya dilakukan sekenanya atau seingatnya sehingga

[38] Usman Abu Bakar dan Surohim, *Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam, Respon Kreatif terhadap Undang-Undang Sisdiknas*, Yogyakarta, Safira Insania Press, 2005), 80.
[39] Azyumardi Azra, 59-60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak terjadi perubahan secara esensial didalamnya. *Keempat*, sistem pendidikan Islam tetap lebih cenderung berorientasike masa silam ketimbang berorientasi ke masa depan, atau kurang bersifat *futurei-oriented*. *Kelima*, sebagian besar sistem pendidikan Islam belum dikelola secara profesional baik dalam perencanaan, penyiapan tenaga pengajar, kurikulum, maupun pelaksanaan pendidikannya, sehingga kalah bersaing dengan lainnya.

Sedangkan Abdurrahman Mas'ud, menyoroti kelemahan pendidikan Islam secara umum adalah :

(1) dunia pendidikan Islam kini terjangkiti penyakit *simtom dikotomik*, dan masalah *spirit of inquiry*. (2) kurang berkembangnya konsep *humanisme religius* dalam dunia pendidikan Islam, yakni adanya tendensi pendidikan Islam yang lebih berorientasi konsep *Abdullah* daripada *khalifatullah* dan *hablun minallah* daripada *hablun minannas*, (3) adanya orientasi pendidikan yang timpang, sehingga melahirkan masalah-masalah besar dalam dunia pendidikan Islam, dari persoalan filosofis sampai ke metodologis, bahkan sampai ke *the tradition of learning*.[40]

c. Problem Kebijakan dan Politik Pendidikan

Dalam konteks kebijakan pendidikan di Indonesia, madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islamyang telah diakui secara konstitusional memiliki peranan yang sangat strategis dalam

[40]Abdurrahman Mas'ud, *Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik: Humanisme Religius sebagai Paradigma Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan cita-cita pendidikan nasional. Menurut pandangan HAR Tilaar, hal ini disebutkan antara lain : *Pertama*, pendidikan di madrasah yang sementara ini seakan-akan tersisih dari mainstream pendidikan nasional namun berkenaan dengan pendidikan anak bangsa. *Kedua*, madrasah sebagai pendatang baru dalam sistem pendidikan nasional relative menghadapi berbagai masalah dan kendala di dalam hal mutu, manajemen, termasuk masalah kurikulumnya. Namun demikian madrasah mempunyai potensi atau nilai-nilai positif karena madrasah sarat akan nilai-nilai budaya bangsa.[41]

Dalam pandangan H.A.R Tilaar, hal ini disebabkan karena politik pendidikan kolonial yang menimbulkan dampak serius bagi pendidikan Islam termasuk madrasah dalam menghadapi arus modernisasi. Dampak tersebut antara lain :

a. Termarginalisasi dari arus modernisasi dan cenderung kepada sifat ketertutupan dan ortodoksi.
b. Karena sikap yang diskriminatif dan pemerintah kolonial maka pendidikan Islam terdorong menjadi milik rakyat pinggiran/pedesaan.
c. Isi pendidikan Islam cenderung berorientasi pada praktek-praktek ritual keagamaan dan kurang memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi.

[41] H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004),164-165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Mengalami berbagai kelemahan manajemen.[42]

Sebagai lembaga pendidikan yang berciri khas Islam, madrasah merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan otonomi pendidikan yang di selenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat sehingga memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia Indonesia. Pada sisi lain, madarsah memiliki ciri khas yang berbeda dari sekolah umum,[43] dengan populasi madrasah swasta yang hampir timpang sebagaimana grafik perbandingan Madrasah Negeri dan Swasta yang jauh berbeda menjadikan tidak hanya keterbatasan sarana dan prasana akan tetapi terkait dengan kebijakan pun mengalami perbedaan yang cukup signifikan. Menurut data emis kemenag RI tentang jumlah madasah swasta dan negeri di Indonesia.[44]

Perbandingan Madrasah Swasta dan Negeri

Tabel: 2.2

[42] H.A.R. Tilaar, 169-170.
[43] Ki Supriyoko, "Problema Besar Madrasah", dalam *Republika*, 18 Maret 2008.
[44]emispendis.kemenag.go.id/madrasah2015/2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

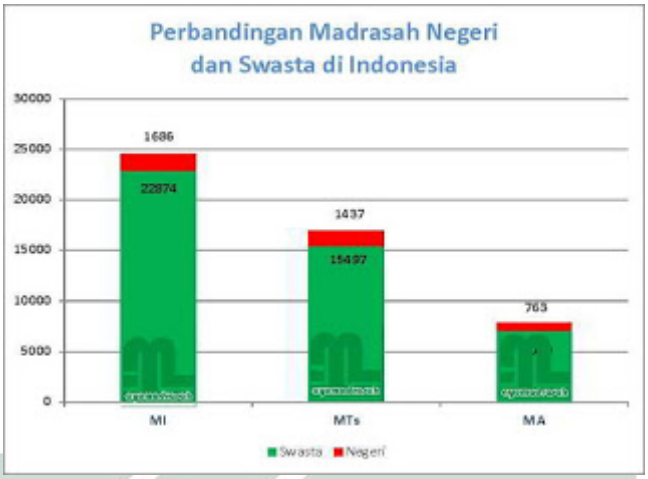

Menguatnya aspirasi bagi otonomisasi atau desentralisasi pendidikan tidak terlepas dari kenyataan adanya kelemahan konseptual dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, khususnya sesama Orde Baru.[45] Diantaranya masalah dan kelemahan yang terjadi dalam konteks ini menurut Azyurmadi Azra, antara lain[46] : *Pertama*, kebijakan pendidikan nasional sangat sentralistik dan serba seragam, yang pada gilirannya mengabaikan keragaman sesuai dengan realitas kondisi ekonomi, budaya masyarakat Indonesia di berbagai daerah. *Kedua,*kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional lebih berorientasi pada pencapaian target-target tertentu, seperti target kurikulum yang pada gilirannya mengabaikan proses pembelajaran yang efekif menjangkau seluruh ranah dan potensi anak didik.

[45] Pada masa Orde Baru, proses pendidikan, kurikulum, metodologi pendidikan, merupakan pengejahwantahan dari sistem kekuasaan yang ada atau merupakan upaya pelestarian kekuasaan Orde Baru pada saat itu. Lihat: H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan; Suatu Tinjauan Dari Perspektif Studi Kultural*, (Magelang: Indonesia Tera, 2003), 145.

[46] Azyurmadi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002). 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian kosekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut dalam penyelenggaraan pendidikan berimplikasi pada bentuk otonomi atau desentralisasi pendidikan.[47] Dalam dunia pendidikan era otonomisasi ini akan mengubah beberapa paradigma pendidikan dari sentralisasi mengarah kepada desentralisasi serta prinsip demokratisasi, keterbukaan, akuntabilitas yang mengarah pada munculnya kebijakan arus bawah.[48]

Di samping itu otonomi daerah akan melahirkan kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah. Perbedaan mutu pendidikan masing-masing daerah sangat ditentukan oleh besarnya perhatian pemerintah daerah pada bidang pendidikan, selain itu juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia serta pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks globalisasi, menurut Suyanto daerah-daerah perlu melakukan perubahan besar di sektor pendidikan yang dikelolanya secara otonomi dalam aspek input, process, product,

[47] Fransisca Kemmerer melihat paling tidak ada empat bentuk desentralisasi pendidikan ; Pertama, *dekonsentrasi* yaitu pengalihan kewenangan ke pengaturan tingkat yang lebih rendah dalam jajaran birokrasi pusat.Kedua, *pendelegasian*, yakni pengalihan kewenangan ke badan quasi pemerintah atau badan yang dikelola secara publik.Ketiga, *devolusi*, yakni pengalihan kewenangan ke unit pemerintah daerah.Keempat, *swastanisasi*, berupa kewenangan ke badan usaha swasta atau perorangan. Lihat: Fransisca Kemmerer, "*Desentralization of Schooling in Developing Nation*", dalam *Ensiclopedia of Education*, (tp),142.

[48] Haidar Putra Dauly, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun outcome agar otonomi daerah tidak membuat sektor pendidikan justru ketinggalan zaman.[49]

Problematika ini juga disinyalir dalam bebrapa persoalan yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia, yaitu : (1) rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan, (2) rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan, (3) lemahnya manajemen pendidikan, (4) belum terwujudnya kemandirian dan keunggulan iptek di kalangan akademis, (5) ketimpangan pemerataan pendidikan antar wilayah geografis.[50]

Dengan pemberlakuan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, madrasah sebagai salah satu bentuk pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat paling tidak memiliki kewenangan yang luas dalam beberapa hal, antara lain : *Pertama*, Penjabaran kurikulum Nasional. *Kedua*, Penetapan kurikulum lokal. *Ketiga*, Pelaksanaan proses belajar. *Keempat*, Penentuan tenaga pengajar dan kepala sekolah. *Kelima*, Pelaksanaan evaluasi belajar.[51]

Secara yuridis, madrasah telah diakui sebagai sub sistem pendidikan nasional sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang

---

[49] Suyanto, "Persoalan Pendidikan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah" dalam Edy Suandi Hamid dan Sobirin Malian (Ed), *Memperkokoh Otonomi Daerah: Kebijakan, Evaluasi, dan Saran*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 241.

[50] Muchsin, *Politik Hukum Dalam Pendidikan Nasional*, (Surabaya: Pascasarjana UNSURI, 2007), 53.

[51] *Kebijakan Strategi Ditjen Kelembagaan Agama Islam Tahun 2003-2005*, (Jakarta, Ditjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2003), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sisdiknas No. 20 Tahun 2003,[52] namun demikian posisi ini menimbulkan beberapa konsekuensi antara lain adalah dimulainya suati pola pembinaan yang mengikuti satu ukuran yang mengacu kepada sekolah-sekolah pemerintah.[53] Padahal secara struktural madrasah sebagai sekolah yang bercirikan khas agama Islam berada di bawah naungan Departemen Agama. Dengan demikian terjadi dualisme dalam pembinaan pendidikan antara sekolah (madrasah) yang berada di bawah Departemen Agama dengan sekolah yang berada dibawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dualisme ini berimplikasi pada munculnya kebijakan-kebijakan yang kurang menguntungkan sekolah-sekolah yang berada di bawah Departemen Agama.

Menurut Undang-Undang Pemerintah daerah No. 32 Tahun 2004 pasal 10 ayat 3 huruf (f) tentang pembagian urusan pemerintah, urusan agama termasuk salah satu urusan pemerintahan yang tidak didesentralisasikan atau diotonomkan ke daerah. Hal ini menimbulkan multi interpretasi terhadap kedudukan Pendidikan Agama dalam hal ini madrasah.[54] Di lapangan seringkali terjadi lempar tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah berdalih bahwa madrasah tidak menjadi bagian tugasnya karena belum

[52]Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 17 ayat 2 dan pasal 18 ayat 3.
[53] H.A.R. Tilaar, 170.
[54] Ki Supriyoko, "Hakikat Politik Pendidikan Nasional" dalam Ali Muhdi Amnur (Ed.), *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional*, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diotonomikan, sedangkan pemerintah pusat mengira jika kebutuhan madrasah juga telah dicukupi oleh daerah sebagaimana mengurus pendidikan di daerah pada umunya, akhirnya nasib madrasah bertambah sengsara tidak ditopang oleh kedua-duanya, baik pusat maupun daerah.[55]

Posisi madrasah selama ini seringkali diperlakukan kurang adil, pada satu sisi madrasah dituntut menghasilkan lulusan yang sama dengan sekolah umum akan tetapi kurang memperoleh dukungan finansial yang memadai, lebih-lebih lagi bagi madrasah swasta[56] yang pada umunya sebagai penyangga finansial kehidupan madrasah adalah wali peserta didik.

Dari segi anggaran, perolehan anggaran untuk operasional pendidikan terdapat perbedaan antara lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungan Departemen Agama dengan sekolah-sekolah di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai akibat perbedaan anggaran tersebut maka terjadi pula perbedaan dalam pengadaan sarana fisik serta kegiatan pendidikan yang bersifat non fisik lainnya. Masalah lain yang muncul adalah kekurangan tenaga pengajar khususnya guru-guru yang sesuai dengan bidang studi keahlian dan problem-problem lain yang tidak sedikit.

---

[55]Imam Suprayogo, *Qun Vadis Madrasah; Gagasan, Aksi & Solusi Pembangunan Madrasah*, (Yogyakarta, Hikayat Publishing, 2007), 78-79.
[56] Imam Suprayogo, 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seharusnya pemerintah bersikap adil, demokratis dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia tanpa harus mendiskriminasikan antara lembaga pendidikan yang berada dalam pengelolaan Departemen Agama maupun yang berada dalam pengelolaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar kebijakan otonomi daerah, karena madrasah juga memiliki kontribusi yang cukup besar dalam mencerdaskan anak bangsa.

Salah satu "kekeliruan" kebijakan pendidikan yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap rendahnya kinerja pendidikan (*educational performance*) Indonesia adalah kurang diperhitungkannya madrasah dalam sistem pendidikan nasional. [57] Kalau kita berbicara mengenai peningkatan mutu pendidikan dan masalah-masalah kependidikan lainnya seolah-olah semuanya ditentukan oleh sekolah.

2. **Madrasah Diniyah**

Madrasah Diniyah adalah salah satu jenis pendidikan non-formal atau jalur luar sekolah yang diadakan di pondok pesantren.Madrasah tipe ini biasanya mengkhususkan diri pada pengajaran agama Islam dan ditangani oleh para ustad sesuai dengan bidang kajiannya.Biasanya, madrasah diniyah dijadikan sebagai sekolah pendamping untuk menambah pengetahuan agama bagi madrasah dan sekolah umum.Siswa yang belajar

[57] Ki Supriyoko, Problem Besar ....."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada jenis madrasah ini biasanya adalah siswa sekolah atau madrasah biasa yang pagi hari menghadiri kelas madrasah atau sekolah umum, dan di sore hari menghadiri kelas Madrasah Diniyah. Ada beberapa hal yang harus dipahami tentang perjalanan Madrasah diniyah ini, diantaranya:

1. **Eksistensi Madrasah Diniyah**

Secara historis, ada kemiripan Madrasah Diniyah dengan pondok pesantren.Setiap Madrasah Diniyah ciri khas masing-masing.Sistem penyelenggaraannya pun berbeda, sesuai dengan kreasi pengasuh atau pemiliknya.Sebagian bahkan tidak hanya mengkhususkan diri pada pengajaran agama Islam, tetapi dengan menambah pelajaran umum lainnya seperti ilmu-ilmu umum selain bahasa Arab.Dalam perkembangan selanjutnya, Madrasah Diniyah yang berkonsentrasi pada ilmu-ilmu Agama tetap disebut Madrasah Diniyah.Namun, diantaranya juga ada yang masih tetap mengajarkan kedua jenis ilmu tersebut dengan komposisi 30% pelajaran umum dan 70% pelajaran agama.Sebagai kebalikan dari madrasah biasa yang menawarkan 70% pelajaran umum dan 30% agama.[58]Keberagaman muatan dan ciri khas diniyah ini mengakibatkan alumninya tidak dianggap sederajat secara kualitas dengan alumni madrasah atau sekolah dasar.

Lembaga Madrasah Diniyah biasanya dikelolah pondok pesantren atau bisa juga didapati di tengah masyarakat di luar pondok

[58] Data Kurikulum Kemenag Pasuruan 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pesantren, tapi dikoordinasikan dengan pesantren terdekat.Akan tetapi, ada juga yang dikelolah oleh masyarakat atau perorangan tanpa melibatkan pesantren.

Proses pembelajaran yang diterapkan Madrasah Diniyah biasanya melaksanakan pendidikan secara klasikal dan berjenjang yang terbagi dalam tiga jenjang pendidikan. *Pertama,* Madrasah Diniyah Awaliyah, yaitu Madrasah Diniyah tingkat permulaan dengan masa belajar 4 tahun. *Kedua,* Madrasah Diniyah Wustha atau Madrasah Diniyah tingkat menengah pertama dengan masa belajar 2 tahun.*Ketiga,* Madrasah Diniyah Ulya, yaitu Madrasah Diniyah tingkat menengah atas dengan masa belajar 2 tahun.[59]

Bentuk lain sebagai wujud pembinaan Madrasah Diniyah dapat dicermati dari pemberlakuan kurikulum secara seragam yang diatur berdasarkan Peraturan Menag No. 3 Tahun 1983 tentang Kurikulum Madrasah Diniyah. Disebutkan beberapa mata pelajaran yang diajarkan di Madrasah Diniyah, di antaranya: Al-Quran, Hadits, terjemah, tajwid, akidah/akhlak, ibadah syariat, tarikh Islam, bahasa Arab, praktik ibadah, dan sejarah kebudayaan Islam.[60]

Pembinaan pemerintah pada Madrasah Diniyah difokuskan pada peningkatan mutu kualitas dengan memberikan bantuan berupa sarana prasarana untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar. Begitu pula pembinaan dilakukan dengan meningkatkan

[59] Ditjen Binbagais, *Informasi,* 80-81.
[60] Lihat Kepmenag RI No. 3 Tahun 1983 tentang Kurikulum Madrasah Diniyah pada bab II.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kualitas sumber daya manusia yang ada di Madrasah Diniyah. Berikut berbagai upaya yang dilakukan pemerintah: pemberian bantuan finansial untuk peningkatan sarana dan prasarana fisik; penyusunan naskah buku bahasa Arab; pengadaan buku pelajaran Madrasah Diniyah; pelatihan dan pembinaan kepala Madrasah Diniyah, dan pendataan Madrasah Diniyah.[61]

Pemerintah juga melakukan pembinaan pengembangan potensi santri dengan memberikan bantuan keterampilan, dengan maksud memberikan bekal pengetahuan keterampilan praktis pada santri. Tujuannya adalah agar santri yang terjun ke masyarakat dapat hidup di tengah-tengah masyarakat secara wajar dan dapat menyumbangkan partisipasinya dalam membangun masyarakat di lingkungan di mana ia berada. Berbagai program keterampilan yang biasa diberikan di antaranya adalah perbengkelan, pertanian, dan pertukangan.

2. Madrasah Diniyah dalam Kacamata Pemerintah

Keberadaan Madrasah Diniyah dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikelompokkan dalam model pedidikan jalur luar sekolah. Lembaga ini muncul dari masyarakat yang keberadaannya hanya untuk mempelajari ilmu-ilmu agama saja, tanpa memasukkan pelajaran ilmu-ilmu umum yang diajarkan di sekolah umum, dan biasanya lembaga ini tidak

[61]Laporan Tahunan Ditjen Binbaga Agama Islam tahun 1999/2000, 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai kurikulum yang baku. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi model dan variasi yang berbeda-beda antara lembaga madrasah yang satu dengan yang lainnya.

Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan satuan pendidikan lembaga pendidikan madrasah, dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis:

a. Madrasah Diniyah wajib. Model ini mengindikasikan adanya Madrasah Diniyah yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari sekolah umum atau madrasah. Siswa sekolah umum yang bersangkutan wajib menjadi siswa Madrasah Diniyah. Model lembaga ini disebut juga Madrasah Diniyah komplemen, karena sifatnya komplementatif dari sekolah umum.
b. Madrasah Diniyah murni. Model lembaga ini mengindikasikan Madrasah Diniyah yang siswanya hanya mampu menempuh pendidikan di Madrasah Diniyah independen, karena bebas dari siswa yang merangkap di sekolah umum ataupun madrasah.[62]

Berbeda dengan pembelajaran di sekolah dan madrasah yang sudah baku, yaitu enam tahun tingkat SD/MI, tiga tahun untuk tingkat SMP/MTs, dan tiga tahun untuk tingkat SLTA/MA, maka masa pembelajaran di Madrasah Diniyah sangat bervariasi. Lembaga ini juga mengenal perjenjangan dan waktunya tidak ditentukan secara baku. Ada yang menyelenggarakan tahapan waktu seperti di madrasah

[62] Departemen Agama RI, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah: Pertumbuhan dan Perkembangannya* (Jakarta: Depag RI Direjen Kelembagaan Agama Islam, 2003), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau sekolah, yaitu tiga dan tiga tahun, ada juga yang menyelenggarakan dengan tahapan waktu dua dan dua tahun.Pola dua dan dua ini yang paling banyak digunakan.

Sebagaimana berlaku pada semua satuan pendidikan siswa atau santri yang telah selesai atau dianggap cukup menerima pendidikan, kepada siswa yang sudah tamat diberikan ijazah atau surat tanda tamat belajar. Ijazah ini merupakan lembaran yang menunjukkan bukti bahwa seseorang telah selesai melakukan pandidikan di suatu perguruan untuk masa pembelajaran tertentu. Bentuk dan isi ijazah serta surat tanda tamat belajar ini juga bervariasi, karena tidak ada pembakuan dari pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa alumni (lulusan) lemabaga Madrasah Diniyah tidak diakui oleh pemerintah dan otomatis lulusannya tidak dapat menggunakan lembaran ijazah Madrasah Diniyah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan formal model pemerintah.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Keberadaan Madrasah Diniyah diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

a. Pendidikan diniyah formal. Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kurikulum pendidikan diniyah menengah formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, serta seni dan budaya.

b. Pendidikan diniyah nonformal. Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al Qur'an, Diniyah Takmiliyah, atau bentuk lain yang sejenis.

3. **Pesantren**

Ada banyak pengertian saat menyebut tentang pesantren sebagai lembaga pendidikan non formal. Misalkan, *pondok* atau *pondok pesantren* (Jawa), *Surau* (Minangkabau Sumatera Barat), dan *dajab* (Aceh). Biasanya pondok pesantren didirikan dan dipimpin oleh *kiai* atau *buya* (Sumatera Barat) atau *tuan guru* (Lombok), *ajengan* (Sunda) dan *bendoro* (Madura).[63] Kiai atau apa pun namanya merupakan figur sentral dan ruh bagi sebuah pesantren. Kegiatan-kegiatan pengajian ditangani oleh kiai secara langsung yang dibantu oleh *badal* kiai (asisten), *ustad* atau *ustadah*[64] yang tugas utamanya adalah menanamkan disiplin, ketekunan, dan memupuk kapasitas intelektual para santri sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.[65]

[63] Ali Riyadi, Politik Pendidikan: Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2006), 183.
[64] Ali Riyadi, 183.
[65] Abdurrahman Wahid, Bunga Rampai Pesantren, (Jakarta: CV.Dharma Bhakti, tt.), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang yang menuntut ilmu di pondok pesantren disebut santri.[66] Secara umum, santri adalah mereka yang belajar di pondok pesantren untuk mendalami ilmu-ilmu keagamaan. Biasanya santri bertempat tinggal di asrama yang disediakan di dalam pondok pesantren.[67] Namun demikian, tidak semua santri tinggal di dalam pondok. Santri yang kebetulan bertempat tinggal di sekitar lingkungan pondok pesantren, biasanya tidak menetap di dalam pondok, tetapi secara teratur mengikuti semua aktivitas belajar pondok pesantren. Selain itu, ada kelompok santri yang datang dan belajar di pondok pesantren pada saat tertentu. Ada juga seorang santri yang belajar hanya di waktu malam hari saja dan pada siang harinya mengerjakan aktivitas lain.

Mempertimbangkan kondisi di atas, santri secara garis besar dibagi menjadi tiga kelompok. *Pertama*, santri murni atau biasa disebut santri *muqim*, yaitu santri yang belajar dan tinggal di dalam pondok pesantren. *Kedua*, santri tidak murni, yaitu santri yang tidak tinggal di dalam pondok pesantren tetapi secara reguler turut serta dalam setiap kegiatan belajar di

[66]Sebagaimana Ali Riyadi membedakan antara orang yang belajar di pendidikan formal dan pendidikan non formal.Bagi mereka yang belajar di pendidikan formal (SD-SLTA) dinamakan siswa/peserta didik/anak didik.Sementara mereka yang belajar di pendidikan pesantren dinamakan santri, oleh karena, santri disamping belajar disitu, mereka juga mondok alias menginap dengan durasi waktu yang tidak tertentu.

[67] Menurut Cak Nur, asal-usul kata santri ada dua pendapat yang bisa dijadikan acuan. *Pertama*, pendapat yang menyatakan bahwa santri berasal dari perkataan sastri, sebuah kata dari bahasa Sansekerta, yang artinya melek huruf.Menjadi santri diartikan orang yang tahu agama.*Kedua*, pendapat yang mengatakan bahwa perkataan santri sebenarnya berasala dari kata Jawa, persisnya dari kata cantrik, yang artinya orang yang selalu mengikuti seorang guru kemana guru itu menetap.Yang asal-usulnya berasal dari hubungan seorang antara guru-cantrik pada zaman Hindu yang kemudian diteruskan pada masa Islam menjadi guru-santri. Lebih lengkapnya Nurcholish Madjid , *Bilik-Bilik Pesantren*, 19-20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pondok. Meskipun demikian, keduanya ini diperkenankan mengikuti kegiatan belajar formal di dalam atau di luar pondok pesantren. *Ketiga* santri musiman, yakni santri yang datang ke pesantren pada saat-saat tertentu atau dalam jangka waktu tertentu.[68]

Pada perkembangannya, pondok pesantren di Indonesia merupakan lembaga pendidikan Islam yang khas yang tidak dimiliki oleh pendidikan Islam di lain tempat, semisal Malaysia, Brunei Darussalam, bahkan negara Timur Tengah sekalipun. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang mengalami perkembangan yang dinamis. Kedinamisannya ini dapat dicermati dan perkembangan pola pondok pesantren yang diawali dari pola tradisional sampai pola yang paling modern.

Dalam pola ini, Manfred Ziemek, berdasarkan penelitiannya, mencatat beberapa ciri dan pola pesantren.[69]*Pertama,* pesantren tipe A, yang terdiri dari masjid dan rumah kiai. Pesantren ini merupakan yang paling sederhana. Masjid digunakan sebagai tempat pengajian agama. Jenis ini khas bagi pesantren kaum sufi dengan pengajian-pengajian yang teratur dalam masjid dengan pengajaran pribadi oleh anggota pengajian. Akan tetapi, santri tidak tinggal di pesantren. Pesantren ini merupakan tingkat awal pesantren. Santri biasanya tinggal di rumah kiai.

[68] Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Study tentang Pandangan Hidup Kiai (Jakarta: LP3ES, 28.
[69] Manfred Ziemek, Peantren dalam Perubahan Sosial (Jakarta: P3M, 1986), 104-107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, pesantren tipe B, yaitu pesantren yang terdiri dari rumah kiai, masjid, dan pondok. Pesantren ini dilengkapi dengan pondok yang terpisah dari rumah kiai yang digunakan sebagai asrama santri sekaligus menjadi ruangan untuk tinggal dan tempat belajar yang sederhana.

*Ketiga,*pesantren tipe C, yaitu pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kiai, pondok, dan madrasah. Jenis ini biasannya merupakan komponen klasik yang diperluas dengan suatu madrasah, yang menunjukkan adanya upaya pembaruan pembelajaran. Madrasah dengan tingkatan struktur kelas tidak hanya memberikan pelajaran keagamaan, tapi juga kurikulum yang berorientasi pada sekolah-sekolah umum. Santri yang belajar dan tinggal di sekitar pondok pesantren maupun yang tinggal di pondok pesantren belajar di madrasah sebagai alternatif di samping sekolah ataupun belajar di kedua lembaga tersebut.

Keempat, pesantren tipe D. Pesantren tipe ini terdiri dari masjid, rumah kiai, pondok, madrasah, dan tempat keterampilan pesantren ini di samping tetap mempertahankan komponen klasik dengan sekolah formal, juga memiliki program tambahan. Program tambahan ini berupa pendidikan keterampilan dan terapan bagi siswa dan pemuda lingkungan sekitarnya. Misalnya di sektor pertanian, kerajinan rakyat, koperasi, perbengkelan, menjahit, dan lain sebagainya.

Kelima, pesantren tipe E. Pesantren ini terdiri dari masjid, rumah kiai, pondok, madrasah, tempat keterampilan, universitas, gedung pertemuan, tempat olahraga, sekolah-sekolah umum. Dalam pola kelima

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini, pesantren lebih banyak perkembangannya sehingga dapat disebut sebagai pesantren modern. Pada jenis pesantren modern ini, di samping sektor pendidikan keislaman klasik, juga mencakup semua tingkat sekolah formal dan sekolah dasar hingga universitas. Usaha-usaha keterampilan memiliki fungsi pendidikan di samping fungsi pendapatan. Program-program pendidikan yang berorientasi lingkungan mendapatkan prioritas utama, dengan cara pesantren mengambil prakarsa dan mengarahkan kelompok-kelompok swadaya di lingkungannya untuk melakukan program pendidikan tersebut. Pesantren ini biasanya mempunyai cabang di berbagai tempat, sehingga sering kali ada komunikasi antara pesantren induk dan pesantren cabang yang didirikan oleh alumni pesantren induk.

Sedangkan Departemen Agama mengelompokkan pesantren ke dalam tiga tipologi, yakni: salafiyah, khalafiyah, dan perpaduan antara keduanya. Tipologi tersebut hanyalah berdasarkan pada generalisasi yang bersifat dikotomik, yang tentunya tidak melihat aspek historisitas berupa akulturasi budaya yang selalu berubah. Hemat saya, tipologi tersebut tampaknya perlu dirombak ulang karena beberapa alasan: *Pertama*, pesantren muncul dari budaya setempat sehingga dalam perkembangannya pesantren selalu dinamis mengikuti perkembangan zaman. *Kedua,*ciri khas pesantren sangat menonjolkan sifat aspiratif. Dengan corak ini, tentunya pesantren selalu berkembang. Walaupun sebenarnya masih ada pesantren yang mampertahankan identitas konservatifnya, namun pelan tapi pasti pesantren tipe ini akan ditinggalkan masyarakat. Akan tetapi, seiring

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kemajuan zaman, pesantren mengalami pergeseran sehingga pada zaman modern sebenarnya sangat sulit membedakan antara satu tipologi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena pengaruuh akulturasi budaya pesantren dengan budaya lokal yang selalu berubah.

Pertama, pesantren *salafiyah* (tradisional) adalah pesantren yang mempertahankan pengajaran kitab-kitab Islam klasik sebagai inti pendidikannya. Sedangkan sistem madrasah ditetapkan hanya untuk memudahkan sistem *sorogan* yang dipakai dalam lembaga-lembaga pengajian bentuk lama, tanpa memperkenalkan pengajaran pengetahuan umum.[70]

Sistem pengajaran pesantren salaf memang awalnya lebih sering menerapkan model *sorogan* atau *weton*. Istilah *weton* berasal dari bahasa Jawa yag berarti waktu. Disebut demikian, karena pengajian model ini dilakukan pada waktu tertentu. Sistem *weton* atau yang lebih terkenal dengan istilah *bandongan* adalah model pengajian yang dilakukan seperti kuliah terbuka yang diikuti oleh sekelompok santri. Kiai membaca, menerjemahkan, menerangkan, dan sekaligus mengulas kitab-kitab salaf berbahasa Arab yang menjadi acuannya. Sedangkan para santri mendengarkan dan memperhatikan kitabnya sambil menulis arti dan keterangan tentang kata-kata atau pemikiran yang sukar. Termasuk dalam sistem *bandongan* adalah *halaqah*, yaitu model pangajian yang umumnya

[70] Departemen Agama RI, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah* (Jakarta: Direktorat Jederal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Direktorat Pembinaan Perguruan Agama Islam, 1998), 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan dengan cara mengitari gurunya. Para santri duduk mendiskusikan suatu masalah tertentu di bawah bimbingan seorang guru. Sedangkan pada sistem *sorogan*, para santri maju satu per satu untuk membaca dan menguraikan isi kitab di hadapan seorang guru atau kiai. Sistem ini amat bagus untuk mempercepat sekaligus mengevaluasi penguasaan santri terhadap kandungan kitab yang dikaji. Akan tetapi, sistem ini membutuhkan kedisiplinan yang tinggi dari seorang santri. Model ini biasanya diberikan kepada santri pemula yang masih membutuhkan bimbingan khusus yang intensif.

Selain dua sistem tersebut, pesantren salaf juga kerap mengunakan model musyawarah. Biasanya materi telah ditentukan lebih dulu oleh kiai dan para santri dituntut menguasai kitab-kitab rujukan. Kiai memimpin musyawarah sebagaimana sistem moderator. Model ini bersifat lebih dialogis, sehingga umumnya hanya diikuti oleh para santri senior. Tujuannya untuk melatih dan menguji kemampuan dan keterampilan para santri dalam menangkap dan memahami sumber-sumber argumentasi dari kitab-kitab klasik. Para santri mengikuti dengan cermat terjemahan kiai itu dan mencatatnya. Kegiatan mencatat terjemahan ini dinamakan *maknani* (memberi arti) dan *ngesahi* (mengesahkan atau mengesahkan pengertian berikut pembacaan kalimat Arab yang bersangkutan menurut gramatikalnya). Kadang-kadang disebut pula *jenggoti* (memberi jenggot), disebut demikian karena catatan mereka itu menggantung seperti janggut pada kata-kata yang diterjemahkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi, dewasa ini, sejalan dengan kemajuan zaman, ada sebagian pesantren salaf mulai menerapkan sistem madrasah atau model klasikal. Kelas-kelas dibentuk secara berjenjang dengan tetap memakai kurikulum dan materi pelajaran dari kitab-kitab kuning, yang dilengkapi dengan keterampilan-keterampilan seperti menjahit, mengetik, dan bertukang. Bahkan pondok pesantren salaf juga menyelenggarakan pendidikan jalur sekolah, seperti MI, MTs, dan MA, bahkan perguruan tinggi. Dari sini dapat dipahami adanya pergeseran perubahan orientasi dan idealisme pesantren salaf.[71]

Kedua, pesantren khalaf (modern). Yakni lembaga pesantren yang memasukkan pelajaran umum dalam kurikulum yang bersifat madrasati. Dalam pesantren ini, proses belajar mengajarnya sudah menggunakan sistem klasikal (berjenjang), memiliki kurikulum tetap, dan ada batasan umur dan batasan waktu. Khalafiyah di sini kurikulumnya ada yang berfiliasi ke Departemen Agama dengan menyelenggarakan madrasah dan Depdikbud dengan menyelenggarakan sekolah umum, atau dengan menciptakan kurikulum sendiri sesuai dengan visi dan misi kiai. Bahkan kadang-kadang pesantren ini memberikan keterampilan kerja.[72]

Ada lagi pesantren yang muncul sebagai respons atas kebutuhan masyarakat yang sifatnya temporer dan gagasannya justru bukan dari

[71] Departemen Agama menyebutnya dengan pondok pesantren salafiyah plus, yakni pondok pesantren yang menyelenggarakan pengajian kitab di satu sisi dan meyelenggarakan pendidikan jalur sekolah di sisi lain. Lihat Departemen Agama RI, *Pondok Pesantren*,6.
[72] Departemen Agama RI ,88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalangan kiai. Misalkan pesantren kilat. Pesantren ini terbentuk semacam training dalam waktu relatif singkat yang biasanya dilaksanakan pada waktu libur sekolah. Aspek-aspek yang ditekankan dalam pesantren ini adalah keterampilan ibadah. Ada lagi pesantren terintegrasi, yaitu pesantren yang lebih menekankan pada pendidikan vokasional atau kejuruan sebagaimana pada balai latihan kerja Departemen Tenaga Kerja dengan program yang terintegrasi dengan inti latihan kepesantrenan. Santrinya kebanyakan berasal dari mereka yang putus sekolah atau para pencari kerja.[73]

Ciri khas lain di samping pola dan corak pendidikan pesantren yang tidak ada di lembaga lain adalah buku mata pelajarannya ditekstualkan pada kitab-kitab salaf yang lebih populer dengan sebutan kitab kuning. Disebut kitab kuning karena memang kitab-kitab yang dipelajari dicetak di atas kertas berwarna kuning, walaupun sekarang sudah banyak dicetak ulang pada kertas putih.[74] Di antara berbagai macam jenis kitab yang sering dipelajari di pesantren adalah: ilmu-ilmu tafsir, *ulum al-tafsir, asbab al-nuzul, ulum al-hadits, asbab al-wurud, fiqh, qawa'id al-fiqhiyyah, tahuid, tasawuf, nahwu, sharaf,* dan *balaghah.*

Ciri kitab kuning tersebut tidak menggunakan tanda baca yang lazim. Tidak peduli titik, tanda koma, tanda seru, tanda tanya, dan lain sebagainya. Ciri inilah yang memerlukan kecermatan dan keterampilan

[73] Khozin, *Jejak-Jejak Pendidikan Islam di Indonesia* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001), 66.
[74] Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LkiS, 1994), 263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar pembaca memahami bentuk makna dan kandungannya, bahkan dapat menginterprestasikan dan menganotasikannya secara luas.[75]

Proses mengajarkan kitab kuning di pesantren itu melalui dua tahap. Tahap pertama menggunakan metode *utawi iki iku*, dengan rumus*mim* dan *kha*, dan seterusnya, untuk menguraikan arti tiap kalimat dan huruf-huruf yang bermakna sekaligus juga menguraikan kedudukan *tarkib* dari sudut kaidah *nahwu* dan *sharaf*nya. Selanjutnya memberi penjelasan dan ulasan dari sisi kadungannya secara tekstual-harfiyah maupun dengan pengertian-pengertian di baliknya (*mafhum*). Sedangkan tahap kedua merupakan penjabaran tuntas secara analisis dari yang bersifat *manthuqat* sampai yang *mafhumat*. Bahkan sering juga pada tahap kedua ini, para kiai pembaca kitab kuning merespons dengan alasan-alasan yang memperkuat ungkapan itu sendiri, atau kadang-kadang menentang atau meluruskan yang dipandang tidaj benar sebagaimana lazimnya dilakukan oleh ahli-ahli *syarh* dan *husyiyah*[76]. Kelebihan dari sistem itu, santri dapat mengetahui seluk-beluk susunan gramatikal bahasa Arab secara detail.

Deskripsi singkat tersebut, sebagaimana ditunjukkan dalam bentuk-bentuk tipe pesantren, sedikit banyak telah menunjukkan bagaimana respons pesantren dalam menghadapi berbagai perubahan di sekelilingnya. Dalam menghadapi semua perubahan dan tantangan itu, para eksponen pesantren bukannya melepaskan begitu saja dan mentransformasikan

[75] Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia,* (Jakarta: Kencana PG, 2014), 25
[76] Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*…,266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepenuhnya kelembagaan pesantren menjadi lembaga pendidikan modern Islam, akan tetapi cenderung memertahankan kebijakan lembaganya secara hati-hati, mereka menerima pembaruan pendidikan Islam hanya dalam skala terbatas, yakni sebatas mampu menjamin pesantren untuk tetap eksis.

D. Otonomi Pendidikan dalam Konteks Reformasi Pendidikan di Indonesia

Ide otonomi daerah di indonesia identik dengan konsep desetralisasi yang sebenarnya sudah cukup lama dimulai, yakni sejak tahun 1973, tepatnya sejak ditetapkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1973 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Otonomi dan Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pemerintahan yang membagi tugas antara pusat dan daerah.[77] Langkah ke arah desentralisasi di lanjutkan beberapa tahun berikutnya melalui Peraturan Pemerintah NO. 43 Tahun 1992 dan diperkuat lagi melalui Peraturan Pemerintah NO. 8 Tahun 1995. Sejak Peraturan Pemerintah tersebut diberlakukan, uji coba desentralisasi yang hasilnya memberikan kekuasaan Daerah Tingkat II ternyata tidak berjalan lancar, sebab daerah belum siap melaksanakan dan mendukung pengelolaan program pengembangan secara independen.

Upaya ke arah pelaksanaan desentralisasi semakin gencar dengan maraknya tuntutan terhadap reformasi total atas penyelenggaraan pemerintahan Orde Baru oleh kekuatan rakyat yang menginginkan adanya

[77]Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan dlam Konteks Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Adicita, 2001), 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perubahan. Puncaknya pada tahun 1999 telah ditetapkan dua perundang-undangan, yaitu UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang selanjutnya disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 yang mengatur kewenangan pemerintah dan provinsi sebagai daerah otonom.[78]

Sebagai suatu keputusan politis, desentralisasi berarti pemberian wewenang dari pemilik wewenang kepada pelaksana penguasa di bawahnya. Desentralisasi juga mengisyaratkan terjadinya perubahan kewenangan dalam pemerintahan. *Pertama,* perubahan berkaitan dengan urusan yang tidak diatur oleh pemerintah pusat yang secara otomatis menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Para pengelolah dan pengambil kebijaksanaan pendidikan di daerah dituntut untuk menyadari bahwa keberadaan pendidikan merupakan tanggung jawab yang harus diemban dengan baik. Dalam kerangka ini pemerintah daerah harus berupaya agar pendidikan yang selama ini kurang diperhatikan secara proposional di bandingkan dengan sektor politik, ekonomi, dan teknologi oleh pemerintah pusat, harus diposisikan secara strategis sebagai dasar pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.

*Kedua,*perubahan berkenaan dengan desentralisasi pengelolaan pendidikan. Dalam hal ini, desentralisasi menunjukkan adanya pelimpahan wewenang dalam pengelolaan pendidikan dari pemerintah pusat ke daerah

[78]Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, *Reformasi* …., 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

otonom, yang menempatkan daerah kabupaten kota sebagai sentra desentralisasi. Pergeseran kewenangan ini berkaitan erat dengan kosentrasi pengambilan kebijakan yang diberikan kepada struktur lebih bawah dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berkenaan dengan pendidikan. Desentralisasi pendidikan juga mengandung arti adanya pelimpahan kewenangan pemerintah kepada masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan untuk ikut serta bertanggung jawab dalam memajukan pendidikan.

Oleh karena itu, kata kunci dalam mengembangkan pendidikan Islam masa depan adalah pengembangan pendidikan yang menggunakan pradigma kerakyatan, lawan kata dari keumatan. Dengan kerangka kerakyatan, penyelenggaraan pendidikan akan didasarkan pada apa yang dibutuhkan rakyat. Sedangkan bila kerangka yang digunakan adalah keumatan, penyelenggaraan pendidikan hanya akan didasarkan pada kondisi umat yang berbeda-beda.

Dalam konteks pendidikan nasional, pengertian kata basis (*based*) dapat merujuk pada derjat kepemilikan rakyat. Secara gamblang, bila sesuatu dikatakan berbasis kerakyatan, berarti hal itu sepenuhnya menjadi milik rakyat. Kepemilikan menampilkan adanya pengedalian secara penuh terhadap pemgambilan keputusan. Kepemilikan penuh berarti rakyat memutuskan tujuan dan sasaran, pembiayaan, standar, guru, dan kualifikasnya, persyaratan siswa, dan lain sebagainya.[79] Ringkasnya, perlu adanya basis pengaihan dari

[79] Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan…..*,176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

otoritas kemasyarakatan. Akan tetapi, karena pendidikan nasional kita sudah terlanjur mapan dan bersifat *status quo*, perombakan itu tidak mungkin dilaksanakan secara revolusi, sehingga perlu menempuh cara evolusi pembinaan pendidikan nasional.

Pendidikan berbasis kerakyatan merupakan program pengembangan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Tipe pengeloalaan pendidikan seperti ini merupakan pengejawantahan kebijakan otonomi penyelenggaraan pendidikan di mana partisipasi masyarakat dalam pendidikan dimotivasi secara maksimal. Hal ini merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks seperti ini, pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dan motivator, bukan aktor dan bukan sebagai penentu kebijakan arah pendidikan.

Misi utama pemberian otonomi pendidikan kepada masyarakat adalah membangun perangkat infrastruktur sistem pendidikan yang memihak kepada pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan restrukturisasi pendidikan dan rekapitulasi pendidikan. Akibat logis pemberian otonomi pendidikan ini adalah dijalankannya kebijakan desentralisasi pendidikan.

Konsep desentralisasi di sini dipahami sebagai pengalihan tanggung jawab atas perencanaan, manajemen, penggalian, dan alokasi sumber daya dari pemerintah pusat dan perwakilannya kepada: (a) Unit-unit pelaksana lapangan pemerintah pusat pada tingkatan otoritas pendidikan dan perwakilannya di tingkat sekolah. (b) Unit-unit dibawah pemerintah. (c) Otoritas publik dan korporasi-korporasi yang bersifat semi otonom. (d)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Otoritas regional dan fungsional yang lebih luas, dan (e) Lembaga swadaya masyarakat.[80] Lingkup tanggung jawab kebijakan dalam pembuatan kebijakan yang diberikan pemerintah pusat dapat bervariasi, mulai dari yang paling sederhana, seperti penyesuaian beban kerja dalam bingkai organisasi pemerintah pusat, sampai ke pengambilalihan semua tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan serangkaian kegiatan yang dianggap bermanfaat bagi sektor publik.

Dalam pelaksanaannya, yakni dekonsentrasi, delegasi, devolusi, dan privatisasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian kewenangan atau tanggung jawab administrative ke tingkat yang lebih rendah di bawah departemen dan perwakilan pemerintah pusat serta pengalihan beban kerja dari pejabat pusat ke staf atau kantor di luar ibukota atau pemerintah pusat. Konsep ini memberi wewenang kepada perwakilan pelaksana unit lapangan untuk menyusun rencana dan melaksanakan program proyek atau menyesuaikan proyek pemerintah pusat dengan kondisi lokal sesuai dengan garis pedoman yang dirumuskan departemen atau kantor perwakilan pusat.[81]

Delegasi adalah memindahkan tanggung jawab manajerial atas fungsi tertentu ke organisasi di luar struktur birokrasi militer regular, yang dikontrol secara tidak langsung oleh pemerintah pusat. Konsep ini membawa implikasi bahwa otoritas pusat malimpahkan satu badan fungsi dan tugas tertentu, di

[80]Ibtisam Abu Duhou, *School Based Management,* penerj. Noryamin Aini dan Suparno (Jakarta: Logos, 2002), 11.
[81] Ibtisam Abu Duhou. *School Based Management*…,12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana badan itu mempunyai wewenang melaksanakannya, namun tanggung jawab tetap berada pada otoritas pusat.

Sedangkan devolusi adalah penciptaan dan penguatan unit pemerintah di daerah, baik secara legal maupun financial, di mana aktivitasnya secara substansial berada di luar pengawasan langsung pemerintah pusat. Dengan devolusi, unit pemerintah lokal bersifat otonom dan mandiri, dan status hukumnya terpisah atau berbeda dengan pemerintah pusat. Penguasa pusat hanya menjalankan pengawasan tidak langsung terhadap unit tersebut. Hal ini tentunya berbeda dengan konsep privatisasi (swastanisasi) yang memberikan keseluruhan pengawasan kepada individu atau perusahaan swasta.[82]

Dengan pemahaman singkat di atas, diskusi tentang konsep desentralisasi tidak dapat dilepaskan dari struktur organisasi yang akan dibangun, sebab dari struktur organisasi itu akan tergambar pembagian tugas dan wewenang dalam sebuah organisasi. Yang dimaksud struktur adalah sebuah cara dimana sebuah organisasi membagi kerjanya ke dalam tugas-tugas yang jelas, kemudian ada koordinasi di antar elemen. Secara singkat, dapat dipahami bahwa desentralisasi merupakan cara di mana kekuasaan disebar ke seluruh unit.[83]

Berkaitan dengan sistem desentralisasi, dalam praktiknya ada beberapa dimensi yang perlu dicermati: *pertama*, dimensi vertikal/horizontal. Desentralisasi vertikal mengacu pada tingakat otoritas pembuatan keputusan

[82] Ibtisam Abu Duhou. School Based Management…, 13.
[83] Daniel J. Brown, Desentralization and School Based Management (New York: The Palmer Press, 1990), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dibagikan ke bawah dalam hierarki manajemen, yakni dari pemimpin eksekutif hingga tingkatan paling bawah dan dapat ditempatkan dalam peran garis otoritas. Horizontal diartikan sebagai pendistribusian otoritas kepada anggota non-jalur yang mungkin ada di banyak level organisasi. Sebagai contoh, jika otoritas pengawas dibagi bersama dengan staf kantor pusat, maka daerah akan didesentralisasi secara horizontal. Model desentralisasi ini mengurangi kekuasaan dalam membuat keputusan dari manajer tingkat paling bawah. *Kedua,* dimensi selektif dan parallel. Dimensi selektif berarti hanya jenis keputusan tertentu yang didistribusikan ke organisasi, sementara yang lain tidak didistribusikan. Contoh, mempertahankan keputusan keuangan pada tempat strategis, namun memindahkan keputusan produksi pada supervisor garis pertama.

Dalam konteks lembaga pendidikan, di antara jenis keputusan yang bisa didistribusikan di sekolah adalah pengadaan perlengkapan dan personel sekolah, sementara keputusan mengenai pemanfaatan, pemeliharaan, dan layanan ahli diatur oleh kantor pusat. Sementara itu, dimensi parallel desentralisasi adalah pendistribusian berbagai keputusan pada temapat yang sama. Tempat yang sama dapat dimaknai sebagai peran yang sama. Misalnya, pendistribusian keputusan keuangan, pemasaran, dan produksi kepada manajer divisi dan lini tengah.[84]

Dari ungkapan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ada dua bentuk desentralisasi pendidikan yang perlu diterapkan, yakni desentralisasi

[84] Daniel J. Brown, *Desentralization and School Based Management* (New York: The Palmer Press, 1990), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik dan desentralisasi organisasi. Yang pertama dipahami sebagai bentuk pelibatan semua komponen dalam menentukan arah kebijakan, sementara yang kedua lebih mengarah kepada persoalan teknik struktural. Yang pertam identik dengan desentralisasi horizontal, sedangkan yang kedua identik dengan desentralisasi vertikal.

Di Indonesia, konsep desentralisasi di samping diposisikan sebagai alternatif, juga sebagai kritik atas model penyelenggaraan pendidikan yang selama ini tersentralisasi. Pendidikan sentralistis tidak mendidik manajemen sekolah untuk belajar mandiri, baik dalam hal manajemen kepemimpinan maupun dalam pengembangan institusional, alokasi sumber daya, dan terutama membangun partisipasi masyarakat untuk berperan memiliki sekolah. Peningkatan sekolah perlu dukungan *stakeholder*, yang meliputi pemerintah daerah, komite sekolah (kepala sekolah, guru, orangtua siswa, dan tokoh masyarakat), serta siswa. Pengambilan keputusan bersama di kalangan *stakeholder* pada level sekolah merupakan kunci utama dalam melaksanakan desentralisasi.[85]

Berpijak dari uraian bentuk desentralisasi di atas, persoalan yang menyangkut isu desentralisasi poitik adalah tarik ulur antara pemerintah dan masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan. Dalam konteks bahasa kekuasaan berarti sentralisasi versus desentralisasi. Atau yang lebih popular dalam konteks keindonesiaan adalah otonomisasi lembaga. Yang kedua, manyangkut otonomi pengebangan keorganisasian. Otonomi lembaga

[85] Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipahami sebagai otonomi penyelenggara pendidikan yang menuntut adanya restrukturisasi pendidika dan rekapitulasi pendidikan. Hal ini dipahami sebagai usaha kearah pengembangan keorganisasian lembaga pendidikan secara mandiri sesuai dengan potensi lembaga.

Desentralisasi politik dipahami sebagai desentralisasi yang bersifat horizontal. Konsep ini dipahami sebagai pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah. Kewenangan ini pada dasarnya merupakan upaya untuk membatasi kewenangan pemerintah dann kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, karena pemerintah dan provinsi hanya diperkenankan menyelenggarakan kegiatan otonomi sebatas yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.[86]

Dengan demikian, konsep desentralisasi pendidikan sesungguhnya hendak memberikan keleluasaan kepada lembaga pendidikan dalam setiap aktivitas kelembagaan dan kependidikannya. Dengan suatu harapan, agar setiap lembaga bisa menyesuaikaan dirinya dengan masing-masing situasi dan kondisi atau harapan serta keutuhan masyarakat yang ada di sekitarnya. Konsep ini sangat penting, sebab pendidikan pada dasarnya merupakan proses untuk membawa rakyat menuju pengembangan diri sehingga mampu menjawab tuntutan perkembangan zaman dan budayanya.

[86] Lihat Kajian Riyaas Rasyid, Afan Gaffar dan Saukani, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, dalam pelaksanaannya tentu akan muncul kesulitan. Kesulitan utamanya adalah keberadaan agama yang merupakan hal paling rentan terhadap konflik, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam merancang *platform* desentralisasi pendidikan agama. Begitu pula dengan lemahnya sumber daya manusia yang ada. Untuk mengatisipasi rencana perubahan yang kelihatannya sulit namun tidak dapat dielakkan, perlu disusun beberapa alternatif yang dapat direalisasikan bagi pendidikan agama di lingkungan Departemen Agama.[87]

Alternatif *pertama*, eksistensi struktur Ditjen Binbaga Depag tetap dipertahankan, sedangkan penyelenggaraan pendidikan dilimpahkan kepada Pemda Tingkat II. Dasar pertimbangan alternatif ini adalah bahwa Depag tetap memegang kewenangan dalam mengelola pendidikan agama dan pendidikan keagamaan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Selain itu, pembinaan pendidikan agama dan keagamaan secara operasional akan sama dengan pembinaan pendidikan sekolah umum. Dalam alternatif pertama ini, Ditjen Binbaga memiliki kewenangan menetapkan kebijakan nasional, pembinaan, standarisasi mutu dasar, monitoring, dan evaluasi. Sedangkan daerah bertanggung jawab dalam penyediaan saran, prasarana, pembinaan dan peningkatan kemampuan tenaga kependidikan.

Alternatif *kedua*, institusi Ditjen Binbaga Depag diintegrasikan ke dalam Dinas Pendidikan Nasional, sedangkan penyelenggara pendidikan

[87] Azyurmadi Azra, "Desentralisasi Pendidikan dan Otonomi Dearah Implikasinya terhadap Pendidikan Islam," dalam *At-Ta'dib: Forum Kajian Ilmiah Kependidikan Islam*, Nomor 1 tahun 2000, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama dan keagamaan di serahkan ke Pemerintah Daerah. Dasar pertimbangan alternatif kedua ini adalah bahwa dengan satu atap di bawah Dinas Pendidikan Nasional, penyelenggaraan dan kualitas pendidikan pendidikan agama akan sama dengan sekolah umum. Kekuatan alternatif kedua ini adalah pada satu atap, sehingga pendidikan agama dan keagamaan menjadi lebih terintegrasi ke dalam sistem pendidikan nasional dan menghilangkan dikotomi kelembagaan yang substansial antara pendidikan agama dan keagamaan dengan pendidikan umum. Juga, diskriminasi yang selama ini ada terhadap pendidikan agama dan keagamaan agaknya dapat diminimalisasi atau dihilangkan sama sekali. Akan tetapi, dalam alternatif terakhir ini harus ada jaminan bahwa pendidikan agama tidak akan dicampuri kepentingan politik seperti pada masa Orde Baru, sebagai upaya pengerdilkan peran agama dalam memberikan pelayanan pendidikan agama dan keagamaan. Artinya, harus ada jaminan mutu dari Dinas Pendidikan Nasional yang berkesinambungan atas peleburan secara struktural pengelolaan pendidikan agama.[88]

Di sisi lain, dengan penerapan desentralisasi, terjadi kekhawatiran di kalangan para birokrat pemerintah daerah bahwa dengan penyerahan kewenangan (otonomi), mereka takut kalau pusat melepaskan tanggung jawabnya dalam membantu dan membina dearah. Ada kekhawatiran yang muncul dari daerah-daerah, jangan-jangan dengan otonomi ini pusat akan melepaskan sepenuhnya kepada daerah, terutama dalam bidang keuangan.

[88]Azyurmadi Azra, *Desentralisasi Pendidikan*…, 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ungkapan semacam ini sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan secara empiris.

Kata kunci desentralisasi (otonomi) adalah kewenangan. Dengan kewenangan yang diberikan pada pemerintah daerah, pemerintah daerah bebas mengatur dan menggali sumber dayanya sendiri. Dalam hal ini, bukan berarti pusat melepas tanggung jawabnya, namun menjadi pemantau atau juga penyubsidi financial yang dibutuhkan daerah, meski nilai kumulatif bantuannya dikurangi. Sedangkan kekurangannya, pemerintah daerah diberikan hak sepenuhnya untuk menutupi anggaran keuangannya itu dengan cara memanfaatkan kewenangan yag dimilikinya. Hal itu menjelaskan pelaksanaan desentralisasi pendidikan masih sangat kental dengan euforia peralihan kekuasaan dalam pengelolaan pendidikan di daerah yang semestinya prioritas pendidikan lebih dikedepankan.[89]

E. Posisi Madrasah, Madrasah Diniyah, dan Pesantren dalam Otonomi Pendidikan

Posisi pendidikan secara umum atas implikasi kebijakan dan penyenggara pendidikan masa otonomi daerah adalah lebih berorientasi pada pencapaian target-target tertentu sesuai dengan karakterisitik kedaerahan. Sehingga target kurikulum yang pada gilirannya mengabaikan proses pembelajaran yang efektif dan mampu menjangkau seluruh ranah dan potensi anak didik. Proses pembelajaran sangat berorientasi pada ranah kognitif

[89] Rohmat Mulyana, *Optimalisasi Pemberdayaan Madrasah,* (Semarang: Aneka Ilmu, 2009), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pendekatan verbalisme, dan pada saat yang sama cenderung mengabaikan pembelajaran ranah afeksi dan psikomotorik. Namun, dalam dimensi tertentu, daerah diberi kewenangan untuk memberikan materi tambahan yang menjadi penunjang untuk pemenuhan target yang rata-rata memiliki ciri khas antara daerah satu dengan daerah yang lain.

Pengembangan pendidikan madrasah, diniyah dan pesantren ini merupakan wujud dari keinginan umat islam untuk meningkatkan mutu pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya program pengembangan model-model madarasah yang dikelola oleh Kementerian Agama RI seperti pendidikan MI, MTs, MA, MAK, MAPK, dan madrasah-madrasah dengan sistem asrama atau *boarding school*, atau yang dalam lembaga pendidikan klasik disebut dengan pesantren.[90]

Program pengembangan madrasah yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kemenag ini, selain untuk memberikan sistem pendidikan yang relevan dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu, juga untuk membuktikan bahwa pendidikan madrasah tidak hanya sebagai pendidikan alternatif atau pendidikan kelas dua. Posisi pendidikan agama yang menjadi ciri khas pendidikan madrasah, diniyah, dan pesantren untuk mendalami ilmu agama sekaligus dapat menciptakan generasi Islam yang memahami ilmu-ilmu umum guna mencerdaskan secara intelektual, moral, dan keterampilan dalam membangun peradaban bangsa.

[90]Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangan*, (Jakarta: Logos Wacana, 1999), cet-II,.129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam konteks otonomi daerah, pendidikan madrasah, diniyah, dan pesantren tidak hanya memfokuskan diir hanya berkutat pada persoalan materi keagamaan, akan tetapi daerah menyadari bahwa pendidikan sangat terkait dengan berbagai aspek lainnya, diantaranya adalah tuntutan dunia kerja. Oleh karenanya pengaturan pendidikan perlu dilakukan dengan pendekatan sistem hingga mampu mengurai problem daerah secara menyeluruh.Berangkat dar sinilah, pemberian pendidikan agama diberlakukan mulai dari Sekolah Dasar sanpai Perguruan Tinggi.Hal ini sesuai dengan teori bahwa ketika situasi pola hubungan umat Islam denagn pemerintah terjadi konflik, perkembangan madrasah cenderung terbatasi, bahkan mungkin terancam eksistensinya.Begitu juga sebaliknya, ketika kondisi negara dengan umat Islam bersifat integratif, harmonis, dan saling memberikan manfaat, maka perkembangan madrasah pun tampak sangat positif, bahkan menempatkan madrasah konsistensi dalam sistem pendidikan nasional.[91]

Pada era reformasi merupakan era baru dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia sebagai koreksi terhadap pemerintah yang dibangun oleh pemerintah Orde Baru.Era reformasi ini lahir dari semangat dan tekad kebangkitan demokrasi, karena menilai Pemerintah Orde Baru telah gagal dalam melaksanakan visi dan misinya yang ingin menghapus segala bentuk praktik dan kebijakan pemerintahan sebelumnya.

[91] Maksum, *Madrasah Sejarah*….133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berangkat dari sinilah, Undang-undang tentang otonomi daerah tersebut mendelegasikan bidang pendidikan sebagai salah satu sistem pemerintah daerah yang dikenal dengan desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pendidikan ini merupakan bentuk penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah untuk menyelenggarakan pendidikan yang bertujuan agar pengelolaan pendidikan menjadi wewenang daerah sehingga pengembangan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya diharapkan lebih cepat, tepat, efisien dan efektif khususnya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di daerah dalam bidang pendidikan.

F. Peningkatan Mutu Pendidikan Islam di Madrasah, Madrasah Diniyah, dan Pesantren

Menurut Masnuh sebagaimana pernyataan Ammur (2007: 160) pendidikan merupakan kegiatan, proses, hasil dan sebagai ilmu yang pada dasarnya merupakan sebagai usaha sadar yang dilakukan manusia sepanjang hayat guna memenuhi kebutuhan hidup. Pandangan ini secara umum telah menjadikan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia “Mutu” berarti karat.Baik buruknya sesuatu, kualitas, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan). Pengertian mutu secara umum adalah gambaran atau karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan. Pendidikan yang bermutu bukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, dia merupakan hasil dari suatu proses pendidikan berjalan dengan baik, efektif dan efesien.[92]

Menurut Joremo S. Arcaro (2005, hal. 85), mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses dan out put pendidikan.

Mutu pendidikan adalah merupakan kemampua sistem pendidikan yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah faktor input agar menghasilkan out put yang setinggi-tingginya.[93]

1. Indikator Mutu Pendidikan

Dalam konteks pendidikan, indikator mutu berpedoman pada konteks hasil pendidikan yang mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu (misalnya : setiap catur wulan, semester, setahun, 5 tahun, dan sebagainya). Prestasi yang dicapai dapat berupa hasil tes kemampuan akademis, seperti : ulangan umum, UN, atau prestasi bidang lain, misalnya prestasi dibidang olah raga dan seni. Bahkan prestasi sekolah berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (*intangible*), seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, dan sebagainya. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan Islam ada beberapa yang penting dan prioritas, diantaranya:[94]

---

[92] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besara Bahasa Indoensia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 788.
[93] Ace Suhadi, dkk, *Mutu Pendidikan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1995), 108.
[94] Sebagaimana Haidar PD dan Nurgaya dalam *Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 231-232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Tenaga Pendidik, tenaga pendidika adalah faktor yang sangat penting dari sekian faktor pendidikan lainnya. Sebab disamping sebagai pengelolaan proses-proses belajar-mengajar, mereka jga berfungsi untuk melakukan transfer ilmu, sikap dan keterampilan kepada peserta didik.

b. Sarana dan Fasilitas, keduanya sangat menunjang untuk mewujudkan proses belajar-mengajar yang aman, tenang dan nyaman bagi semua warga lembaga pendidikan.

c. Beban Kurikulum, madrasah merupakan lembaga pendidikan yang bercirikan keislaman. Oleh karenanya, beban kurikulum jelas berbeda dengan kurikulum yang dibebankan kepada sekolah umum. Madrasah disamping menjalankan kurikulum sebagaimana sekolah umum juga menjalankan kurikulum yang berbasis pada agama. Sehingga postr kurikulum madrasah lebih gemuk daripada sekolah.

d. Struktural dan Kultural, secara strukturan madrasah berada pada kendali kementerian agama. Problemnya adalah kementerian pendidikan dan kebudayaan juga terlibat yang tidak hanya pada tataran pembiayaan akan tetapi juga keberlangsungan proses belajar-mengajar. Secara strukutural madrasah berdiri di dua kementerian.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Mutu Pendidikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam peningkatan mutu pendidikan dapat dipengaruhi oleh faktor input pendidikan dan faktor proses manajemen pendidikan.[95] Input pendidikan adalah segalah sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Input pendidikan terdiri dari seluruh sumber daya sekolah yang ada. Komponen dan sumber daya sekolah menurut Yusuf Umar (2016) penerapan Total Quality Management (TQM) merupakan akumulasi totalitas komponen madrasah secara kompehensif. Sebab TQM menekankan pada fungsi-fungsi manajemen.[96]Dari pengertian diatas maka input pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan dapat berupa :

1. Sumberdaya manusia sebagai pengelola sekolah yang terdiri dari :
   a) Kepala sekolah, merupakan guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. (Sisdiknas tahun 2003 Bab II Pasal 2)
   b) Guru, menurut UU Nomor 14 tahun 2005 Bab I pasal 1 menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik.
   c) Tenaga administrasi. Tenaga aministrasi ini memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka mengelola dan berjalannya roda kependidikan disebuah lembaga pendidikan, termasuk di Kabupaten Pasuruan.
2. Sarana dan Prasarana.

[95] Yusuf Umar, *Manajemen Pendidikan Madrasah Bermutu*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), 115.
[96] Yusuf Umar, *Manajemen Pendidikan…*,118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses pembelajaran tidak hanya komponen guru, peserta dan kurikulum saja, kehadiran sarana dan prasarana pendidikan sudah menjadi suatu keharusan dalam mencapai keberhasilan pembelajaran.[97] Sarana dan prasarana pendidikan, merupakan media belajar atau alat bantu yang pada hakekatnya yang akan lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan.[98]

3. Kesiswaan

Siswa sebagai peserta didik merupakan salah satu input yang turut menentukan keberhasilan proses pendidikan. Penerimaan peserta didik didasarkan atas kriteria yang jelas, transparan dan akuntabel.

4. Keuangan (Anggaran Pembiayaan)

Salah satu faktor yang memeberikan pengaruh terrhadap peningkatan mutu dan kesesuaian pendidikan adalah anggaran pendidikan yang memadai. Sekolah harus memiliki dana yang cukup untuk menyelenggarakan pendidikan. Oleh karena itu dana pendidikan sekolah harus dikelola dengan transparan dan efesien.

5. Kurikulum

Salah satu aplikasi atau penerapan metode pendidikan yaitu kurikulum pendidikan. Pengertian kurilukum berdasarkan Hilda Taba sebagaimana dikutip Hamalik adalah suatu program atau rencana pembelajaran. Kurikulum merupakan komponen substansi yang utama

[97] Ahmad Mutohar, dkk, Manifesto Modernisasi Pendidikan Isla & Pesantren (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 195.
[98]Oemar Hamlik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di sekolah. Prinsip dasar dari adanya kurikulum ini adalah berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan terus menerus menyempurnakan strategi pembelajarannya.[99]

6. Keorganisasian

Pengorganisasian sebuah lembaga pendidikan, merupakan faktor yang dapat membantu meningkatkan kaulitas mutu dan pelayanan dalam lembaga pendidikan. Pengorganisasian merupakan kegiatan yang mengatur dan mengelompokkan pekerjaan ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah untuk ditangani.

7. Lingkungan fisik

Belajar dan bekerja harus didukung oleh lingkungan. Gordon dalam Hadiyanto (2004, hal. 100), lingkungan berpengaruh terhadap aktivitas baik terhadap guru, siswa termasuk didalamnya aktivitas pembelajaran.[100]

8. Perkembangan ilmu pengetahuan/ teknologi.

Disamping faktor guru dan sarana lainnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan yaitu faktor eksternal yang berupa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekolah sebagai tempat memperoleh ilmu pengetahuan dan berfungsi sebagai transfer ilmu pengetahuan kepada siswa, dituntut untuk mengikuti

[99] Hamalik, *Kurikulum*..,16.
[100] Hamlik, *Kurikulum*…,18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, sesuai dengan bidang pengajaran.

9. Peraturan

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional dan untuk menghasilkan mutu sumberdaya manusia yang unggul serta mengejar ketertinggalan disegala aspek kehidupan yang disesuaikan dengan perubahan global dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Indonesia melalui DPR RI pada tanggal 11 juni 2003 telah mensahkan Undang-undang Sisdiknas yang baru, sebagai pengganti Undang-undang Sisdiknas nomor 2 tahun 2009.

10. Partisipasi atau Peran serta masyarakat

Pertisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan diharapkan menjadi tulang punggung, sedangkan pihak pemerintah sebatas memberikan acuan dan binaan dalam pelaksanaan program kegiatan sekolah. Tilaar menyatakan bahwa peran serta masyarakat didalam penyelenggaraan pendidikan berarti pula pemberdayaan masyarakat itu sendiri didalam ikut serta menentukan arah dan isi pendidikan.[101]

11. Kebijakan Pendidikan

Salah satu peran pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah melakuka desentralisasi pendidikan. Dengan adanya desentralisasi tersebut, maka berbagai tantangan untuk pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan mengaharuskan adanya

[101] H.A.R. Tilaar, Kekuasaan dan Pendidikan; Suatu Tinjauan Dari Perspektif Studi Kultural, (Magelang: Indonesia Tera, 2003), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

reoritasi dan perbaikan sistem manajemen pneyelenggaraan pendidikan.

Selain faktor input yang telah dikemukakan tersebut, faktor lain yang menentukan mutu pendidikan adalah proses manajemen pendidikan. Abdul Hadis dan Nurhayati didalam manajemen mutu pendidikan, (2010, hal. 100-101) mengemukakan secara garis besar, ada dua faktor utama yang mempengaruhi mutu proses dan hasil belajar mengajar dikelas, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun yang termasuk kedalam faktor internal berupa : faktor psikologis, sosiologis, dan fisiologis yang ada pada diri siswa dan guru. Sedangkan yang termasuk kedalam faktor eksternal ialah semua faktor yanf mempengaruhi proses hasil belajar mengajar di kelas selain faktor siswa dan guru.[102]

[102] Abdul Hadis dan Nurhayati, Manajemen mutu pendidikan, 100-101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

METODOLOGI PENEITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasuruan, Jawa Timur dan penelitian ini lebih berfsifat lapangan (field research). Guna memperoleh hasil yang optimal, peneliti mengadakan interaksi dengan pihak instansi terkait yaitu, Dinas Pendidikan, Kabupaten Pasuruan, yang dijadikan tempat penelitian, para stakeholder Madrasah, Diniyah, dan Pesantren, dengan harapan dapat memperoleh informasi yang kongkrit. Dengan demikian data dan konsep yang telah ada di lingkungan pendidikan dapat segera diketahui.Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode *deskriptif-kualitatif* dengan pendekatan *fenomenologi*.

Alasan pemilihan lokasi penelitian di Pasuruan antara lain; 1) Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu kabupaten yang banyak memiliki madrasah, madrasah diniyah, dan pesantren dengan total 3.782. [1] hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemajuan atas berkembang pendidikan agama di Pasuruan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. 2) Pemerintahan daerah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas pendidikan adalah pemerintahan yang *consern* terhadap perkembangan pendidikan baik itu mengenai peningkatan kualitas dan mutu pendidikan, terutama bagi lembaga pendidikan madrasah, madrasah diniyah, dan pondok pesantren. Hal ini disebabkan Pasuruan

[1] Sebagaimana data yang dimiliki oleh Pergurag Dinas Pendidikan Kab. Pasuruan tahun pelajaran 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki lembaga pendidikan agama Islam cukup besar, sehingga perlu dibuat regulasi atau peraturan yang memiliki kewenangan dan bertanggungjawab atas maju mundurnya sebuah pendidikan terutama madrasah, madrasah diniyah, dan pondok pesantren, maka lahirlah Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. Melalui Perbup inlah langkah-langkah strategis diimplementasikan.

Deskriptif menjadi pilihan dikarenakan merupakan salah satu langkah metode dalam meneliti peran strategsi Dinas pendidikan, dan kelompok pendidikan madrasah, diniyah, dan pesantren, sebagai suatu obyek. suatu sistem pemikiran ataupun fenomenologis pada masa sekarang, bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki, terutama kebijakan Dinas Pendidikan terhadap kualitas madrasah, diniyah, dan pesantren.[2]Metode deskriptif ini juga berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep atau gejala juga menjawab pertanyaan sehubungan dengan status obyek penelitian pada saat ini. [3] Pendekatan deskriptif yang digunakan atau fenomena yang terjadi di lapangan penelitian.[4]

Penelitian ini termasuk pada penelitian kualitatif, karena data yang dikumpulkan bercorak kualitatif, bukan menggunakan kuantitatif yang

[2] Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 63.
[3] Sumanto, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Yogyakarta: Anda Offset, 1990), 8.
[4] Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (ogyakarta: Rake Sarasin, 1966), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan alat-alat pengukur.[5] Menurut Arikunto, penelitian kualitatif merupakan penelitian non-hipotesis, sehingga dalam langkag penelitiannya tidak memerlukan rumusan hipotesis.[6]

Timbulnya sikap komunikatif sangat membantu dalam mengumpulkan datasebagai instrumen. Dalam penelitian ini, peneliti merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data, sehingga dengan kemampuannya menyesuaikan diri dengan berbagai ragam realitas yang tidak dapat dikerjakan oleh instrumen *non-human*, dapat menangkap makna dan memahami fenomena[7] yang terjadi di kabupaten Pasuruan tentang kualitas pendidikan madrasah, diniyah, dan pesantren terkait dengan kebijakan Dinas Pendidikan.

Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang wajar atau dalam *natural setting*, tanpa dimanipulasi dan tanpa diatur dengan ekperimen atau tes. Dengan kata lain bahwa sumber data dan data dalam penelitian ini diambil dalam situasi yang alami dengan mempertimbangkan konteks dimana fenomena tersebut terjadi. Karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis, yaitu upaya untuk menggambarkan pengalaman, tata kelola dan kinerja secara alami tanpa mengandaikan kerangka kerja konseptual seperti yang ditemukan dalam ilmu alam.[8]Dalam arti berusaha menemukan kembali pengalaman dasar (*basuc experience*) berupa nilai-nilai dasar dari strategi pengembangan sistem pendidikan madrasah, diniyah, dan pesantren

---

[5] Robert L. Bogdan dan Sarri Knoop Biklen, *Qualitative Research for Education, an Introduction to Theory and Methods* (Boston: Allin and Bacon, 1982), 2.
[6] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 147.
[7] Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian*, 108-109.
[8] Ronald J.Glossop, *Philosophy: An Introduction the it problems and vocabulary* (New York: Dell Publising Co. Inc, 1974),149-150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam menghadapi modernisasi sebagai dampak dari sebuah kebijakan Dinas Pendidikan.Sebagai cirinya, diantaranya adalah menjelaskan respon lembaga pendidikan atas aturan yang diberlakukan, upaya-upaya secara informal kemandirian dari sebuah lembaga dan secara formal sebagai implementasi kebijakan, kendala-kendala yang muncul serta reaksi masyarakat terhadap kebijakan Dinas Pendidikan terhadap kemajuan lembaga pendidikan.[9]

Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi, sebagaimana penelitian kuantitatif yang memberlakukan prinsip-prinsip hasil penelitian secara universal bagi semua kasus.[10]Penelitian ini ditujukan unutk membentuk teori berdasarkan saling berhubungan antara data yang ditemukan dan berdasarkan temuan yang dihasilkan.Peneliti dapat menggunakan sesuai dengan situasi dan kondisi.Jika dikaitkan dengan masalah yang diteliti, yakni penelitian "Peranan Dinas Pendidikan dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Madrasah, Madrasah Diniyah, dan Pesantren", hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel yang diteliti, tanpa menggunakan hipotesa. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan mengimplementasikan masalah yang diteliti.[11]

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, artinya penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena atau karakteristik individual,

[9] M. Fauzan Zenrif, *Tafsir Fenomenologi Kritis: Interrelasi Fungsional antara Teks dan Realitas,* (Malang: UIN-Press, 2012), 21.
[10] S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Trisino, 1996), 15.
[11]Mardalis, *Metode Penelitian, Sutau Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

situasi atau kelompok tertentu secara akurat. Penelitian ini untuk menganalisis serta menemukan secara menyeluruh dan utuh mengenai Peranan Dinas Pendidikan dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Madrasah, Madrasah Diniyah, dan PesantrenKabupaten Pasuruan.

Adapun kasus yang diteliti adalah kebijakan Dinas Pendidikan yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan scara khusus yang menyangkut madrasah, diniyah, dan pesantren. Hal tersebut akan dibahas secara rinci atas fenomena dan fakta lapangan yang diteliti tersebut mencari jawaban fokus penelitian yang meliputi; perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan dampak dari kebijakan dinas terkait peningkatan kualitas pendidikan.

Ketiga lembaga pendidikan, pendidikan madrasah, pendidikan diniyah, dan pendidikan pesantren tersebut menggunakan parameter kebijakan dinas terkaitsebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan pada umumnya. Kejadian atau fenomena tersebut diteliti dengan menggunakan rancangan studi multikasus sebagai upaya pertanggung-jawaban ilmiah berkenaan dengan kaitan logis antara fokus penelitian, pengumpulan data yang relevan dan analisis data hasil penelitian.

Peneliti memperhatikan keberadaan masing-masing lembaga tersebut, kasus dan karakteristik ketiganya berbeda-beda, baik dari segi analisis kebutuhan dan nilai-nilai yang dianut maupun penyelenggaraannya maka penelitian ini cocok untuk menggunakan rancangan studi multikasus dimulai kasus tunggal (sebagai kasus pertama) terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan pada kasus yang kedua, serta kasus ketiga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Sumber Data Informasi

Sumber data dapat disebut sumber informasi, yakni menyangkut tempat dimana dari siapa peneliti dapat memperoleh data dalam suatu penelitian. Data atau informasi dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yakni:

a. Sumber data lapangan meliputi dinas Pendidikan dan unsur-unsur lembaga-lembaga terkait, yaitu lembaga pendidikan madrasah, diniyah, dan pesantren.
b. Sumber data dokumentasi, terdiri dari: 1) sumber data primer berupa dokumen kebijakan-kebijakan Dinas pendidikan terkait dengan upayanya dalam meningkatkan kualitas ketiga lembaga pendidikan, kurikulum madrasah, diniyah, dan pesantren dan lain-lain. 2) sumber data sekunder berupa dokumen-dokumen hasil penelitian sebelumnya dan buku-buku yang ditulis orang lain dengan bahasan tentang peranan kebijakan publik dinas pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan yang menjadi tanggungjawabnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu tahap penting dalam proses penelitian adalah kegiatan pengumpulan data. Peneliti harus benar-benar memahami berbagai hal yang berkaitan dengan pengumpulan data, terutama jenis penelitian yang sedang dilaksanakan.Dalam hal ini, penelitian ini termasuk pada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif meletakkan data penelitian bukan sebagai alat dasar pembuktian, akan tetapi sebagai modal dasar bagi pemahaman. Oleh karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, proses pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan kegiatan yang dinamis. Beragam data yang dikaji tidak ditentukan oleh teori prediktif dengan kerangka pikiran yang pasti, tetapi berdiri sebagai realitas yang merupakan elemendasar dalam membentuk dokumen.[12]

Adapun teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

   Setiap responden akan diwawancarai dengan menggunakan *interview guide approach*(pendekatan panduan wawancara) yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. [13] Dengan demikian, kita bisa mendapatkan data primer dengan wawancara. [14] Data wawancara yang dibutuhkan meliputi: kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, pelaksanaan pendidikan madarasah, diniyah, dan pesantren serta bentuk dan pola pendidikannya, kurikulum, dan lain sebagainya, yang diperoleh dari Dinas Pendidikan dan stakeholder ketiga lembaga.

   Sedangkan jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara berstruktur.Wawancara ini menggunakan panduan

[12] Amam Suprayoga dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 161-162.
[13] Colid Narkubo dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 83.
[14]Data Primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.lihat: Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pokok-pokok masalah yang diteliti, sehingga pertanyaannya sistematis dan mudah diolah serta pemecahan masalahnya juga lebih mudah.[15]

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang peristiwa, tempat atau benda sehingga diperoleh gambaran yang lebih jelas.

Dalam observasi ini, peneliti menggunakan observasi partisipan, sehingga observasi berperan ganda, yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi bagian dari yang diamati.Akan tetapi, partisipasi peneliti hanya sebagai pengamat, bukan fungsional.[16] Dalam hal ini peneliti ikut berpartisipasi dengan kelompok subjek yang diteliti, tetapi hubungan antara peneliti dengan subjek yang diteliti bersifat terbuka, tahu sama tahu dan akrab.

Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan peranan Dinas terkait kebijakan-kebijakan pendidikan, upaya-upaya *stakeholder* dalam merespons dan merealisasikan kebijakan, dan pelaksanaan peningkatan kualitas pendidikan di lembaga yang diteliti, terutama madrasah, diniyah, dan pesantren.

[15]Husaini Esman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Pnelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 59.
[16]Imam Suprayoga dan Tobroni, *Metodologi*, 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.Data-data yang dikumpulkan dalam teknik ini cenderung merupakan data sekunder.[17] Dokumen yang diteliti dapat terdiri dari berbagai macam, seperti undang-undang atau Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas pendidikan terkait dengan kebijakan pendidikan, panduan kurikulum, silabus, notulen, hasil workshop atau seminar, buku, perangkat pembelajaran, dan lain-lain.

Peneliti menggunakan teknik ini untuk memperoleh data mengenai kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam peraturan daerah, potret lembaga madrasah.Diniyah, dan pesantren, serta dokumen-dokumen tang berhubungan dengan peningkatan kualitas ketiga macam lembaga pendidikan tersebut.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.Analisis data penelitian ini bersifat kualitatif (berkelanjutan) dan dikembangkan sepanjang program.Analisis data dilaksanakan mulai penetapan masalah, pengumpulan data dan setelah data terkumpul.Dengan menetapkan masalah penelitian, peneliti sudah melakukan analisis terhadap permasalahan tersebut dalam berbagai perspektif teori dan metode yang digunakan.Dengan menganalisis data sambil mengumpulkan

[17]Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi*, 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data, peneliti dapat mengetahui kekurangan data yang harus dikumpulkan dan dapat mengetahui metode mana yang harus dipakai pada tahap berikutnya.

Pada umunya, tahap analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis selama pengumpulan data

   Kegiatan ini meliputi:

   a. menetapkan fokus penelitian

      Fokus penelitian ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan. Sebagaimana institusi yang lain, Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pasuruan memiliki peran yang sangat urgen terhadap pembangunan sumner daya manusia di Kabupaten Pasuruan. Penempatan Diknas di Pasuruan sebagai ujung tombak pembangunan masyarakat telah dibuktikan dengan lahirnya Perda.Dipilihnya Kemendiknas Kabupaten Pasuruan karena Kabuapten ini lebih *consern* terhadap pendidikan diberbagai sektor. Tidak hanya penguatan pada pendidikan formal, akan tetapi keinginan terhadap pendidikan non formal, Madrasah Diniyah, Pesantren dan program-program BTQ (Baca Tulis Quran) tidak hanya sebagai lembaga pendidikan pelengkap, akan tetapi memiliki prioritas yang sama baik secara pengakuan masyarakat maupun ketersediaan anggaran.

   b. Penyusunan temuan-temuan sementara berdasarkan data yang telah terkumpul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa temuan di lapangan terkait dengan keseriusan Dinas Pendidikan untuk mengimplementasikan Perda. Ukuran tingkat keberhasilan terhadap pendidikan di Kabupaten Pasuruan, diantaranya adalah standart mutu. Capaian mutu pendidikan di Kabupaten Pasuruan terus mencapai angka keberhasilan dengan kisaran peningkatan 25% pada dua tahun terakhir.[18] Disamping peningkatan secara kuantitas, Pasuruan, melalui peran Dinas Pendidikan dan kebudayaan memiliki target yang cukup rasional, diantaranya adalah sistem pendidikan yang berkembang dewasa ini memungkinkan pengelolaan pendidikan dengan berbagai model. Sistem pendidikan di Pasuruantelah berkembang berbagai jenis pendidikan seperti pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan kedinasan, pendidikan agama yang terdiri dari madrasah, madrasah diniyah dan pesantren. Dan ini mencirikan sistem pendidikan di negara-maju maju (Hough, 1984). Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pasuruan banyak memberikan peluang terhadap model pendidikan yang beragam. Mereka menggunakan standar mutu untuk mengendalikan kualitas pendidikan secara nasional (*national accesment*). Pendidikan akan dikatakan bermutu jika hasil pengukuran perolehan peserta didik telah mencapai atau

[18] Sebagaimana perkembangan pendidikan baik formal maupun nor formal yang terekapitulasi dalam program-program Pergurag Kabupaten Pasuruan tahun 2016-2017, tabel I.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi standar yang digunakan.[19] Disamping itu, pengukuran mutu pendidikan bisa dilihat dari tingkat pencapaian diantaranya:

1) Kecakapan mengenal diri (*self awareness*) atau kecakapan personal (*personal skill*), adalah kecakapan yang diperlukan bagi seseorang untuk mengenal dirinya secara utuh. Kecakapan ini mencakup penghayatan diri sebagai makhluk Tuhan, penghayatan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat, penghayatan diri sebagai warga Negara, menghayati dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan diri dan menjadikan kelebihan dan kekurangan sebagai modal dalam meningkatkan diri agar bermanfaat bagi diri dan lingkungannya.
2) Kecakapan berpikir rasional (*thinking skill*) adalah kecakapan yang diperlukan dalam mengembangkan potensi berpikir, mencakup kecakapan menggali dan menemukan informasi (*information searching*), kecakapan mengolah informasi dan mengambil keputusan (*information processing and decision making skills*), dan kecakapan memecahkan masalah secara kreatif (*creative problem solving skill*).
3) Kecakapan sosial atau kecakapan interpersonal (*social skill*) mencakup: (1) kecakapan komunikasi dengan empati (*communication skill*). Empati, sikap penuh pengertian seni

[19]Marzawi, Komunikasi dan Humas Ala Islam I Studi Tentang Silaturrahmi Dalam Mendukung MBS (Jambi : Pasca Sajana IAIN Sulthan Thoha Saifudin Jambi, 2008, 140-141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komunikasi dua arah perlu ditekankan, karena yang dimaksud berkomunikasi bukan sekedar menyampaikan pesan, tetapi isi dan pesan sampai, disertai dengan 'kesan' baik, akan menumbuhkan kesan yang harmonis.

4) Kecakapan akademik (*academic skill*) atau kemampuan berpikir ilmiah, mencakup komponen-komponen : (1) kemampuan melakukan identifikasi variabel; (2) kemampuan melakukan merumuskan hipotesis; (3) kemampuan melakukan penelitian.
5) Kecakapan vokasional (*vocational skill*) adalah keterampilan yang dikaitkan dengan berbagai bidang pekerjaan tertentu yang terdapar di masyarakat.[20]

c. pembuatan rencana pengumpulan data berikutnya berdasarkan temuan-temuan pengumpulan data sebelumnya.

Sebagai peneliti, maka langkah-langkah yang ditempuh adalah melakukan pra penelitian.Hal ini penting sebelum peneliti melakukan kajian dan observase secara mendalam baik itu terhadap temuaan-temuan yang berasal dari sumber data primer maupun data skunder.Data yang berasal dari hasil wawancara dengan semua pihak yang terlibat dan pelaku dilapangan sekaligus wawancara yang secara sistemik dan silmultan yang telah disediakan sebelumnya oleh peneliti.Rencana pengumpulan data menjadi strategi untuk

[20] Marzawi, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengungkap dan menarasikan segala sesuatu yang ada dalam obyek penelitian.

d. pengembangan pertanyaan dalam rangka pengumpulan data.

Dalam menggali data, peneliti memakai metode wawancara terstruktur dengn menyiapkan redaksi yang dijadikan pedoman dalam ranka wawancara kepada orang-orang yang terkait serta sudah ditentukan obyeknya, diantara redaksi pertanyaannya adalah:

Tentang penggalian data melalui wawancara

Tabel: 3.1

Masalah dikembangkan dalam penelitian	Draf pertanyaan
Kebijakan publik terkait pendidikan Madrasah, Madrasah diniyah, dan pesantren	1. sejauhmana pembuatan kebijakan-kebijakan Dinas Pendidikan yang terkait dengan pendidikan berbasis agama? 2. Apa latar belakang yang menjadikan kebijakan tentang pendidikan madrasah, diniyah, dan swasta di Pasuruan?
Kebijakan strategis peningkatan mutu pendidikan agama	1. Apa langkah-langkah strategis dalam ranka meningkatkan mutu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	pendidikan agama di Pasuruan? 2. Hambatan-hambatan apa saja yang menjadikan implementasi kebijakan itu serasa agak lambat?
sistem pendidikan agama di Pasuruan	1. Bagaimana sistem yang diterapkan oleh lembaga-lembaga pendidikan agama, terutama madrasah, diniyah, dan pesantren? 2. Apakah sistem itu tersentralisasi atau desentralisasi?
Regulasi kebijakan publik tentang pendidikan	1. Sejauhmana regulasi kebijakan publik terkait dengan pendidikan di Pasuruan?
Peranan Dinas Pendidikan Kab. Pasuruan terhadap Kualitas pendidikan agama	1. Sejauhamana peranan dinas pendidikan Kabupaten Pasuruan dalam rangka meningkatakn mutu pendidikan terutama madrasah, diniyah, dan pesantren? 2. Bentuk intervensi apa sajakah dalam rangka meningkatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	mutu pendidikan?
Sistem Evaluasi atas kebijakan publik	1. Bagaimana bentuk evaluasi yang diterapkan oleh dinas pendidikan dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan atau tingkat kegagalan? 2. Secara periodik yang digunakan dalam rangka evaluasi selama setahun?
Faktor Pendukung dan hambatan	1. Apa faktor yang menjadi pendukung atau penopang atas keberhasilan implementasi kebijakan-kebijakan dinas pendidikan? 2. Apa saja yang menjadi penghambat atas implementasi kebijakan dinas pendidikan Kabupaten Pasuruan?
Visi dan Misi pendidikan Kab. Pasuruan	1. Penjelasan tentang lahirnya visi pendidikan oleh dinas pendidikan Pasuruan terhadap kemajuan pendidikan di kabupaten Pasuruan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	2. Bagaiman bentuk-bentuk implementasi misi pendidikan itu diwujudkan di semua lembaga-lembaga pendidikan untuk mencapai pendidikan yang visioner?

Pertanyaan-pertanyaan di atas akan selalu berkembang sesuai dengan tingkat akurasi dan kebutuhan dalam penggalian data dalam rangka mendapatkan data secara komprehensif dan spisifik. Mereka yang terlibat sebagai iforman adaah: Kepala Dinas Pendidikan, kasi Pergurag, pimpinan-pimpinan di lembaga-lembaga Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar dati catatan-catatan lapangan.Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung.[21]

Data yang didapat dari lapangan ditulis dengan rapi, terinci serrta sistematis setiap selesai pengumpulan data, sehingga dta-data yang tekumpul semakin bertambah. Oleh karena itu, laporan harus dianalisis sejak dimulainya penelitian.Laporan-laporan itu perlu direduksi, yaitu

[21] Imam suprayoga dan Tabroni, *Metodologi*, 192-193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian kemudian dicari temanya.Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarikannya jika sewaktu-waktu diperlukan.[22]

3. Display data (penyajian)

   Kegiatan ini lebih pada mensistematisasi data secara jelas dalam bentuk yang jelas seperti dengan membuat matriks dan grafik (jika diperlukan).

4. Pengambilan keputusan/menarik kesimpulan dan verifikasi[23]

   Dalam analisis model interaktif ini, kegiatan mengumpulkan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan merupakan proses siklus yang berlangsung terus menerus. Agar data yang didapat baik dari Dinas terkiat dan lembaga-lembaga pendidikan madrasah, diniyah, dan pesantren memiliki keterkaitan dan berkesinambungan sehingga mudah didapatkan sebuah kesimpulan yang bersifat verifikatif.

F. Operasional Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh selanjutnya dianalisisoleh peneliti. Analisisdata dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu. Pada saat wawancara peneliti secara langsung dapat melakukan analisis dari berbagai jawaban yang ada,

[22]Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi*, 87.
[23]Mathew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, ter. Cecep Rohindi (Jakarta: UI Press, 1992), 15-21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bila belum memuaskan, maka peneliti menambah pertanyaan lagi sampai tahap-tahap tertentu diperoleh data yang lengkap yang dianggap *credible*.

Analisis data sebenarnya suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dari data. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptifdengan menafsirkan-mendeskripsikan data, mengklasifikasikan bentuk data kemudian interpretasi dan mengangkat makna dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti baik berkaitan dengan kasus individu maupun lintas kasus, selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berkut:

1. Analisis Data Kasus Individu.

   Analisis data kasus individu berkaitan dengan masalah, kebijakan publik tentang pendidikan, perencanaan pelaksanaan, evaluasi dan dampak kebiajkan terhadap peningkatan kualitas pendidikan madrasah, diniyah, dan pesantren. Kasus individu tersebut diawali dari kasus madrasah, kemudian dilanjutkan di lembaga diniyah, dan kemudian di pesantren. Analisisis data selama di lapangan, peneliti menggunakan model Miles and Hubermanyakni dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Kegiatan analisis data meliputi: *data reduction, data display,* dan *conclusion drawing/verification,* rinciannya sebagai berikut

   a. Reduksi data yakni merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi memberikan gambaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lebih jelas dan memudahkan pengumpulan data berikutnya bila diperlukan.

b. Sedangkan *data display* (penyajian data) merupakan langkah selanjutnya setelah data direduksi. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dengan teks yang bersifat naratif sehingga data yang diperoleh dapat menjawab dan menjelaskan masalah yang diteliti.

c. *Conclusion drawing/verification* adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi dari awal yang bersifat sementara dan berubah bila tidak ditemukan bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data. Data yang valid melahirkan kesimpulan *credible dan* merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

2. Analisis Data Lintas Kasus

Dari data yang sudah terkumpul pada kasus individu tersebut dianalisis dengan cara memperbandingkan antar kasus di madrasah sebagai kasusu satu, pada diniyah sebagai kasus dua, dan kasus tiga adalah domain pesantren. Pada mulanya temuan yang diperoleh di madrasah, diniyah, dan pesantren atas kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Dinas pendidikan, disusun kategori dan tema, dianalisis secara induktif konseptual dan dibuat penjelasan naratif yang tersusun menjadi proposisi tertentu yang selanjutnya dikembangkan menjadi teori substantif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proposisi-proposisi dan teori substantif selanjutnya dianalisis dengan cara membandingkan proposisi-proposisi dan teori substantif berdasar temuan dari ketiga lembaga tersebut dalam rangka untuk menemukan perbedaan karakteristik dari masing-masing kasus sebagai konsepsi teoritik berdasarkan perbedaan. Selanjutnya pada tahap terakhir dilakukan analisis secara simultan untuk merekonstruksi dan menyusun konsep tentang persamaan kasus dari ketiga lembaga baik madrasah, diniyah, dan pesantren dengan teknik yang sama. Analisis terakhir ini untuk menyusun konsep sistematis berdasarkan hasil analisis data dan interpretasi naratif berupa proposisi lintas kasus yang dijadikan bahan untuk mengembangkan temuan substantif.

Selanjutnya analisis lintas kasus ini, menggunakan langkah-langkah yang meliputi: 1) menggunakan pendekatan induktif konseptualistik dengan membandingkan dan memadukan temuan konseptual dari masing-masing kasus individu, 2) hasilnya dijadikan dasar untuk menyusun konsep atau proposisi-proposisi lintas kasus, 3) mengevaluasi kesesuaian proposisi dengan fakta yang menjadi acuan, 4) merekonstruksi proposisi-proposisi sesuai masing-masing kasus individu, dan 5) mengulangi proses ini sesuai kebutuhn sampai batas kejenuhan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PERANAN DINAS PENDIDIKKAN

A. Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan yang beralamatkan di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 59 A Pasuruan.

Misi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berusaha mensukseskan Gerakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari berbagai Subdin dan Sub Bag antara lain :

1. ***Bagian Tata Usaha***

   Bertugas melaksanakan penyusunan dan perencanaan program, kegiatan tata usaha umum, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan. Bagian Tata Usaha membawahi

2. ***Sub Bagian Perencanaan.*** Bertugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja dinas

3. ***Sub Bagian Kepegawaian.*** Bertugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, menyiapkan, menyusun, dan menyempurnakan organisasi dan tatalaksana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. ***Sub Bagian Keuangan,*** Bertugas melakukan urusan administrasi keuangan dengan Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan erta menyusun laporan keuangan.
5. ***Sub Bagian Umum,*** Bertugas melakukan urusan administrasi perkantoran, kegiatan ketatausahaan, perlengkapan serta kegiatan inventarisasi.
6. ***Sub Dinas TK/SD,*** Bertugas melaksanakan menyusun rencana,memberi petunjuk, mengkoordinasi, dan menilai pelaksanaan kegiatan TK/SD serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum, mengkoordinasi pelaksanaan pengadaan, mendistribusi sarana pendidikan, menempatkan dan memindahkan tenaga guru dan tenaga kependidikan TK/SD lainyya sesuai dengan ketentuan yang berlakuSub Dinas TK/SD terdiri dari :
7. ***Seksi Kurikulum,*** Bertugas melakukan pengelolaan kegiatan belajar mengajar dan kurikulum TK/SD
8. ***Seksi Sarana Pendidikan,*** Bertugas melakukan pendataan, pengadaan, dan pendistribusian sarana pendidikan TK/SD
9. ***Seksi Sekolah Swasta,*** Bertugas melakukan pendataan, pelayanan, perijinan, dan pengkoordinasian TK/SD Swasta.
10. ***Sub Dinas (SL) Sekolah Lanjutan,*** Bertugas melaksanakan penyusunan rencana, memberi petunjuk, mengkoordinasi dan menilai pelaksanaan kegiatan SMP/SMA/SMK serta memantau mengevaluasi pelaksanaan kurikulum, mengkoordinasi pelaksanaan pengadaan, mendistrisbusi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sarana pendidikan, memindahkan guru dan tenaga kependidikan SMP/SMA/SMK lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11. ***Seksi Kurikulum,*** Bertugas melakukan pengelolaan kegiatan belajar mengajar dan kurikulum SMP/SMA/SMK.
12. ***Seksi Sarana Pendidikan Sekolah Lanjutan,*** Bertugas melakukaan pendataan, pengadaan, dan pendistribusian sarana pendidikan di SMP/SMA/SMK.
13. ***Seksi Sekolah Swasta,*** Bertugas melakukan pendataan, pelayanan, perijinan, dan pengkoordinasian SMP/SMA/SMK.
14. ***Sub Dinas Perguruan Agama Islam (Pergurag),*** Bertugas melaksanakan bimbingan pendidikan dan perguruan agama Islam, Madrasah, dan Pondok Pesantren
15. ***Seksi RABATA (Roudotul Atfal – Bustanul Atfal – Tarbiyatul Atfal),*** Bertugas melakukan pembinaan, pengelolaan, pengkoordinasian, pelayanan, dan pelaporan kegiatan pendidikan di RABATA.
16. ***Seksi MI-MTs (Madrasah Ibtidaiyah – Madrasah Tsanawiyah),*** Bertugas melakukan pembinaan pengelolaan, pengkoordinasian, pelayanan, dan pelaporan kegiatan pendidikan di MI/MTs.
17. ***Seksi MA (Madrasah Aliyah),*** Bertugas melakukan pembinaan, pengelolaan, pengkoordinasian, pelayanan, dan pelaporan kegiatan pendidikan di MA.
18. ***Seksi MADIN-PONTREN (Madrasah Diniyah – Pondok Pesantren),*** Bertugas melakukan pembinaan, pengelolaan, pengkoordinasian,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelayanan, dan pelaporan kegiatan Madrasah Aliyah dan pondok Pesantren.

19. ***Sub Dinas DIKLUSEPORABUD,*** Bertugas melaksanakan penyusunan rencana, memberi petunjuk, mengkoordinasi, dan menilai serta pembinaan dan pengembangankegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga serta kebudayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
20. ***Seksi Pendidikan Luar Sekolah,*** Bertugas melakukan pengelolaan, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan, dan pelaporan pendidikan luar sekolah.
21. ***Seksi Generasi Muda dan Olahraga,*** Bertugas melakukan pembinaan, pengelolaan, pengkoordinasian, pelayanan, dan pelaporan kegiatan generasi muda dan olahraga.
22. ***Seksi Kebudayaan,*** Bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, pendidikan, pengkoordinasian, pengelolaan, dan pelaporan kegiatan seni dan budaya.

Kondisi demografi Kabupaten Pasuruan tahun 2016 berdasarkan pendataan DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan secara komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan (data diolah), secara proposional dapat terbagi sebagai berikut:

1. Tidak/belum tamat sekolah : 17,45%
2. Belum tamat SD/sederajat : 23,33%
3. Tamat SD/sederajat : 28,91%
4. SLTP/sederajat : 13,57%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. SLTA/sederajat : 13,98%
6. Diploma I/II/III : 00,58%
7. Diploma IV/Strata 1 : 02,06%
8. Strata 2/3 : 00,11%

Berdasarkan data tersebut penduduk Kabupaten Pasuruan tertinggi tamat SD/sederajat, kemudian SLTP/SLTA/Sederajat, dan terendah pada jenjang pendidikan diploma/strata-1/2/3.

Pada bagian ini dibahas tentang temuan-temuan terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, lalu mendiskusikan dengan para responden tentang kinerja dan upaya-upaya para *stakeholder* baik yang ada di Dinas Pendidikan maupun para kepala Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren.Menyandingkan dengan literatur-literatur yang ada untuk menemukan fakta lapangan dengan kajian-kajian teoritik yang telah dijadikan *framework* sebagai landasan dalam mengimplemetasikan segala program-program yang telah disepakati bersama. Temuan yang didapatkan melalui sebuah diskusi dan dari fakta empirik terkait dengan peranan dinas pendidikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan, terutama madrasah, diniyah, dan pondok pesantren; kondisi lembaga-lembaga pendidikan yang berada di naungan Dinas Pendidikan, dan juga terkait dengan kebijakan-kebijakan dalam rangka mendesain lembaga pendidikan terkhusus pada madrasah, diniyah, dan pondok pesantren. Temuan-temuan baik berupa data maupun hasil dari wawancara dan diskusi dengan *stakeholder* serta para pimpinan lembaga tersaji dalam bab ini dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bab selanjutnya. Secara khusus kepengurusan Pergurag adalah sebagaimana berikut:

Struktur Bidang Pergurag

Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan[1]

Tabel: 4.1

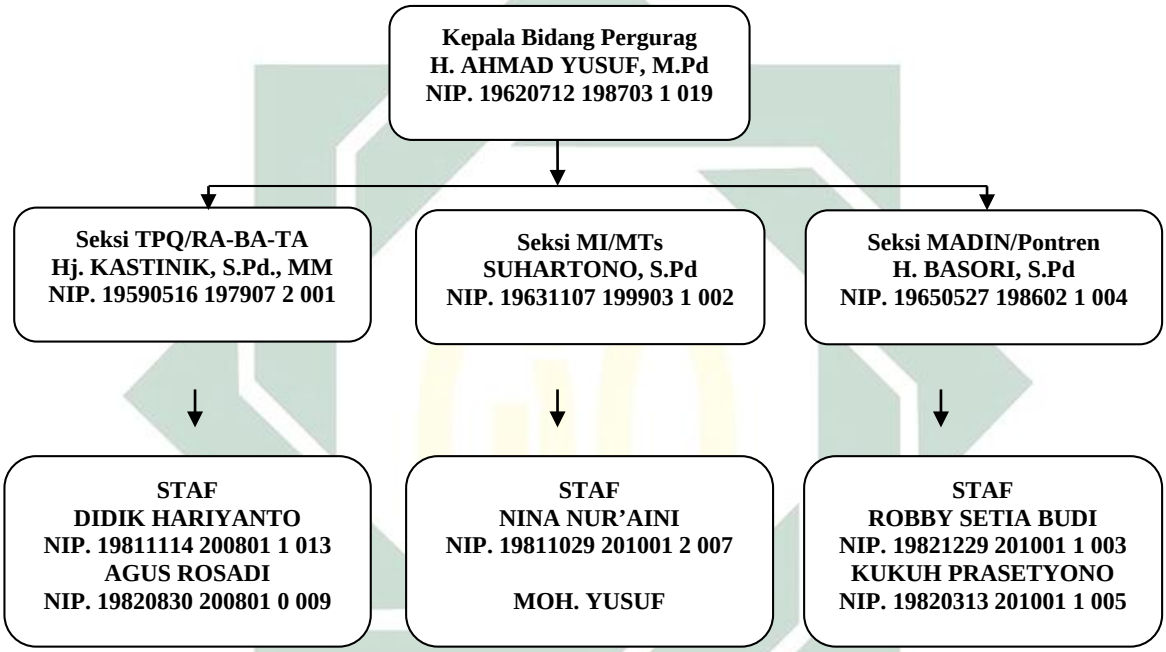

B. Peranan Perguruan Agama (Pergurag) Diknas Kabupaten Pasuruan

Bidang Pergurag mempunyai tugas melaksanakan bimbingan pendidikan pada Perguruan Agama Islam, madrasah dan pondok pesantren. Bidang Pergurag dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.Bimbingan yang dilakukan oleh Pergurag terlaksana secara sistemik dan terencana dengan baik sebagaimana tabel berikut ini:

[1]*Sumber:* data Struktur Sarpras Diknas 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Program dan Kegiatan Pergurag 2017[2]

Tabel: 4.2

NO	KODE	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	101011557	**Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik**	
		a. Pelatihan Kreatifitas Guru RA = 414 peserta	Tribulan II
		b. Pelatihan Pengembangan KBM Guru RA = 240 peserta	Tribulan I
2	101011558	**Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini**	
		a. Lomba Aku Anak Sholeh Siswa RA= 180 peserta	Tribulan III
		b. Senam Masal Siswa RA	Tribulan II
3	101011658	**Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi**	
		a. Kompetisi Sains Madrasah Siswa MI=138 peserta	Tribulan IV
		b. Kompetisi Sains Madrasah Siswa MTs=930 peserta	Tribulan IV
4	10101659	**Pelatihan Penyusunan Kurikulum**	

[2] *Sumber:* Program Kegiatan Pergurag Tahun 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		a. Pelatihan Pembelajaran Guru Agama MI=294 peserta	Tribulan II
		b. Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru MI=294	Tribulan I
		c. Pelatihan Psikologi Anak bagi Guru MI=294	Tribulan II
		d. Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru MTs=310 peserta	Tribulan IV
5	101011664	**Penyediaan Biaya Operasional Madrasah**	
		a. Ulangan Semester I MI	Tribulan IV
		b. Ulangan Semester II MI	Tribulan II
		c. Try out MI	Tribulan I
		d. UAM MI	Tribulan II
		e. Ulangan Semester I MTs	Tribulan IV
		f. Ulangan Semester II MTs	Tribulan II
		g. Try out MTs	Tribulan I
		h. UAM MTs	Tribulan II
6	101011681	**Biaya Operasional BPPDGS**	
		a. Biaya Operasional BPPDGS	Tribulan I-IV
7	101011807	**Pengembangan Data Informasi Pendidikan Non Formal**	
		a. Bimtek BTQ Guru SMP = 130 peserta	Tribulan I
		b. Sosialisasi BPPDGS = 750 Peserta	Tribulan II

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8	101011809	**Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal**	
		a. Bimtek Kurikulum Madin Pontren = 240 peserta	Tribulan II
		b. Bimtek Penyetaraan Kurikulum TPQ = 240 peserta	Tribulan II
		c. Standart Penyeetraan kualitas Guru TPQ = 240 peserta	Tribulan III
		d. Bimtek Manajemen Ponpes = 140 peserta	Tribulan III
		e. Bimtek Tenaga Pendidik Ponpes = 200	Tribulan II
		f. IMNI Madin	Tribulan II

Berdasarkan tabel:4.2 bisa dilihat bahwa sesungguhnya program-program kerja Pergurag cukup membantu dalam rangka meningkatkan kualitas, baik itu sumber daya pendidik dan *sakeholder* lebih-lebih menumbuhkembangkan kualitas para peserta didik. Ada lima tahapan kinerja Pergurag dalam jangka satu tahun, yaitu: (1) pelatihan kopetensi tenaga pendidik. Pelatihan ini diikuti oleh hampir sema tenaga pendidik pada RA dengan waktu triwulan ke-2.Pelatihan ini tentu memiliki tujuan agar para tenaga pendidik memiliki kuaifikasi yang baik dan mampu meningkatkan lembaga-lembaga pendidikan yang ada dalam kewenangannya. Sementara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada triwulan ke-1, diadakan pelatihan pengembagan KBM guru RA, tujuan ini tidak lain adalah agar pendidikan RA sebagai pendidikan awal pada usiaanak-anak benar-benar terjamin akan kualitasnya dengan dikelola dan diasuh oleh tenaga pendidik dan guru-guru yang profesional dan berkopeten. (2) Pengembangan pendidikan usia anak dini. Sebagai instansi yang memilki tanggungjawab yang besar terhadap maju mundurnya pendidikan PAU di Pasuruan, Pergurag benar-benar merintis dan mengawal segala kebijakan dan implementasinya terhadap pengelolaan pendidikan anak usia dini. Langkah-langkah yang ditempuh oleh Pergurag diantaranya mengadakan kompetisi anak-anak sholeh yang diadakan triwulan ke-3. Hal ini dilakukan agar terpetakan secara kualitas pendidikan anak usia dini. Kemudian mengadakan senam masal untuk anak-anak usia dini dala waktu trwiluan ke-2. Langkah-langkah oleh Pergurag ini merupakan langkah strategis untuk membangun pendidikan yang berkualitas sejak awal anak-anak menegnal tentang pendidikan.

Sementara (3) peningkatan kualitas pendidikan bagi sekolah dasar atau MI dan MTs pergurag memberikan ruang kreatifitas dengan cara mengaakan pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi bagi MI/MTs. Cara-cara yang ditempuh oleh Pergurag adalah dengan mengadakan KSM baik itu tingkat MI maupun tingkat MTs yang dilaksanakan pada triwulan ke-4. (4) Pergurag juga mengadakan pelatihan penyusunan kurikulum dengan pelatihan pembelajaran guru agama sepanjang triwulan ke-2, untuk bimibingan teknis (BIMTEK) bagi guru MI pada triwulan ke-1. Untuk pelatihan pskologi anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi guru kelas maupun guru BP dilaksanakan pada triwulan ke-2, dan sementara pelatihan peningkatan guru MTs dilaknanakan pada triwulan ke-IV.Semua pelatihan itu dilaksanakan oleh Pergurag sebagai implementasi program-program yang teah dicanangkan. (5) penyediaan biaya operasional madrasah. Pada point ini merupakan hal yang terpenting untuk mewujudkan semua program-program Pergurag selama dalam satu tahun. Diantaranya; a) pembiayaan semester ulangan I MI yang dilaksankan dalam triwulan IV, b) ulangan semester II MI dalam tribulan II, c) pembiayaan dalam try out MI dalam triwulan I, d) pembiayaan UAM MI yang dilaksankan dalam triwulan II, e) ulangan semester I MTs dalam triwulan IV, f) pembiayaan ulangan semester II MTs dalam triwulan II, g) pembiayaan try out MTs dalam triwulan, dan h) pembiayaan untuk UAM MTs yang dilaknakan dalam triwulan ke-II.

Untuk program yang keenam (6) adalah terkait dengan pembiayaan pada Biaya Operasioanl BPPDGS yang dlaksanakan pada triwuan I-IV. (7) pengembangan data dan infrmasi Pendidikan Non Formal pada, a) Bimbingan teknis BTQ pada guru SMP yang dilaksanakan trwiulan ke-I, b) sosialisasi BPPDGS yang dilaksanakan pada triwulan II; dan (8) diantara kegiatan dan program Pergurag Pasuruan adalah pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan Non Formal yang terimolementasikan dalam beberapa aspek, yaitu: a) bimtek kurikulum Madrasah diniyah dan Pondok Pesantren yang dlaksankan pada triwulan ke-II, b) bimbingan teknis penyetaraan kurikulum TPQ yang dilaknakan ada triwulan ke-II, c)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengembangan standart penyetaraan kualitas guru TPQ yang dilaksanakan pada triwulan ke-III, d) bimbingan manajemen pada Pondok Pesantren yang dilaksanakan pada triwulan III, e) bimbingan teknis tenaga pendidik pondok pesantren yang dilaksanakan pada triwulan ke-II, dan f) IMNI pada madrasah diniyah yang dilaksanakan triwuan ke-II.

M. Yusuf mengatakan bahwa semua program itu merupakan bentuk upaya Diknas dalam hal ini Pergurag untuk meningkatkan kualitas pendidikan disemua aspek termasuk pendidikan madrasah, diniyah, dan pondok pesantren. Semua kegiatan itu dilaksanakan dalam jangka satu tahun dan untuk selanjutnya diadakan evaluasi atas ketercapaian sekaligus pertimbangan dalam rangka membuat program-program lanjutan.[3]

Penanganan terhadap lembaga pendidikan, baik itu madrasah, madrasah diniyah dan pondok pesantren perlu penangana yang ekstra. Hal ini disebabkan keberadaan ketiga pendidikan itu hampir mendominasi perkembangan pendidikan di Pasuruan,[4] sehingga dibentuklah Pergurag ini dengan harapan secara spisifik akan mengawal dan menyelesaikan persoalan seputar pendidikan. Maka melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 43 Tahun 2016, pasal 3 pada [1] d dibentuklah Bidang Perguruan Agama (Pergurag).[5]

Penyusunan rencana program kerja Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas merupakan yang menentukan kinerja dalam rangka

[3] M. Yusuf, wawancara secara mendalam soal program-program Pergurag, 05 Mei 2017.
[4] Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, 20 Mei 2017.
[5] Perbup Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peningkatan mutu dan kualitas peniddikan baik Perguruan Agama Islam, madrasah dan pondok pesantren. Melalui wawancara yang terstruktur, para responden mengilustrasikan betapa peranan Pergurag ini sangat urgen. Hal ini terkait dengan maju mundurnya sebuah lembaga pendidikan yang ada di kabupaten Pasuruan. Dalam kaitan ini, pemahaman dan tolok ukur tentang peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Pasuruan perlu pula diketengahkan. Sejatinya untuk memajukan pendidikan yang berbasis agama, terutama pendidikan madrasah, diniyah, dan pesantren menjadi tugas pokok dan fungsi dari instansi kantor Kementerian Agama. Akan tetapi, dalam persoalan ketiga lembaga pendidikan tersebut, pemerintahan kabupaten Pasuruan menjadikan Pergurag sebagai bidang yang mengawal akan perkembangan dan kualitas pendidikan yang berada di Pasuruan tentu kerja sama dengan Kementerian Agama. Diantara tugas pokok dan fungsi Pergurag adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pergurag;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan pada TPQ, Madarsah dan Pondok Pesantren
3. Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan program pendidikan di TPQ, Madrasah dan Pondok Pesantren;
4. Pelaksanaan peningkatan mutu tenaga pendidik pada Madrasah, Pondok Pesantren dan TPQ;
5. Pelaksanaan penyiapan dan penyelenggaraan ujia akhir semester (UAM) dan ujian akhir *imtihanun niha'i* (IMNI);

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Penyusunan laporan hasil kinerja bidang pergurag; dan
7. Pelaksana tuhas-tugas lain yang diberkan oleh Kepala Dinas.[6]

Untuk lembaga-lembaga pendidikan madrasah mulai dari RA sampai dengan madrasah dinyah bisa dilihat dari tabel berikut ini:

Jumlah lembaga, guru dan siswa Kabupaten Pasuruan 2017[7]

Tabel: 4.3

Nomor	Lembaga	Jumlah	Jumlah Guru	Jumlah Siswa
1	**RA**	417	1.763	19.132
2	MI	302	3.294	32.376
3	MTs	167	3.055	25.641
4	MA	76	1500	14.191
5	MADIN	1.551	11.134	118.336
6	TPQ	1.269	6.913	88.142
Jumlah		3.782	27.659	297.818

Berdasarkan tabel: 4.3 telah digambarkan bahwa betapa besar jumlah lembaga pendidikan yang berada di bawah kendali Pergurag yaitu untuk lembaga RA sejumlah 417 lembaga dengan 1.763 guru dan 19.132 peserta didik. Sementara Madrasah Ibtidaiyah sejumlah 302 lembaga, 32.376 peserta didik dan 3.294 jumlah pendidik. Madrasah Tsanawiyah sejumlah 167 lembaga, 25.641 peserta didik dan 3.055 jumlah pendidik. Untuk

[6] Tentang diskripsi tupoksi pergurag telah dijelaskan secara detail pada Bab IV.
[7] *Sumber:* Data Pedoman Program Kegiatan Pergurag Tahun 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Madrasah Aliyah sejumlah 76 lembaga, 14.191 jumlah peserta didik dan 1500 pendidik. Sementara yang mendominasi adalah pendidikan Madrasah Diniyah (Madin) dengan jumlah 1.551 lembaga dengan 118.336 jumlah santri dan 11.134 pendidik. Dan yang terakhir adalah lembaga TPQ dengan jumlah lembaga 1.269, 88. 142 jumlah peserta didik serta 6.913 pendidik. Ini menggambarkan betapa pesat dan berkembangnya jumlah pendidiikan yang berada di Pasuruan dan hitungan ini masih seputar lembaga swasta saja.

C. Peningkatan Pendidikan Agama Islam di Pasuruan

1. Mendefinisikan Keberhasilan Pergurag dalam peningkatan kualitas Pendidikan

Perspektif Pergurag mengenai keberhasilan pendidikan adalah sangat pentng dalam kaitannya dengan identifikasi tujuan-tujuan dan pengharapan-pengharapan Pergurag tersebut dalam Pendidikan Agama Islam, Madrasah, dan Pondok Pesantren. Perspektif itu mencerminkan kepercayaan terhadap tolok ukur upaya peningkatan pendidikan yang telah direncanakan dan diimplementasikan secara baik. Menurut Dinas Pendidikan dalam hal ini Pergurag bahwa kesuksesan itu bisa terlihat dari beberapa indikator, diantaranya:

a. Jumlah Output yang Lebih Baik

Indikator pertama ini merupakan langkah awal yang menjadi sasaran perencanaan bagi upaya Pergurag dalam rangka meningkatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kualitas pendidikan di Kabupaten Pasuruan. Bagi Pergurag, kesuksesan itu bisa teramati dari peningkatan output, baik jumlah siswa/santri maupun jumlah pengembangan lembaga pendidikan dari tahun ke tahun. Dalam konteks yang lain adalah, bahwa sukses itu pula bisa terdeteksi dari kualitas lulusan yang ada.[8] Banyaknya lulusan yang berhasil memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi dan mereka tidak mengalami kendala untuk berasing dengan siswa/santri lain merupakan ciri bahwa Pendidikan Agama Islam, Madrasah, dan Pondok Pesantren tidak bisa dipandang sebelah mata. Pengelola Madrasah Tsanawiyah, Aliyah dan Diniyah KH.A. Hasyim, menyatakan bahwa lembaga pendidikan yang baik adalah dapat memfasilitasi lulusan-lulusannya untuk memasuki tingkat pendidikan yang lebih tinggi.[9]

Pergurag menyebutkan bahwa indikator lain bagi lembaga Pendidikan Agama Islam, Madarsah, dan Pondok Pesantren yang sukses adalah mengacu pada kemampuan lembaga untuk merencanakan dan mengimplementasikan progam-program yang dicanangkan baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.[10]

Indikator tersebut sangat kontekstual karena Diknas dalam hal ini Pergurag menyadari bahwa kondisi-kondisi ekonomi kebanyakan orang tua dalam tataran menengah ke bawah. Bagaimanapun demikian, pemerintah Kabupaten Pasuruan tidak mengabaikan fungsi utama dan tanggungjawabnya untuk mengawal semua pendidikan harus dipastikan

[8] Wawancara dengan Ahmad Yusuf, Kasi Pergurag Diknas Pauruan, 24 Mei 2017.
[9] Wawancara dengan Ahmad Yusuf, Kasi Pergurag Diknas Pauruan, 24 Mei 2017.
[10] Wawancara dengan Ahmad Yusuf, Kasi Pergurag Diknas Pauruan, 24 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa berjalan secara maskimal. Jangan sampai masyarakatnya tidak bisa mengenyam pendidikan gara-gara masalah finansial.

b. Berjalannya Manajemen Lembaga Pendidikan

Aspek lain yang menjadikan tolok ukur keberhasilan program-program Diknas dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan adalah praktik-praktik manajemen yang dijadikan *driver* bagi semua pengelola atau pimpinan di masing-masing lembaga secara baik dan benar. Mereka memahami bahwa kriteria manajemen yang baik adalah, misalnya; lembaga Pendidikan Agama Islam, Madrasah dan Pondok Pesantren yang baik adalah membuat program-program yang disusun dengan baik secara kontekstual sehingga dapat diimplemnetasikan, dan tujuan-tujuannya dapat tercapai. Adanya koordinasi yang baik dan sinergisitas yang intens pada semua level peimpinan sangatlah diperlukan. Tidak membuat renana yang pelaksanaannya berada di atas kapasitas dan kemampuan lembaga baik terkait dengan penyediaan Sumber Daya Manusia maupun input anggaran dana. Hal ini didukung oleh *stakeholder* Lembaga Pendidikan KH.A. Wahid Hasyim saat wawancara sebagai berikut:

> *Lembaga pendidikan yang sukses selalu ditandai dengan manajemen yang baik pada semua tingkatan. Dari masing-masing pihak menjalin koordinasi yang intens dan baik disemua sektor.*[11]

Hal ini menandakan bahwa manajemen lembaga harus berjaan secara silmultan dan menjangkau secara luas. Karena lembaga pendidikan bukan hanya tanggungjawab kepala Diknas, kepala

[11]Saat wawancara dengan pembina Pesantren Putri KH.A. Wahid Hasyim, Pasuruan, Siti Aisyah, 25 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Madrasah, Kepala Diniyah, dan Pengasuh Pondok Pesantren. Akan tetapi juga meruoakan tanggungjawab *stakeholder* dan juga masyarakat sebagai mitra lembaga. Semua unsur menyadari dan menyakini bahwa kemajuan semua lembaga akan bisa terwujud jika perencanaan yang secara *top down* telah digagas secara baik, sekaligus ekskusi secara aplikatif pada tataran subyek sekaligus obyek yaitu lebaga pendidikan.

Dalam konteks keindonesiaan, pendidikan secara terus menerus mengalami perubahan yang cukup signifikan yang dirunut sejak digulirkannya reformasi pada tahun 1998, dunia pendidikan Indonesia mengalami perubahan dramatis dan radikal dalam berbagai aspek. Terutama faktor manajemen, disentralisasi pendidikan yang sebelumnya sering dilakukan setengah hati.[12] Dalam konteks otonomi pendidikan, Kabupaten Pasuruan, bisa katakan yang paling agresif dan inivatif. Demi mengidamkan suasana pendidikan yang baik dan menjanjikan ada banyak Peraturan Bupati yang menjadi payung hukum telah terjadi perubahan besar dalam sektor pendidikan, dinataranya Perbup Pasuruan Nomor 43 Tahun 2016 tentang: kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. Termasuk secara khusus peran Pergurag yang tertuang pada bagian kelima Pasal 11 yang mengatur masalah tugas dan fungsi Bidang Perguruan Agama (Pergurag).

[12] Raihani, *Keepmimpinan Sekolah Tranformatif*, (Jogyakarta: LkiS, 2010), xiii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengembangan, peningkatan, dan perbaikan pendidikan harus dilakukan secara holistik dan simultan, memajukan pendidikan tidak boleh parsial. Sehingga pehatian terhadap manajemen menjadi yang utama untuk diperhatikan. Makna manajemen harus dieksplor sehingga makna dalam perubahan menuju sebuah pendidikan yang lebih baik bisa diwujudkan.

Dalam konteks yang lebih umum, bahwa nilai-nilai dasar pengembangan manajemen pendidikan agama Islam diperukan dua aspek, yaitu: *Pertama*, me-manage lembaga pendidikan dimulai dari niat diberbagai unsur, baik pendiri, penggagas, pemimpin maupun masyarakat sebagai bentuk keseriusan dalam meraih tujuan yang mulia. Niat merupakan rencana yang sungguh-sungguh untuk diwujudkan dalam kenyataan yang didukung berbagai komponen agar bisa direalisasikan sesuai keinginan dan tujuan. Pergurag yang diamanai oleh Dinas Pendidikan sebagai wujud untuk melaksanakan Peraturan Bupati nomor 43 Bagian Kelima Pasal 11. Niat atau rencana yang baik harus dikawal secara baik dan konsisten. Jika berhasil dan konsisten atas segala rencana, maka hendaklah bersyukur, serta berniat untuk menyusun dan melaksanakan rencana-rencana berikutnya. Sebaliknya jika gagal, dan atau kurang konsisten dengan rencana-rencana semula, maka segeralah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

introspeksi atas segala pelakanaan yang telah direncanakan. Hal ini penting sebagai bentuk reformulasi manajemen yang diambil.[13]

Kedua, Islam adalah agama amal atau menekankan pada upaya-upaya lahir sebagai bentuk ikhtiar. Intinya, bahwa sebagai makhluk wajib beruasaha di dalam setiap mewujudkan cita-cita termasuk dalam mendesain pendidikan Agama Islam yang baik dan mulia. Nilai-nilai dan kebersemangatan dengan etos kerja yang tinggi sepatutnya menjadi kekuatan pendorong bagi pengebangan manajemen pendidikan, terutama di lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis pada ajaran keislaman.

Ketiga, adanya nilai-nilai esesnsial yang ditegakan sebagai atau ditanamkan sebagai domain pembiasaan atau menjadi watak. Me-manajemen Pendidikan Agama Islam pada lembaga-lembaga Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren menjadi sangat penting sebagai bentuk ibadah kepada Alah SWT secara tulus ikhlas dan demi kemajuan Pendidikan Agama Islam.[14] Intinya, berjalannya manajemen yang baik pada sebuah lembaga tidak terlepas dari keseriusan dan konsistensi yang tingg dari berbagai pihak yang tidak hanya Dinas Pendidikan, akan tetapi seluruh warga lembaga dan *stakeholder*.

c. Terciptanya Kerukunan Antar Golongan

Hampir semua responden menyatakan bahwa diantara indikator kesuksesan program-program Pergurag terkait dengan pendidikan Agama, Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren adalah terciptanya

[13]Muhaimin, dkk, Manajemen Pendidikan; Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah, (Jakarta; Prenadamedia Group, 2015), 7.
[14] Muhaimin, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerukunan yang muncul dan lahir dari sebuah lembaga pendidikan. Pasuruan merupakan daerah yang plural, baik dari segi budaya, ras, suku, dan agama. Namun kemajemukan itu tidak menjadikan masyarakatnya terjadi gesekan. Jika dirunut ternyata polarisasi itu tidak menjadikan pola pendidikan yang dikembangkan menjadikan terhenti dan tersumbat. Masing-masing lembaga tidak membeda-bedakan anak-anak didiknya. Melalui kerja keras Dinas Pendidikan Pasuruan dengan bekerja sama berbagai pihak termasuk Kemenag, maka sistem pendidikan yang dijalankan selalu mendapatkan respon dan dukugan dari berbagai kalangan termasuk tokoh-tokoh adat dan agama. Semua unsur lembaga pendidikan harus mengedepankan sikap toleransi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemajemukan. Hal ini dinyatakan oleh Kepala Kementerian Agama sebagai berikut:

> *Lembaga pendidikan merupakan satu-satunya domain yang ampuh untuk menanamkan sikap saling menghargai. Oleh karenanya, semua unsur lembaga pendidikan baik yang menjadi kewenangan Kemenag maupun yang menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan harus selalu mendorong tumbuhkembangnya nilai-nilai toleransi kepada masyarakat pendidikan umum, pendidikan agama, diniyah, dan Pondok Pesantren.*[15]

Hal senada pula disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, bahwa:

> *Lembaga pendidikan tidak boleh bertindak diskriminatif, sikap intoleransi harus dihilangkan dari wilayah pendidikan. Sebab kalau pendidikan sudah berlaku diskriminatif dan mengajarkan secara intoleransi, maka bisa diramalkan sebuah masyarakat akan lebih anarkhis dan intoleransi antar sesama.*[16]

[15] Wawancara dengan Taufiqurrohman, 05 Juni 2017.
[16] Iswahyudi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pasuruan, 25 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karenanya, semua pihak menyadari bahwa tidak mungkin bisa mewujudkan rasa aman, nyaman dan melahirkan sebuah kerukunan antar golongan, suku, ras, dan agama jika saja lembaga pendidikan sebagai tempat pertama dan utama daam rangka melakukan transformasi keilmuan apapun kepada anak-anak didik tidak diprioritaskan. Dalam konteks keindonesiaan yang dikenal dengan sebagai bangsa yan majemuk. Hal ini dapat dilihat dari reralitas sosial yang ada, termasuk Kabupaten Pasuruan. Kemajemukannya dapat dibuktikan melalui semboyan dlaam lambang negara Republik Indonesia, yaitu Bhineka Tunggal Ika. Masyarakat yang plural ini sangatlah membutuhkan desain dan konsep pendidikan yang menyadarkan kepada anak-anak didik yang hidup ditegah-tengah multikultur. Kesadaran bahwa pluralitas keagamaan di manapun termasuk Indonesia adalah merupakan realitas yang tidak dipungkiri. Oleh karenanya kontak-kontak sosial yang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan baik lembaga yang berbasis keislaman maupun lembaga yang bebasis kebangsaan sangatlah dibutuhkan sebagai bentuk pengenalan, pemahaman, dan pengaplikasian sangat urgen dan siginifikan. Untuk menciptakan bangsa yang rukun, saling menghargai dan toleransi adalah tidak lain konsepsi pendidikan yang dikemas secara multikultural. Ulasan mengenai pemahaman multikulturalisme ini mengharuskan seseorang baik sebagai individu maupun masyarakat untuk mendukung dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi, toleransi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saling menghargai, mengedepankan persamaan dan penuh dengan akhlak mulia dan prinsip-prinsip tata nilai kemasyarakatan.[17]

2. Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Agama

Pemahaman tentang keberhasilan peranan Dinas Pendidikan terutama program-program Pergurag diantaranya adalah adanya internalisasi nilai-nilai pendidikan agama kepada anak-anak didik. Pemahaman semacam ini, tampaknya lebih terlihat manakala pendidikan agama mampu memberikan inspirasi dan daya dorong secara personal sekaligus secara komunal untuk membetuk karakter masyarakat yang agamis dan berkebudayaan. Ada banyak indikator bahwa anak-anak didik mampu meninternalisasi nilai-nilai pendidikan agama yang telah mereka dapatkan melalui proses pembelajaran, diantaranya:

a. Nilai-nilai Keyakinan Kepada Tuhan YME

Nilai-nilai keyakinan atau keimanan ini sangatlah dibutuhkan, pendidikan macam apapun haruslah mampu menguatkan rasa keimanan kepada Sang Pencipta. Jika saja lembaga pendidikan gagal dalam memasok pemahaman secara akal dan nurani tentang penguatan keimanan maka bisa dipastikan pendidikan itu telah gagal.[18] Sebab, pembahasan keimanan harus dilakukan secara gradual atau bertahap. Tahapan-tahapan dalam sistem pengajaran adalah jelas telah dilakukan

[17] Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pasuruan, Iswahyudi. Hal ini selarasa dengan pendapat Sulalah, dalam bukunnya yang berjudul *Pendidikan Mulikultural*, (Malang; UIN Maliki Press, 2012), 3.

[18] Hal ini telah menjadi perioritas untuk mengembangkan pendidikan yang *rohmatan lil'alamin.*Sebagaimana yang telah ditekankan oleh ketua Pergurag, M. Yusuf saat wawancara, 24 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di dunia pendidikan, termasuk upaya Pergurag untuk menjadikan warga madrasah sebagai sosok yang memiliki keimanan yang kuat dan bersahaja. Salah satu wujud terapis pihak pemerintah kepada warganya agar memiliki keimanan yang handal jelas akan dimulai dari formulasi pendidikan. Pendidikan yang akan selalu bertahan dari masa ke masa yang tak lekang oleh zaman atau pendidikan masa depan adalah pendidikan yang menanamkan rasa keimanan kepada anak-anak didiknya untuk beriman kepada Allah SWT. Keimanan adalah dasar atau fondasi dan awal mula dari segala sesuatu sifat islami.[19] Upaya yang telah dilakukan Dinas Pendidikan melalui program-program Pergurag adalah bagaimana lembaga pendidikan terutama Agama Islam, Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren memiliki andil dan peran yang sangat besar disamping sebagai pelopor sekaligus model pendidikan yang layak dijadikan inspirasi bagi semua pendidikan.

b. Menjunjung Nilai-nilai Kemaslahatan

Dalam berbagai wajah pendidikan modern, kedalaman dalam menanamkan hubungan antara pribadi anak-anak didik dengan Tuhannya adalah hal yang cukup mudah, namun apakah kuatnya dimensi keimanan dan hubungan anak-anak didik secara spiritual dengan Allah SWT mampu juga untuk diaplikasikan dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara atau tidak. Hal ini sangat ditentukan bagaimana konsepsi pendidikan itu dijalankan secara

[19] Sebagaimana pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pasuruan, Iswahyudi, 25 Mei 2017 dan selaras dengan pernyataan Sachiko Murata & William C. Chittick, *Trilogi Islam; Islam, Iman & Ihsan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

holistik. Dalam konteks inilah, banyak pendidikan yang hanya menawarkan kemampuan peserta didik dari sisi keunggulan kognitif saja, sementara ranah sosial cenderung diabaikan. Hal inilah yang mendorong seorang psikolog Daniel Goleman, mengadakan sebuah penelitian tentang *emotional intelligence*. Berangkat banyaknya kejahatan atau perilaku jahat yang dilakukan oleh mereka-mereka yang notabene memiliki kecerdasan akal yang cukup baik. Nilai-nilai pelajarannya pun cukup tinggi, namun mereka tidak segan-segan melakukan pembunuhan kepada mereka yang cukup berjasa dalam hidupnya. Maka Goleman menyimpulkan bahwa kecerdasan akal tidaklah cukup tanpa adanya kecerdasan emosional.[20] Dalam konteks agama, pendidikan tidak hanya dapat diperoleh melalui aspek fisik dan psikis, dan hanya ditujukan pada pembentukan berbagai aspek keterampilan, kecerdasan nalar dan keluhuran sikap, tetapi pendidikan mengandung maksud dan tujuan untuk mempertajam pengetahuan dan pengalaman spiritual, sehingga seseorang mampu memahami kondisi di dalam dan di luar dirinya, pentingnya kondisi itu bagi dirinya dan memahami pengetahuan dan pengalaman terhadap kondisi yang harus dilakukan secara baik dan benar.[21] Nilai aplikatif dari sebuah

[20] Penanaman nilai-nilai sosial, dalam bahasa agama, pendidikan harus mampu melahirkan peserta didik yang memiliki kepekaan secara sosial dan tekait dengan hal ini telah dinyatakan oleh A. Farid, sekretaris Dewan Pendidikan, Pasuruan, dan mengutip pendapat Daniel Goleman, *Emotional Intelligence,* Alih Bahasa; T. Hermaya, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2002), 5.

[21] A. Farid juga menyatakan bahwa puncak dari kebehasilan pendidkan disemua jenjang adalah bagaimana secara spiritual peserta didik mampu menjadi bingkai dalam kehidupan peserta didik, wawancara 26 Mei 2017. Dan secara khusus konsepsi ini telah dijelaskan oleh Abd. Kadir, *Visi Spiritual dalam Islam; Pengembangan Implementatif Kepribadian Muslim,* (Surabaya; UIN Sunan Ampel, 2016), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan tidak lain adalah bagaimana anak-anak didik memiliki sosial yang tinggi, keikutsertaan dalam membangun kondisi dan tata nilai masyarakat yang baik. Berperan secara aktif untuk mengembangkan makna *amilusshalihat* adalah bukti nyata keberhasilan pendidikan itu sendiri. Hal inilah yang selalu ditekankan hampir mayoritas pendidikan di Kabupaten Pasuruan. Apalagi, ada banyak pendidikan Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren yang jelas-jelas mengedepankan kepada anak-anak didiknya untuk mengedepankan kepekaan secara sosial.[22]

c. Mengedepankan Sifat Tawadlu'

Tawadlu' adalah nilai-nilai yang dianut kuat oleh pendidikan yang berbasis pesantren. Sikap tawadlu' atau rendah hati ini menjadi point penting bagi dunia pendidikan. Ketertundukkan pada Allah SWT ini akan melahirkan pula sifat dan sikap yan egaliter, toleransi dan selalu menjaga kearifan lokal. Tawadlu' atau rendah hati adalah karakter yang menjadikan anak-anak didik mampu mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat dan berujung pada tingkat kemaslahatan banyak orang. Sebagaimana ulama' salaf berkata:

Kewajiban orang alim adalah sikap tawadlu' kepada Allah SWT ketika sendirian maupun bersama orang lain; menjaga diri dan diam atas sesuatu yang sulit dipahami".[23]

[22] M. Yusuf, Kasi Pergurag, Pasuruan, 24 Mei 2017.
[23] Syeikh Muhammad Hasyim Asy'ari, *Adabul 'Alim wal Muta'allim*, Alih Bahasa, Rosidin, (Malang; Genius, 2013), 94-95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nilai tawadlu' ini akan memengaruhi anak-anak didik dalam mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan yang telah mereka peroleh dari bangku pendidikan formal maupun non-formal. Geliat pergaulan baik secara internal maupun eksternal yang ditopang dengan sikap tawadlu' akan selalu menampakkan sikap bersahaja. Dan warga lembaga pendidikan baik Madrasah, diniyah maupun Pondok Pesantren akan memulainya dengan jiwa keteladanan. Hal ini tentu ditunjukkan oleh pimpinan, guru dan semua warga madrasah sehingga secara simultan dan berlangsung terus menerus lembaga pendidikan akan melestarikan budaya kebersahajaan. Rendah hati tanpa merasa paling adalah kunci keberhasilan kepemiminan, pengajaran, dan keteledanan dari dan untuk semua warga dunia pendidikan. Semua unsur pendidikan mulai kepala Dinas, Kemenag, guru, dan para pengasuh selalu mengedepankan sikap dan sifat tawadlu' adalah menjadi kunci keberhasilan program-program Dinas Pendidikan di Kabupaten Pasuruan selama ini.

d. Landasan Keprofesionalan

Nilai-nilai profesional yang menjadi landasan bagi pengembangan pendidikan agama di lembaga Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren. Bukti adanya nilai profesionalitas yang diterapkan merupakan fakta bahwa pendidikan yang maju dan berkualitas diantaranya menjadi indikator keberhasilan program-program Pergurag. Hampir semua *stakeholder*memiliki komitmen yang kuat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap perubahan, menilai tinggi penddikan, dan berorientasi pada pengembangan anak-anak didik. Kepala seksi (kasi) pergurag menyatakan komitmen ini di dalam pernyataannya:

> *Menurut saya pribadi, bahwa lembaga pendidikan dikatakan berhasil adalah adanya pengembangan dan peningkatan secara utuh, baik dari sisi perencanaan, aplikasi, dan output yang memiliki nilai kemaslahatan secara umum di tengah-tengah masyarakat dalam kaitannya dengan pengabdian dalam berbangsa dan bernegara.*[24]

Program-program pendidikan harus diarahkan agar memiliki orientasi pada pengembangan anak-anak didik. Proses instruksi harus memberi keleluasaan keadan anak-anak didik untuk menjadi pelajar yang aktif, bukan anak-anak didik yang pasif. Dengan demikian, program dan inovasi akademik yang dikonseptualisasikan sejak semua warga madrasah yang sekarang diorientasikan untuk melahirkan anak-anak didik yang aktifan kreatif. Profesionalitas harus menjadi konsepsi penting yang dimulai dari personal pendidik, kepala lembaga, dan juga semua warga madrasah. Tanpa adanya sikap dan sifat profesional pada sebuah lembaga, maka bisa dipastikan bahwa sebuah lembaga akan mengalami stagnan, termasuk lembaga-lembaga pendidikan dilingkungan agama.

Profesional ditandai diantaranya adalah munculnya gagasan yang inovatif untuk membuat terobosan dan perubahan baik itu konten pendidikan agama Islam dalam hal ini dimensi kurikulum, maupun

[24] Wawancara dengan Kasi Pergurag Pasuruan, M. Yusuf, 24 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Terkait dengan nilai profesionalisme ini, jika menyangkut tataran kepemimpinan maka pemimpin yang profesional adalah memiliki jiwa amanah dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab. Jika kedua domain ini diwujudkan dalam bentuk aplikatif maka keyakinan ini akan memberikan kontribusi serta komitmen pada tugas dan fungsinya. Profesionalisme merupakan konsepsi yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jika saja sebuah lembaga menginginkan ketercapaian apa yang telah diprogramkan, maka harus meletakkan semangat dan sikap profesionalisme yang tinggi dan berkelanjutan. Profesionalisme yang tinggi akan berfungsi tidak hanya sebagai pelaku, akan tetapi mampu menjadi inspirasi bagi yang lain.

3. Berjalannya Evaluasi yang Simultan

Mayoritas lembaga mengindikasikan bahwa diantara keberhasilan program-program kerja yang direncanakan oleh Dinas Pendiikan adalah berjalannya evaluasi. Berdasarkan otonomi daerah, Pendidikan Agama Islam, Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren diberi kewenangan untuk melakukan perencanaan sesuai kebutuhannya (*school-based plan*).Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan untuk meningkatkan mutu pendidikan pesantren. Oleh karena itu, Pendidikan Agama Islam, Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren melakukan analisis kebutuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mutu dan berdasarkan hasil analisis kebutuhan mutu inilah kemudian membuat rencana peningktan mutu.

Untuk mengetahui atau mengukur keberhasilan program-program yang telah dilaksanakan, Pendidikan Agama Islam, Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren selalu melakukan evaluasi, khususnya evaluasi yang dilakukan secara internal. Evaluasi internal dilakukan oleh lembaga pendidikan pesantren untuk memantau proses pelaksanaan dan mengevaluasi hasil program-program yang telah dilaksanakan. Evaluasi semacam ini sering disebut evalusi diri.Evaluasi diri di Pendidikan Agama Islam, Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren harus dilakukan secara jujur dan transparan agar benar-benar dapat mengungkapkan informasi yang sebenarnya.Untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan atas perencanaan-perencanaan program mendatang.

Bagi Pondok Pesantren yang berada di Kabupaten Pasuruan, semua santri wajib mengikuti Ujian Akhir Kepesantrenan bagi kelas akhir.Ujian ini diperuntukkan sebagai syarat bagi siswa/santri yang bersangkutan untuk mengikuti Ujian Nasional pada sekolah formal, yang meliputi ujian praktek keagamaan sesuai jenjang sekolah formal santri/siswa, diantaranya hafalan-hafalan surat pendek, membaca kitab kuning, mengkafani mayit dan ilmu faraid. Sementara ujian tulis meliputi ilmu tajwid, fiqh dan bahasa Arab.[25]

[25] Wawancara dengan Nyai. Hj. Siti Aisyah, Pengasuh PP. KH.A.Wahid Hasyim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya evaluasi ini Pendidikan Agama Islam, Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren dapat mengetahui dimana letak kekurangan dan kelebihannya.Pada akhirnya lembaga pendidikan dapat merencanakan program-program baru dan mengambil suatu kebijakan yang tepat sasaran serta dapat meningkatkan mutu lembaga pendidikan disemua jenjang.Terkait dengan evaluasi ini ada dua bentuk diantaranya:

a. Evaluasi Secara Internal

Evaluasi secara internal ini telah diakui oleh beberapa kepala madrasah, diniyah, dan pondok pesantren. Sekalipun adanya anggapan bahwa pendidikan yang berada dilingkungan madrasah, diniyah, dan pondok pesantren dilaksanakan sangat tradisional, kurang konsen terhadap hal-hal yang bersifat administratif, namun berlahan tapi pasti mereka telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Tidak ada alaasn bagi lembaga pendidikan untuk hanya menjalankan roda kepemimpinannya secara sederhana, dan terkesan sangat eksklusif. Evaluasi yang merupakan bagian dari tugas para pimpinan ini menjadi sangat menentukan sebagai cerminan dalam pembuatan program dan perencanaan pada tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan analisis terhadap performa lembaga pendidikan yang ada, sebagaimana dikatakan kepala Pondok, kepala Madrasah, dan Kepala Diniyah hampir mayoritas dari mereka mengakui bahwa strategi-strategi pengembangan bisa ditentukan secara bersama-sama. Tentunya apapun program dan perencanaan yang telah dilakukan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjalan dengan baik akan dipertahankan dan dikembangkan. Sedangkan masalah-masalah yang muncul selama implementasi program dipecahkan secara bersama-sama.

Evaluasi secara internal ini dilakukan oleh semua warga madrasah untuk memahami kapabilitas para guru, kepala Madrasah, dan karyawan untuk selanjutnya diadakan penyesuaian pendekatan dengan mereka sehingga terbangun sinergisitas antara sesama dan semua warga madrasah. Dalam konteks evaluasi, selalu menjadikan anak-anak didik sebagai obyek dan subyek dalam pembangunan bangsa dan bernegara melalui transfer keilmuan. Konsekuensinya, kepala Madrasah, para guru, karyawan dan warga madrasah lainnya harus memahami karakteristik semua anak-anak didiknya. Hal ini penting untuk menentukan program dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan anak-anak didik. Salah satu karakterisitik anak-anak didik adalah input. Input ini merupakan istilah yang digunakan secara eksplisit oleh mayoritas warga madrasah. Hal ini terdeteksi dari indeks prestasi Ujian Nsional yang mereka dapatkan dari jenjang pendidikan sebelumnya. Hampir semua lembaga pendidikan selalu menghubungkan input yng rendah dari anak-anak didik dengan latar belakang sosio-ekonomi keluarga mereka. Dari evaluasi inilah, yang menjadikan apakah sebuah lembaga mengalami kemajuan ataupun mengalami kemunduran, tentu dalam konteks pedidikan yang secara holisitik, dan untuk selanjutnya dibangun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah konsepsi dan merancang-bangun agar kesuksesan tetap berpihak pada lembaga-lembaga yang berada di dalam naungannya.

b. Evaluasi Secara Eksternal

Tipe analisis evaluasi yang lain adalah secara eksternal. Semua *stakeholder* dari masing-masing lembaga akan selalu menganalisis pengaruh-pengaruh yang datangnya dari luar, teramsuk ekspresi-ekspresi wali peserta didik dan masyarakat, persaingan-persaingan yang ketat antar lembaga pendidikan, dan juga perubahan-perubahan dalam konteks sosial kemasyarakatan. Mayoritas orangtua dan masyarakat selalu mengidamkan anak-anaknya memiliki kemampuan secara Imtaq dan Imtek. Dua poin inilah yang menjadi *grand designer* bagi semua lembaga untuk menjadi daya tawar bagi kemajuan lembaga pendidikan agama Islam, Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren. Sehingga semua lembaga mampu memenuhi ekspektasi masyarakat. Dalam konteks kekinian, persaingan antara sekolah dan lembaga pendidikan berbasis agama; madrasah, dinyah, dan pondok pesantren telah berjaan secara sehat. Ketiga lembaga itu terus berbenah untuk mengejar ketertinggalan yang selama ini dirasakan. Sehingga saat ini bisa dipastikan bahwa lembaga-lembaga pendidikan bernasis agama; Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren bukan lagi lembaga kelas dua yang keberadaannya sekadar tambal sulam dan diposisikan sebagai *second line* setelah pendidikan sekolah umum. Namun, masyarakat telah merasakan betapa pentingnya pendidikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbasis agama; Madarsah, Diniyah, dan Pondok Pesantren, tak ayal lagi, saat ini telah menjamur pendidikan-pendidikan berbasis agama didirikan dan pemintanya sungguh luar biasa. Ini membuktikan bahwa posisi lembaga pendidikan berbasis agama telah memiliki daya tawar dan nilai jual tersendiri.

Persaingan sehat semacam ini akan menciptakan kerja sama antar sesama lembaga pendidikan yang berada dalam lingkup pendidikan baik agama maupun umum di Kabupaten Pasuruan. Sejalan dengan itu, seluruh kepala baik Dinas Pendidikan terutama Pergurag, dan juga kepala-kepala lembaga pendidikan, baik Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren selalu secara bersama-sama melakukan evaluasi teradap segala bentuk perubahan dan tantangannya. Analisis mereka terhada evaluasi internal dan ekstrenal membawa dan memaksa mereka untuk membentuk visi madrasah sekaligus strateginya. Telah terjadi konsultasi-konsultasi dinamis antar pimpinan lembaga dalam rangka memroses nilai-nilai analisis secara tekstual dan kontekstual yang selalu berjalan secara gradual dan tahapan-tahapan yang terstruktur.

4. Kepemimpinan Visioner

Lahirnya seorang pemimpin pada lembaga-lembaga pendidikan di Pasuruan, jelas tidak lepas dari peranan penting Dinas Pendidikan. Untuk membimbing dan mengawal seorang pemimpin atau kepala di lembaga pendidikan berbasis agama; Madarsah, Diniyah, dan Pondok

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pesantren, Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Kemenag Pasuruan yang secara intens selalu berkoordinasi agar mampu memunculkan pemimpin-pemimpin lembaga pendidikan yang visoner. Betapa tidak, posisi seorang kepala Madrasah, Kepala Diniyah, dan juga Pondok Pesantren sangat mempengaruhi keberlangsungan lembaga pendidikan yang mereka pimpin. Seorang kepala memiliki kontribusi yang penting, paling tidak terhadap tiga hal, yaitu;

a. Membangun Visi

Dalam membangun visi, seorang kepala atau pemimpin lembaga memiliki peranan penting yang tidak hanya membuat namun juga mewujudkan. Mayoritas warga lembaga yang diwawancarai menyatakan bahwa visi lembaga dibangun melalui rapat-rapat dengan seluruh warga lembaga, termasuk melibatkan mitra lembaga atau komite. Hal ini dinyatakan oleh Hurin Ain, bahwa untuk melahirkan visi Pesantren KHA. Wahid Hasyim Bangil, semua *stakeholder* terlibat aktif untuk melahirkan sebuah visi Pesantren:

Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Islami Unggul Dalam Imtaq & Iptek[26]

Visi di atas mengindikasikan bahwa lembaga Pesantren KHA. Wahid Hasyim mendesain anak-anak didik atau santri-santrinya memiliki kemampuan yang integral, antara keunggulan

[26] Hurin Ain, Lembaga Pendidikan KHA. Wahid Hasyim, Bangil, Pasuruan. 26 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari sisi keimanan dan ketaqwaan yang notabene urusan *ukhrawi*, sekaligus memiliki keahlian ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijadikan bekal kemampuan untuk memenuhi tuntutan duniawi. Hal ini sebagai salah satu contoh bahwa sekalipun pendidikan pesatren, namun memiliki jangkauan dan tanggungjawab yang tinggi untuk membekali para santrinya memiliki keahlian duniawi.Disamping itu, sebagaimana yang dinyatakan Pengasuh KH. M. Choiron Sjakur, bahwa poin keimanan dan ketaqwaan adalah pertama dan yang utama. Para santri harus memiliki keyainan dan nilai-nilai reegius, karena hal itu merupakan pondasi bagi masyarakat untuk melangkah pada proses dan prosedur lembaga pesantren. Sekaligus nilai-nilai tersebut diimplikasikan pula bahwa nilai-nilai keyakinan dan ketaqwaan akan menjadi filter bagi warga pesantren untuk beradaptasi, dan mengadaptir segala perubahan-perubahan dunia global. Dan inilah upaya yang telah dilakukan oleh semua pimpinan di lembaga Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren di Kabupaten Pasuruan.

b. Menyebarkan Visi

Disamping mengonsep bagaimana visi lembaga menjadi titik awal pembuatan rencana-rencana dan pola sasaran, yang tidak kalah pentingnya adalaha bagaimana semua warga madrasah memahami, memahamkan sekaligus menyebarkan substansi visi kepada semua orang; komite, wai anak-anak didik, dan juga anak-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak didik itu sendiri. Sebab tanpa memahami makna substansial dari sebuah visi, bisa diramalkan perjalan dan perwujudan ke arah target akan sulit diplikasikan. Oleh karenanya, *stakeholder* lembaga tidak akan jenuh-jenuhnya untuk menekankan kepada semua warga disaat-saat ada rapat atau pertemuan dalam skala besar, misalnya, disetiap mendatangkan wali anak-anak didik di awal tahun ajaran, rapat terbatas dengan para pengurus komite, rapat rutin dengan para guru dan karyawan. Pada kesempatan itulah, Kepala Madasah, Kepala Diniyah, dan juga Pengasuh Pondok Pesanten menjelaskan kepada para audiens tentang apa sesungguhnya visi yang harus dijadikan landasan dan *driver* semua pihak dalam rangka mewujudkan anak-anak didik yang beriman, bertaqwa, dan juga memiliki kemampuan secara ilmu pengetahuan sekaligus anak-anak didik tidak gagap teknologi.

Semua pihak percaya bahwa visi lembaga tidak hanya bisa diterima, akan tetapi ikut mengawal dan juga mewujudkannya, termasuk orang tua anak-anak didik. Mereka bisa mengingatkan pihak lembaga jika ada sesuatu rencana yang melenceng dari substansi visi lembaga.

Disinilah, Dinas Pendidikan dengan segala upayanya termasuk, barangkali hanya Kabupaten Pasuruan yang membuat tugas khusus terhadap kemajuan lembaga pendidikan agama, Madrasah, Dnyah, dan Pondok Pesantren dengan adanya Kasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perguruan Agama (Pergurag). Betapa telah disadarinya oleh semua pihak temasuk Dnas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, bahwa dari tahun ketahun peningkatan akan pendirian lembaga pendidikan yang berbasis agama; Madarsah, Diniyah, dan Pondok Pesantren cukup meningkat tinggi dibanding dengan pendirian umum. Hal inilah yang mendorong lahirnya Peraturan Bupati Pasuruan nomor 43 yang memuat tenang payung hukum yang melandasi seluruh kegiatan belajar-mengajar materi-materi keagamaan. Terkait dengan penyebaran atau meeka mengistilahkan *memasarkan visi* lembaga akan selalu mendapatkan suport dan arahan dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Kepala Dinas Kabupaten Pasuruan;

> *Disadari atau tidak, bahwa begitu urgenya memahami dan sekaligus memasarkan visi lembaga pendidikan kepada khalayak. Sebab semua kegiatan yang terkait dengan proses belajar mengajar sebuah lembaga pendidikan haruslah terikat dan bermuara pada sejauhmana visi bisa berjalan secara aplikatif. Visi merupakan grand designer-nya dari segala tujuan yang harus diwujudkan sebagai ciri khas sebuah lembaga.*[27]

Apa yang telah dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan adalah hal yang wajar. Sebab ciri pendidikan yang baik akan selalu berawal sejuahmana visi lembaga itu dibuat dan direalisasikan dalam program-program lembaga baik program jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang.

[27] Kepala Dinas Kabupaten Pasuruan, 25 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ekspektasi yang Tinggi

Yang tak kalahkan pentingnya adalah bagaimana *ghirah* atau keinginan yang kuat semua warga, baik itu *stakeholder-stakeholder* Dinas Pendidikan Pasuruan dan juga semua warga lembaga pendidikan. Merekas semua menyadari betapa baiknya, betapa bagusnya sebuah visi dicanangkan, jia tanpa adanya niat yang tulus, keinginan besar untuk mewujudkannya, dan juga dorongan lahir batin akan sia-sia saja. Ekspektasi yang tinggi diletakkan pada posisi yang tinggi pula sebagai bentuk harapan semua pihak dalam rangka mewujudkan lembaga pendidikan yang mampu melahirkan sosok generasi-generasi yang beriman, bertaqwa, dan juga dibekali dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebab, ada tujuan yang lebih besar dan holistik, manakala mayoritas lembaga pendidikan yang bebasis agama; Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren juga ikut mendesain anak-anak bangsa yang berkualitas unggul baik dari sisi relegius dan juga sisi kemampuan atau skill sebagai bentuk *problem solving* mayarakat global. Semangat yang tinggi ini telah dinaytakan oleh kepala Diniyah Pesantern KHA. Wahid Hasyim:

Citra intelektualitas dan juga kedalaman relegius selalu menjadi penekanan yang kayaknya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Distiap pertemuan baik formal maupun non-formal, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan selalu menekankan pentingnya mewujudkan visi sebuah lembaga. Dorongan dan semangat ini penting, tidak lain karea memang visilah yang menjadikan pendidikan itu berkualitas atau tidak, tentu tidak sekadar pajangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun benar-benar menjadi petunjuk arah semua kegiatan belajar-mengajar di semua lembaga pendidikan.[28]

Ekspektasi yang tinggi terhadap visi yang telah dicanangkan akan senantiasa menjadi landasan lahir batin dan juga inspirator kepada semua pihak untuk secara bersama-sama mewujudkannya. Tidak hanya kepala Dinas Pendidikan saja, namun dukungan semua pihak; kepala Madrasah, Kepala Diniyah, Pengasuh Pesantren, dan juga semua warga lembaga ikut juga menyukseskan dan mengawal tercapai terwujudnya sebuah visi lembaga yang telah disepakati bersama.

D. Bentuk-bentuk Kebijakan Tentang Pendidikan

1. Penghimpunan, pengelolaan dan penyajian data madrasah dan pondok pesantren;

   Penghimpunan terhadap lembaga-lembaga pendidikan baik itu pendidikan yang berbasis umum maupun berbasis keagamaan adalah sangat penting sebagai langkah penting untuk menginventarisir dan memetakan kinerja dan strategi kebiajakn yang diterapkan. Sehingga lembaga-lembaga pendidikan secara umum mampu berkembang dan memenuhi target yang telah direncanakan.

   Dari pemetaan lembaga-lembaga pendidikan tersebut bisa dipastikan setiap lembaga pendidikan akan mampu mengelola dengan baik dan

[28]kepala Diniyah Pesantern KHA. Wahid Hasyim, 26 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan standart-standart kependidikan Kabupaten Pasuruan. Penghimpunan dan pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren sebagai acuan untuk menentukan dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas Pendidikan di Kabupaten Pasuruan.

2. Pembagian tugas kepada Kepala Seksi untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

   Job discription terhadap kinerja para pegawai sangat menentukan dalam rangka memuwjudkan program-program yang telah direncanakan. Pembagian tugas ini sangat membantu implementasi agar semua program mampu mencapai sasaran. Termasuk adanya kepala Bidang Perguruan Agama (Pergurag). Pergurag menjadi satu-satunya kepala bidang yang lebih fokus menangani persoalan-persoalan pendidikan agama. Sehingga lebih *consern* untuk memajukan lembaga-lembaga yang berbasis keagamaan; Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren. Pembagian tugas oleh Dinas Pendidikan ini menjadikan seluruh tugas-tugas terkait dengan pendidikan agama bisa berjalan secara makasimal dan lancar.

3. Pengkoordinasian Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas;

   Untuk lebih mempermudah dalam menjalankan tugas-tugasnya, Kepala Dinas Pendidikan menjalin koordinasi dengan seluruh Kepala seksi, termasuk Pergurag, koordinasi ini tidak lain sebagai bentuk monitoring dan evaluasi kineja Kepala Seksi terhadap tanggungjawabnya masing-masing. Koordinasi selalu dilakukan oleh Kepala Dinas minimal dalam satu minggu sekali, hal ini untuk memastikan bahwa semua rencana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terutama jangka pendek dan rencana-rencana insidental dipastikan bisa berjalan, hambatan-habatan sekaligus tindakan sebagai langkah lanjutan dan rekomenadsi bisa diwujudkan.

4. Penilaian prestasi kerja Kepala Seksi dilingkungan Bidang sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;

   Diantara tugas pokok kepala Dinas adalah memonitoring sekaligus mengevaluasi sejauhmana tugas-tugas yang diberikan bisa diimplementasikan dengan baik. Salah satunya dengan memberikan penilaian terhadap kinerja Kepala Seksi terkait. Penilaian ini sangat penting untuk kelangsungan tugas-tugas yang telah dibebankan kepada semua Kepala Seksi. Berdasarkan pantauan dan penilaian, Kepala Seksi Pergurag, Ahmad Yusuf, selalu mendapatkan point yang baik. Hal ini dibuktikan dengan kemajuan dan perkembangan lembaga-lembaga pendidikan agama; Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren dalam kurun waktu yang singkat telah berkembang pesat. Tidak hanya telah dibuka lembaga-lembaga pendidikan agama baru, akan tetapi prestasi yang telah dicapai sungguh dirasa cukup memuaskan. Salah satunya adalah perkembangan Pondok Pesantren. Pondok Pesantren yang dalam perkembangannya tidak hanya membuka pendidikan non formal, akan tetapi Pondok Pesantren telah membuka diri lembaga-lembaga pendidikna formal; Madrasah baik mulai MI, MTs, dan juga MA bahkan ada Pondok Pesantren yang membuka lembaga pendidikan formal berbasis umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu SMK. Ha ini telah menjadi bukti bahwa kinerja Kepala Seksi Pergurag cukup mencapai prestasi yang patut dibanggakan.

5. Pengkoordinasian penerimaan siswa dan pengelolaan tenaga pendidikan dan kependidikan;

   Sebaran lembaga-lembaga pendidikan agama; Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren di Kabupaten Pasuruan yang cukup luas, maka untuk menghindari adanya lembaga yang melebihi kuota penerimaan siswa dalam PPDB, sementara bisa jadi lembaga yang lain kekurangan peserta didik, maka perlu adanya regulasi dan aturan agar PPDB berjalan secara seimbang. Regulasi ini penting untuk menyeimbangkan antar lembaga-lembaga pendidikan. Harus ada batasan-batasan konkrit dan tegas untuk mengatur sirkulasi agar sebaran penerimaan peserta didik baru bisa merata.

   Disamping itu, pengelolaan tenaga pendidikan perlu ada seleksi dan kontrol yang ketat. Hal ini untuk menghindari agar tidak terhadi penumpukkan pendidik di salah satu lembaga, sementara pada lembaga lain masih jauh dari harapan. Profesionalitas menjadi tujuan utama yang harus diterapkan sebagai persyaratan perekrutan pendidik baru. Terkait dengan hal ini, maka lembaga-lembaga pendidikan selalu bekerja sama dengan Dinas Pendidikan melalui Kepala Seksi Bidang Perguruan Agama (Pergurag). Pertmuan-pertemuan rutin selalu dilakuan oleh Pergurag dengan lembaga-lembaga pendidikan Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren dalam rangka pengelolaan baik itu perkembangan anak-anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didik maupun dalam rangka peningkatan kualitas pendidik di masing-masing lembaga.

6. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan pada RABATA, Madrasah dan Pondok Pesantren;

   Seksi Bidang Perguruan Agama (Pergurag) yang mendapat khusus ddari Dinas Pendidikan Pasuruan, maka jangkauan dan wilayah tanggungjawabnya cukup besar, hampir seluruh pola dan jenjang pendidikan mulai Raudlotul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Tuhfatul Athfal (TA), yang setingkat dengan Taman Kanak-kanak; Madrasah baik itu swasta maupun negeri dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Pondok Pesantren. Kompleksitas pendidikan yang tersebar di berbagai daerah menjadikan Pergurag memberikan tanggungjawab kepada para pengawas sebagai bentuk monitoring dengan berdasarkan julah dan jangkauan wilayah. Kinerja pengawas ini sangat urgen demi kemajuan lembaga-lembaga pendidikan yang berada di Pasuruan. Dari monitaring pengawas inilah, titik lemah dari masing-masing lembaga akan terungkap untuk selanjutnya disuport dan ditindaklanjuti. Solusi baik secara spisifik maupun umum menjadi kajian bersama *stakeholder* baik Kepala Dinas Pendidikan maupun pimpinan-pimpinan lembaga-lembaga pendidikan baik mulai dari RA, MI, Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren. Kepala Dinas melalui Kepala Seksi Bidang Pergurag akan selalu memastikan apakah pengawasan bisa berajalan dengan baik dan sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan rencana atau tidak. Inilah tupoksi Pergurag yang menjadikan pendidikan di Kabupaten Pasuruan menjadi sasaran dari seluruh program.

7. Penyusunan rencana pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;

   Terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk lembaga-lembaga pendidikan baik itu Madrasah, Diniyah, dan pondok Pesantren, Dinas Pendidikan masih merasa kurang maksimal. Hal ini disebabkan anggaran DIPA yang dikelola secara umum di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan masih terbilang terbatas. Namun Pemeritahan Kabupaten Pasuruan menyediakan anggaran Bantuan Operasioal Siswa/Santri Daerah. Tunjangan kesejahteraan bagi guru baik itu TPQ, Madrasah, Diniyah, dan guru-guru di Pondok Pesantren tetap menjadi prioritas. Dengan kesejahteraan itu, maka diharapkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan.

8. Penyebarluasan petunjuk pelaksanaan dan program pendidikan di madrasah dan pondok pesantren;

   Demi kemajuan dan perkembangan lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan Kabupaten Pasuruan, Dinas Pendidikan selalu memberikan pendampingan atas peraturan-peraturan yang diberlaukan terkait dengan kebijakan-kebijakan pendidikan, terutama pendidikan Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren. Petunjuk teknis atas peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten, maupun peraturan-peraturan dari pusat terkait dengan pendidikan. Dinas Pendidikan, melalui Pergurag dan pengawas pendidikan akan turun ke daerah-daerah untuk memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosialisasi sekaligus pelatihan baik itu mengenai implementasi kurikulum 2013 maupun kebijakan-kebijakan yang membutuhkan penjelasan secara formil. Penyebaraluasan petunjuk pelaksanaan program pendidikan di Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren sangat penting demi terlaksananya program pendidikan yang telah dirancang bersama.

9. Penyiapan dan penyelenggaraan ujian;

   Selama ini pelaksanaan ujian, terutama di Madrasah selalu dilaksanakan secara serentak oleh Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Kemenag dan LP. Ma'arif. Baik itu penyediaan soal maupun penentuan hari pelaksanaannya. LP. Ma'arif sebagai lembaga pendidikan yang berada di badan otonom NU, melalui Lembaga Pendidikan Ma'arif memang UN memiliki jumlah pendidikan baik itu Madrasah, Diniyah, yang paling banyak memiliki lembaga pendidikan diberbagai jenjang. Pengadaan soal terkait materi-materi keaswajaan. Dinas Pendidikan merasa terbantu dengan adanya asosiasi lembaga pendidikan swasta dengan adanya Badan Koordinasi Madrasah (BKM) yan akan menggordini segala bentuk kebijakan maupun kebijakan terkait perkembangan pendidikan yang berada pada wilayah tanggungjawabnya. Namun, sekalipun demikian, mereka tetap berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan sebagai induk pendidikan diberbagai jenjag dan berbagai sektor.

10. Pembinaan dan penginventarisasian serta pengklasifikasian madrasah dan pondok pesantren;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mengawal seluruh kebjakan baik pemerintah pusat maupun daerah, Dinas Pendidikan selalu melakukan pembinaan. Hal ini diperuntukkan agar segala program yang telah direncanakan dmasing-masing lembaga-lembaga bisa berjalan sesuai arahan dan petunjuk teknis yang telah disosialisasikan. Pembinaan dilaksanakan secara berkala untuk masing-masing lembaga, minimal sekali dalam satu semester. Kendati demikian, Dinas Pendidikan sering dimintai oleh lembaga-lembaga pendidikan tertentu untuk mengisi acara baik workshop maupun pelatihan-pelatihan tentang peningkatan mutu pendidikan, metodologi pembelajaran dan pengajaran maupun tentang implementasi kurikulum 2013. Pembinaan ini serasa berjalan dengan lancar dan terstruktur dengan baik.

Penginventarisasian terhadap lembaga-lembaga pendidikan Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren menjadi keharusan sebagai wujud nyata dari implementasi manajemen pendidikan yang baik. Inventaris ini digunakan untuk pemetaan atas peningkatan baik dari sisi jumlah maupun tingkat kemajuan lembaga. Semakin banyak dan berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan terutama berbasis keagamaan, maka bisa dipastikan akan mampu melahirkan para pemimpin yang memiliki sandaran kualitas religius dan domain keagamaan yang unggul. Apalagi, banyaknya pendidikan yang muncul hampir disemua sektor pondok pesantren. Pondok Pesantren kini tidak hanya mengedepankan kajian-kajian pendidikan non formal, namun sudah banyak Pondok Pesantren

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah membuka lembaga-lembaga formal bahkan ada dari mereka membuka pendidikan keahlian seperti STM dan SMK.

11. Pemberian bimbingan teknis edukatif dan administratif pada madrasah dan pondok pesantren;

    Dinas Pendidikan benar-benar mengawal perkembangan pendidikan baik Madrasah, Diniyah, maupun Pondok Pesantren. Hal dilakukan melalui program-program pendampingan dan bimbingan secara teknis edukatif dan administratif. Pemberian bimbingan ini sangat urgen demi kemajuan sebuah lembaga. Apalagi selama ini lembaga-lembaga pendidikan Madrasah, Dinyah, dan Pondok Pesantren dikesankan sebagai lembaga yang kelas dua, keberadaannya menjadi *second line* dari pendidikan umum yang selama ini dianggap sebagai lembaga pendidikan pilihan utama. Terkait dengan inilah, pemerintah daerah melalui Peraturan Bupati Nomor 43 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan benar-benar memaksimalisasi tentang adanya pendampingan dan memberikan edukasi bai itu kepada *stakeholder* maupu para pendidik agar memiliki profesionalisme baik dalam mengelola lembaga pendidikan maupun komptensi para pendidik. Jika saja dua hal itu telah tertangani dengan baik, maka kemajuan demi kemajuan terhadap lembaga pendidikan baik itu Madarsah, Diniyah, maupun Pondok Pesantren akan mudah diwujudkan. Secara proses dan kebijakan adminstratif menjadi pilar penting akan kemajuan sebuah lembaga pendidikan. Para kepala

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

madrasah benar-benar menjalankan tugas dan fungsi sebagai seorang manajer dan leader agar lembaga yang dipimpinnya bisa mencapai tujuan dari sebuah visi dan misi lembaga yang telah ditetapkan. Intinya, bentuk komunikasi sangat dibutuhkan antara kedua belah pihak, baik itu antara Dinas Pendidikan dengan *stakeholder* lembaga-lembaga pendidikan Madarsah, Diniyah, dan juga Pondok Pesantren.

12. Peningkatan SDM tenaga pendidik dan kependidikan, ketrampilan bagi madrasah dan pondok pesantren;

    Terkait dengan peningkatan SDM baik itu tenaga pendidik maupun kependidikan, Perbub Bagian Keenam Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Pasal 13 pada 2 dijelaskan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat [1] huruf e, Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi:

    a. Penyusunan perencanaan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan;
    b. Pelaksanaan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan;
    c. Pengelolaan tata usaha kepegawaian sesuai dengan ketenttuan berlaku;
    d. Pengelolaam administrasi tunjangan profesi pendidik bagi guru PNS/Non PNS;
    e. Pengelolaan sistem informasi manajemen dan pendataan kepegawaian;
    f. Pelaksanaan pembinaan dan penyelesaian permasalahan kepegawaian;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Pelaksanaan penilaian angka kredit (PAK) bagi jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan dan penilaian kinerja pegawai;
h. Pelaksanaan/penyebarluasan pedoman dan peraturan perundang-undangan tentang adiministrasi kepegawaian;
i. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan

Komponen undang-undang itu adalah payung huku sekaligus pedoman dinas pendidikan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia (SDM) bagi pendidik dan kependidikan.

13. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi dan lembaga lain dalam rangka pelaksanaan pendidikan di madrasah dan pondok pesantren;

    Menjalin kerja sama dengan lembaga lain termasuk lintas sektor adalah yang menjadi prioritas bagi dinas pendidikan. Hal ini mendorong kerjasaa yang positif dan produktif. Kerjasama yang dibangun jelas untuk meningkatkan mutu pendidikan dan skil atau keahlian peserta didik. Bagaimana anak-anak madrasah memiliki kemampuan untuk berkarya, maka memasukan ekstra kurikkuler yang terkait dengan keahlian, tataboga, elektro, perbengkelan, dan lain sebagainya, maka dinas pendidikan selalu menggandeng Balai Latihan Kerja (BLK). BLK yang selama ini selalu *consern* terhadap pelatihan-pelatihan kerja nyata yang membekali peserta didik untuk menyaurkan bakatnya scara intensif dan sealu memperhatikan tingkat kebutuhan masyarakat nyata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

14. Pelayanan Teknis di Bidang Pergurag;

    Secara teknis Dinas Pendidikan melalui Pergurag melakukan terobosan-terobosan untuk memotong alur kebijakan yang sebelumnya terkesan berbelit-belit. Satu pintu cukup untuk menyelesaikan pelayanan baik secara administrasi maupun jalur konsultasi oleh para *stakeholder* terkait dengan peningkatan mutu pendidikan Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren. Dengan adanya Bidang Perguruan Agama (Pergurag), maka seluruh kebijakan terkait dengan maju mundurnya pendidikan yang berbasis agama mulai dari TPQ, RABATA, MI, MTs, Madin, dan Pontren menjadi tanggungjawab Pergurag. Sebagaimana Pasal 3 ayat [1] huruf d, Pergurag mempunyai kewenangan diantaranya memberikan pelayanan teknis terkait dengan lembaga-lembaga pendidikan yang sebagaimana disebutkan di atas.

15. Penyusunan laporan hasil kinerja Bidang sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

    Sebagaimana pada bidang-bidang yang lain, Bidang Perguruan Agama selalu membuat laporan persemester. Laporan ini difungsikan sebagai evaluasi diri dan untuk selanjutnya diadakan pemetaan permasalahan yang urgen untuk dicari jalan keluarnya. Temuan-temuan yang menggambarkan kemajuan lembaga, maka disamping akan ditingkatkan juga dimohon dari lembaga untuk berbagi konsep dan tips kepada lembaga-lembaga yang lain. Begitu juga jika ada program-program yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhambat dan sulit untuk diimplementasikan akan menjadi kajian khusus untuk selanjutnya menjadi rekomendasi kedepan.[29]

16. Pelaksanaan tugas-tugas dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan

    Disamping tugas secara spisifik yang menjadi tanggungjawab Pergurag, ada tugas lain yang harus dilaksanakan oleh bidang Pergurag ini, diantaranya adalah tugas-tugas tambahan yang secara kondisional dan lebih pada insidental terkait dengan lembaga-lembaga pendidikan yang berada dalam wilayah wewenangnya.

[29] A. Yusuf, 25 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PEMBAHASAN HASIL TEMUAN

Sepanjang pengamatan peneliti, Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan memiliki keunikan yang tidak ditemukan di Dinas Pendidikan Kabupaten lain, diantaranya adalah keterlibatan secara aktif untuk mengawal pendidikan yang berbasis agama, termasuk madrasah, diniyah dan pondok pesantren.Ketiga macam pendidikan tersebut yang seringkali menjadi tanggungjawab dari Kementerian Agama.Bahkan Kabupaten Pasuruan memiliki Perda khusus yang menangani pendidikan yang berbasis keagamaan.[1]

A. Sistem Pendidikan Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren

1. Sistem Pendidikan Madrasah

Secara umum, lembaga pendidikan madrasah yang dkembangkan oleh pemerintahan Pasuruan adalah hampir sama sebagaimana yang telah dikembangkan lembaga pendidikan di seluruh Indonsia. Termasuk sistem kurikulum, yaitu:

[1] Perbup Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Struktur Kurikulum Madrasah Aliyah[2]

Tabel: 5.1.

Program Ilmu-ilmu Bahasa (IIB)

Komponen	Alokasi Waktu			
	Kelas XI		Kelas XII	
	Smt 1	Smt 2	Smt 1	Smt 2
A. Mata Pelajaran				
1. Pendidikan Agama Islam				
a. Qur'an dan Hadits	2	2	2	2
b. Aqidah dan Akhlaq	1	1	-	-
c. Fiqih	2	2	2	2
d. SKI	-	-	1	1
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2	2
3. Bahasa Indonesia	5	5	5	5
4. Bahasa Arab	4	4	4	4
5. Bahasa Inggris	5	5	5	5
6. Bahasa Asing	4	4	4	4
7. Matematika	3	3	3	3
8. Sastra Indonesia	4	4	4	4
9. Antropologi	2	2	2	2

[2]Sumber Data: Dokumentasi Pendma Kemenag Pasuruan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Sejarah	2	2	2	2
11. Seni Budaya	2	2	2	2
12. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	2	2	2	2
13. Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2	2	2
14. Keterampilan	2	2	2	2
B. Muatan Lokal	2	2	2	2
C. Pengembangan Diri	2*)	2*)	2*)	2*)
J u m l a h	46	46	46	46

2*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran

Program Ilmu-ilmu Sosial (IIS)

K o m p o n e n	Alokasi Waktu			
	Kelas XI		Kelas XII	
	Smt 1	Smt 2	Smt 1	Smt 2
A. Mata Pelajaran				
1. Pendidikan Agama Islam				
a. Qur'an dan Hadits	2	2	2	2
b. Aqidah dan Akhlaq	1	1	-	-
c. Fiqih	2	2	2	2
d. SKI	-	-	1	1
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2	2
3. Bahasa Indonesia	4	4	4	4
4. Bahasa Arab	3	3	3	3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Bahasa Inggris	4	4	4	4
6. Matematika	4	4	4	4
7. Sejarah	3	3	3	3
8. Geografi	3	3	3	3
9. Ekonomi	4	4	4	4
10. Sosiologi	3	3	3	3
11. Seni Budaya	2	2	2	2
12. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	2	2	2	2
13. Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2	2	2
14. Keterampilan/Bahasa Asing	2	2	2	2
B. Muatan Lokal	2	2	2	2
C. Pengembangan Diri	2*)	2*)	2*)	2*)
J u m l a h	45	45	45	45

2*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Program MIA

Komponen	Alokasi Waktu			
	Kelas XI		Kelas XII	
	Smt 1	Smt 2	Smt 1	Smt 2
A. Mata Pelajaran				
1. Pendidikan Agama Islam				
a. Qur'an dan Hadits	2	2	2	2
b. Aqidah dan Akhlaq	1	1	-	-
c. Fiqih	2	2	2	2
d. SKI	-	-	1	1
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2	2
3. Bahasa Indonesia	4	4	4	4
4. Bahasa Arab	3	3	3	3
5. Bahasa Inggris	4	4	4	4
6. Matematika	4	4	4	4
7. Fisika	4	4	4	4
8. Kimia	4	4	4	4
9. Biologi	4	4	4	4
10. Sejarah	1	1	1	1
11. Seni Budaya	2	2	2	2
12. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	2	2	2	2
13. Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2	2	2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

14. Keterampilan/Bahasa Asing	2	2	2	2
B. Muatan Lokal	2	2	2	2
C. Pengembangan Diri	2*)	2*)		2*)
J u m l a h	45	45	45	45

2*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran

2. **Sistem Pendidikan Diniyah**

Sistem pendidikan Diniyah yang dikembangkan di Pasuruan adala sejatinya untuk memenuhi target bagi peserta didik di lembaga formal yang tidak mondok di pondok pesantren. Adapaun kurikum yang diajarkan adalah sebagaimana berikut:

Kurikulum Madrasah Diniyah

Tahun Pelajaran 2016-2017[3]

Tabel: 5.2

KLS	NO	MATA PELEJARAN	FAN	JP	JML	WAKTU	
						MLM	SORE
	1	Safinah	Fiqih	4		2	2
	2	Alala	Akhlaq	2		1	1
	3	Fasholatan	Fiqih	1		1	
	4	Aqidatul Awam	Tauhid	2			1
1	5	Hidayatus Shibyan	Tajwid	1	12		1

[3]Sumber Data Penddidian Madrasah (Pendma) Kemenag Pasuruan 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	6	al-Amtsilah al-tashrifiyah	Shorof	2		2	1
	7	Sulam al-taufiq	Fiqih	4		2	2
	8	Tijan Darari/R. Haid	Tauhid/Fiqih	1			1
	9	al-Jurumiyah	Alat/ilmu Bahasa	3		1	2
	10	Washoya	Akhlaq	1		1	
	11	Tuhfatul Athfal	Tajwid	1		1	
2	12	al-Amtsilah al-Tashrifiyah	Shorof	2	12	1	1
	13	Fathul Qarib I (al-Bajuri)	Fiqih	4		3	
	14	al-Imrithi	Alat/Ilmu bahasa	3		1	2
	15	Qawaid al-Sharfiyah	Sharaf	2			1
	16	Jazariyah	Tajwid	1		1	
	17	Jawahir Kalamiyah	Tauhid	1			1
	18	al-Amtsilah al-Tashrifiyah	Sharaf	1		1	
	19	Arba'in Nawawi	Hadis	1			1
	20	Washoya	Akhlaq	1	12		1
	21	Fathul Qarib 2 (al-bajuri)	Fiqih	4		2	2
	22	Alfiyah 1	Alat/Ilmu Bahasa	3		1	2
4	23	Kifayatul Awam/ F. Majid	Tauhid	1	12	1	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	24	Ta'lim al-Muta'allim	Akhlaq	1			1
	25	Qawaid I'rab	Alat/Ilmu Bahasa	1			1
	26	kailani/marohul Arwah	Sharaf	1		1	
	27	waraqat	Ushul Fiqih	1			1
	28	Fathul Mu'in 1 (i'an]ah)	Fiqih	5		2	3
	29	Alfiyah2	Alat/Ilmu Bahasa	3		1	2
	30	Faroidul Bahiyah	Qawaid Fiqih	1			1
	31	Iddatul Farid	Faraid	1		1	
	32	Minhatul Mughis	Ilmu Hadits	1		1	
5	33	Bulughul maram I	Hadis	1	12	1	
	34	Fathul Mu'an	Fiqih	5		2	3
	35	Alfiyah 3	Alat/Ilmu Bahasa	3		1	2
	36	Faraidul Bahiyah 2	Qawaid Fiqih	1			1
	37	Salalimul Fudala'	Akhlaq	1		1	
	38	Durusul Balaghah	Balaghah	1		1	
6	39	Bulungul Marom 2	Hadits	1	12	1	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Sistem Pendidikan Pesantren**

Sistem pendidikan pondok pesantren di Pasuruan hampir sama yaitu, yang digunakan untuk mendalami kitab kuning adalah sistem *sorogan*, sistem *weton* dan sistem musyawarah;[4]

a. Sistem Sorogan[5]

Sistem ini biasanya diberikan kepada peserta didik-peserta didik yang telah menguasai pembacaan Al-Qur'an. Sistem ini merupakan sistem pengajian dasar di rumah-rumah, di langgar dan di masjid yang diberikan secara individual. Dalam sistem ini guru akan membaca beberapa baris Qur'an atau kitab-kitab bahasa Arab dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Jawa. Kemudian peserta didik mengulangi dan menerjemahkan kata demi kata sepersis mungkin seperti yang dilakukan oleh gurunya. Dalam sistem ini peserta didik diharapkan dapat menguasai tata bahasa Arab dan artinya dengan benar.

---

[4] Sebagaimana yang dinyatakan oleh KH. Chamzah Ahmad, Pengasuh Pondok Pesantren Besuk Putra I. Bahwa sistem *sorogan*, sistem *weton* dan sistem musyawarah masih relevan untuk menjadikan santri yang memilki kompetensi dan kemampuan dalam bidang *kutub al-safra'*, wawancara pada tanggal 05 Juni 2017

[5] Dalam bentuknya yang asli, cara belajar semacam ini dilukiskan oleh Aboebakar Aceh dalam *Sejarah Hidup KHA Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar* "guru atau kyai biasanya duduk diatas sepotong sajadah atau sepotong kulit kambing atau kulit biri-biri, dengan sebuah atau dua buah bantal dan beberapa jilid kitab disampingnya yang diperlukan, sedang murid-muridnya duduk mengelilinginya, ada yang bersimpul, ada yang bertopang dagu, bahkan sampai ada yang bertelungkup setengah berbaring, sesuka-sukanya mendengar sambil melihat lembaran kitab dibacakan gurunya. Sepotong pensil murid-muridnya itu menuliskan catatan-catatan dalam dalam kitabnya mengenai arti atau keterangan yang lain. Sesudah guru membaca kitab-kitab Arab yang gundul tidak berbaris itu, menterjemahkan dan memberikan keterangan yang perlu, maka dipersilahkan salah seorang murid membaca kembalimatan, lafadz yang sudah diterangkanya itu. Dengan demikian murid-murid itu terlatih dalam pimpinan gurunya, tidak saja dalam mengartikan naskah-naskah Arab itu, tetapi juga dalam mebaca bahasa Arabitu dengan mempergunakan pengetahuan ilmu bahasanya atau Nahwu. Demikian itu dilakukan bergilir-gilir dari pagi sampai petang, yang diikuti oleh murid-murid yang berkepentingan sampai kitab ini tamat dibacanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lebih lanjut M. Habib Chirzin menjelaskan istilah *sorogan* ini berasal dari kata *sorog* (Jawa) yang berarti menyodorkan. Sebab setiap peserta didik di madrasah atau santri di pesantren secara bergilir menyodorkan kitabnya dihadapan ustadz, guru, kiai atau badal (pembantunya).[6] Sistem ini tetap dipertahankan oleh madrasah, diniyah dan pondok-pondok pesantren karena banyak manfa'at dan faedah yang mendorong para santri untuk lebih giat dalam mengkaji dan memahami kitab-kitab kuning yang memiliki nilai tinggi dalam kehidupan manusia. Sistem ini membutuhkan ketekunan, kesabaran, kerajinan, ketaatan dan kedisiplinan yang tinggi dari santri.

Sistem sorogan amat intensif karena dengan sistem ini seorang santri dapat menerima pelajaran dan pelimpahan nilai-nilai sebagai proses *delivery of culture* di pesantren[7]. Metode ini dalam dunia modern dapat disamakan dengan istilah *tutorship* atau *menthorship*[8]. Metode pengajaran semacam ini diakui paling intensif, karena dilakukan seorang demi seorang atau secara individual dan ada kesempatan untuk tanya jawab secara langsung.[9]

---

[6] M. Habib Chirzin, *Agama dan Ilmu dalam Pesantren* (Jakarta;LP3ES,1983), 77. sebagaimana dikutip oleh H.M. Ridlwan Natsir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal, Pondok Pesantren ditengah Arus Perubahan* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar,2005), 111

[7] Marwan Saridjo dkk.,*Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia* (Jakarta: Dharma Bhakti,1980), 32.

[8] Peter Salim dalam *The Contemporary English-Indonesia Dictionary* menjelaskan Tutor adalah guru yang mengajar di rumah, guru privat, atau guru yang mengajar sekelompok murid di perguruan tinggi atau universitas. Sedangkan tutorship adalah jabatan atau tugas guru, pembimbing atau wali.

[9] Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Hj. Niswatin Cholili, Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah Roudlotul Aqo'idi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan kitab (materi) yang dikaji dengan system sorogan dari dahulu saampai sekarang hamppir sama, yaitu Nahwu / Sharaf, Fiqh, Tauhid dan Tasawuf. Pelaksanaan sistem sorogan ini, antara guru dan peserta didik harus sama-sama aktif, oleh karena itu ketika pelajaran sedang berlangsung maka terjadi interaksi belajar mengajar secara langsung, tatap muka. Sebagai seorang guru, kiai haru aktif dan selalu memperhatikan kemampuan santri dalam membaca dan memahami kitab, dan dilain pihak santri harus selalu siap untuk menjawab pertanyaan yang di ajukan oleh kiai ataupun santri lain.

b. Sistem weton atau bandongan

Adapun sistem pengajaran yang lain adalah sistem *weton* atau *bandongan*. Sistem ini merupakan sistem utama di lingkungan pesantren. Dalam sistem ini sekelompok peserta didik (5-500 orang) mendengarkan seorang guru yang membaca, menerjemahkan, menerangkan dan seringkali mengulas buku-buku Islam dalam bahasa Arab. Setiap peserta didik memperhatikan bukunya sendiri dan membuat catatan-catatan (baik arti maupun keterangan) tentang kata-kata atau buah pikiran yang sulit. Bagi santri yang sudah mencapai ilmu yang cukup tinggi atau biasa disebut santri senior, biasanya masuk dalam anggota kelas musyawarah. Dalam kelas ini sistem pengajarannya sangat berbeda dengan sebelumnya. Para santri harus mempelajari sendiri kitab-kitab yang ditunjuk oleh ustadz, guru atau kiai. Kemudian ustdaz, guru atau kiai akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminpin kelas musyawarah ini seperti dalam sebuah seminar dan biasanya lebih banyak dalam bentuk tanya jawab atau diskusi. Sistem ini hampir seluruhnya diselenggarakan dalam bahasa Arab dan merupakan latihan bagi santri untuk menguji ketrampilannya dalam menyadap sumber-sumber argumentasi dalam kitab-kitab Islam klasik.[10]

Di hampir madrasah, madrasah diniyah dan pondok pesantren menerapkan sistem ini. Sistem yang biasa disebut bandongan ini dengan istilah sistem *weton* atau *halaqah*, Yaitu dimana para santri mengikuti pelajaran dengan duduk disekeliling kyai atau dalam ruangan (kelas) dan kyai menerangkan materi pelajaran secara kuliah. Para santri menyimak kitab masing-masing dengan membuat catatan atau ngesahi (Jawa; mengesahkan), dengan memberi catatan pada kitabnya, untuk mensahkan bahwa ilmu itu telah diberikan oleh usdaz, guru atau kiai.[11]

c. Sistem Musyawarah

Sistem ini lebih pada mengasah tingkat kematangan peserta didik atau santri di dalam penguasaan materi yang telah diajarkan oleh ustdaz, guru atau kiai. Sistem ini dilaksanakan satu minggu sekali dan sistem berkelompok. Sebelumnya musyawarah ini

[10] Disarikan dari artikel *Tradisi Pesantren* , oleh Erryza Susilo. Tanpa tahun. Dapat diakses di http//www//google.co.id. Ulasan ini diambil dari buku karangan **Zamakhsyari Dhofier**, dengan judul *Tradisi Pesantren ; Study Tentang Pandangan Hidup Kyai* Yang diterbitkan oleh LP3ES rahun 1994. buku ini merupakan terjemahan dari Desertasi pengarang untuk memperoleh gelar Doktornya dalam Anthropologi Sosial dari Australian National University, Canberra tahun 1980

[11] Ridlwan Natsir, 2005, 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan terlebih dahulu para peserta didik atau santri diberikan pertanyaan yang harus dijawab saat musyawarah dilakukan. Sistem ini dalam konteks NU dinamakan *bahtsul masa'il diniyah.*[12]Kajian-kajian kitab yang disampaikan dalam sistem pendidikan diniyah dan pondok pesantren diantaranya adalah:

Kitab Acuan Kurikulum Pondok Pesantren 2017[13]
Tabel: 5.3

No	Nama-nama Kitab	Kitab Pelajaran
1	Hadits	1. Arba'in Nawawi 2. Mukhtarul Ahadits
2	Ilmu Tajwid	1. Hidayatu al-Shibyan 2. Tuhfatul Athfal 3. Hidayatul Mustafid
3	Ilmu Tauhid	1. Sullamud Diniyah 2. Khoridatul Bahiyah 3. Tijanud Darori 4. Jawahirul Kalamiyah 5. Fathul Majid
4	Ilmu Akhlak	1. Alala 2. Washoya 3. Ta'limul Muta'allim

[12] A. Farid, Dewan Pendidikan Pasuruan, mengatakan bahwa sistem ini menjadi ajang untuk mengasah kematangan bagi peserta didik atau santri. Sebab, disamping mereka harus menguasai referensi yang mayoritas kitab kuning, mereka juga harus memilki kemmapuan untuk menyampaikan secara sistematis dan argumentatif.
[13] Sumber Kasi Pondok Pesantren (Pontren) Kementerian Agama Ri Kabupaten Pasuruan 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		4. Salalim al-Fudlola’
5	Fiqh	1. Fasholatan 2. safinatun Naja 3. Sullam Taufiq 4. Fathul Qorib 5. Fathul Mu’in 6. Fathul Wahab 7. Kifayatul Akhyar
6	Qoidah Fiqh	1. Faroidul Bahiyah
7	Ilmu Mawaris	1. Iddatul Faridl
8	Ushul Fiqh	1. Waroqot 2. Tashilutturuqot
9	Ilmu Nahwu	1. Nahwu wadlih 2. Jurumiyah 3. Imrithi 4. Alfiyah
10	Ilmu Shorof	1. al-Amtsilat al-Tashrifiyah 2. Qoidah I’lal Natsar 3. Qowaidusshorfiyah 4. Qowaidul I’rab
11	Ilmu Balaghoh	1. Durusul Lughah
12	Ilmu Hadits	1. Mushtholah Hadits
13	Ilmu Tafsir	1. Itmamud Diroyah
14	Muhafadzoh	1. Alala 2. Aqidatul Awam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		3. Khoridatul Bahiyah 4. Amtsilah Tashrif 5. al-Imrithi 6. Alfiyah

Kitab-kitab tersebut menjadi materi pokok bagi proses kegiatan belajar mengajar di madarsah diniyah dan juga pondok pesantren. Dalam penyampaiannnya seorang ustdaz, guru atau kiai memakai sistem baik itu sorogan, weton, bandongan dan musayawarah. Kitab-kitab itu diajarkan sesuai dengan jenjang dan tingkatannya. Bagi madrasah diniyah atau pesantren, mengajarkan sesuai kurikulum yang sejak dulu ditetapkan oleh para *stakeholder* bahkan kurikulum ini masih dilesatrikan hingga kini. Kalau dikatakan berkembang hanya pada sistem pembelajaran yang kadang-kadngan dikembankan oleh ustadz, guru atau kiai. Kendati tidak pernah berubah, namun kurikulum seperti ini diangap masih relevan dan signifikan dalam mencapai kualitas pendidikan madrasah diniyah dan pondok pesantren.[14]

B. Langkah-Langkah Strategis Peningkatan Mutu Pendidikan Agama

Rumusan mutu sering digunakan mengacu kepada kualitas produk yang dihasilkan suatu atau serangkaian aktivitas. Konsep mutu yang menjadi perioritas Dinas Pendidikan Pasuruan tersebut menghantarkan kesadaran *stakeholder* untuk mampu mewujudkannya. Karena kualitas mutu menyakup

[14]Sebagaimana Pondok Pesantren Besuk yang diasuh oleh KH. Chamzah Ahmad. Bahwa kitab-kitab yang dikaji hampir disemua pondok itu memiliki kesamaan terutama di materi-materi dasar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keseluruh aspek terutama pengelolaan pendidikan dan inilah yang menjadi kosnepsi Joremo S. Arcaro (2005). Pada pemahaman yang berbeda dalam menilai mutu pendidikan. Sebagian orang berpendapat bahwa pendidikan yang bermutu ialah pendidikan yang menghasilkan lulusan yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Bila konsumennya dunia industry, maka pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang menghasilkan keluaran yang terpakai di dunia industry. Upaya memenuhi tuntutan tersebut diwujudkan dengan pengelolaan pendidikan sistem ganda (*dual system*).

Sistem pendidikan yang berkembang dewasa ini memungkinkan pengelolaan pendidikan dengan berbagai model. Sistem pendidikan di Indonesia misalnya memungkinkan tumbuh dan berkembangnya berbagai jenis pendidikan seperti pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan kedinasan, pendidikan agama, dan sebagainya. Sistem pendidikan di Negara maju (Hough, 1984) memberikan peluang terhadap model pendidikan yang beragam. Mereka menggunakan standar mutu untuk mengendalikan kualitas pendidikan secara nasional (*national accesment*). Pendidikan akan dikatakan bermutu jika hasil pengukuran perolehan peserta didik telah mencapai atau memenuhi standar yang digunakan.[15]

Berdasarkan latar belakang di atas, maka menjadi penting bagi penulis untuk meneliti dan mengungkap lebih jauh lagi dan mendalam (*indepth*) terhadap peningkatan kualitas pendidikan madarsah, pesantren Pondok dan

[15] Marzawi, Komunikasi dan Humas Ala Islam I Studi Tentang Silaturrahmi Dalam Mendukung MBS (Jambi : Pasca Sajana IAIN Sulthan Thoha Saifudin Jambi, 2008, 140-141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diniyah di lingkungan Pasuruan dalam menghadapi modernisasi sebagai upaya pencarian strategi dalam meningkatkan kualitasn pendidikan diseluruh aspek, setidaknya bagi Pergurag menjadi suatu masukan dalam rangka mengetengahkan sistem pendidikan yang dinamis dengan memadukan (integrasi) antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum terhadap lembaga yang ada di Pasuruan. Hal ini sebagai langkah adaptif agar madrasah, pondok pesantren dan diniyah yang notabene sebagai lembaga pendidikan Islam tertua tidak tenggelam oleh zaman, yang keberlangsungannya selalu menuntut perubahan terlebih dalam bidang pendidikan yang menjadi tema sentral dalam mengangkat kehidupan manusia ke arah yang lebih baik.

Dala rangka mewujudkan cita-cit lembaga yang berkualitas, aka Dinas Pendidikan terutama melalui program-program kerja Kasi Perguuruan Agama membuata beberapa strategi sebagi langkah dan upaya untuk meningkatan mutu pendidikan Agama di Kabupaten Pasurua, diantaranya:

1. **Strategi Prakondisional**

   Salah satu strategi yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan adalah strategi pra-kondisional, yang meliputi membangun dan menegakkan kedisiplinan di kalangan warga lembaga pendidikan yang meliputi; pendidik, pembina, komite, orang tua didik, dan juga semua anak-anak didik, serta tidak jenuh-jenuhnya memberikan motivasi mereka. Di bawah kendali Dinas Pendidikan dengan mengeluarkan peratuarn-peraturan tingkah laku baru untuk diterapkan kepada seluruh anak-anak didik baru demi mendisiplinkan mereka. Peraturan baru itu menerapkan sistem poin, yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana setiap poin anak-anak didik yang melanggar tata aturan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Diantaranya yang harus diperhatikan pihak lembaga adalah bahwa setiap kali anak-anak didik masuk lembaga pendidikan terutama Madrasah harus dalam kondisi yang rapi, seragam lengkap sesuai dengan jadualnya, bersepatu hitam, dan lain sebagainya. Sehingga pihak madrasah tidak segan-segan menyuruh kembali anak-anak didik untuk pulang atau kembali ke Pondok agar segera berganti seragam atau bersepatu.

Respon anak-anak didik terhadap tata aturan dalam rangka menertibkan sebelum mereka mengenal jauh tentang kedisiplinan lembaga cukup bervariasi. Mayoritas mereka merasa beban diawal-awal masuk, namun akhirnya mereka akan terbiasa. Hal ini telah dinyatakan salah satu anak-anak didik, Ahmad Rifqy:

> *Kedisiplinan lambat laun meningkat tajam berkat penerapn poin bagi kami-kami yang melanggar aturan, walau hal ini berat bagi kami yang masih baru. Akan tetapi kami percaya, dengan upaya ini kami semua akan bisa merubah dan berbenah untuk lebih disiplin dan baik lagi.*[16]

Terkait dengan upaya prakondisional yang menekankan pada kedisiplinan ini, Kepala Dinas Pendidikan selalu mengingatkan para *stakeholder* lembaga pendidikan untuk tidak menindak anak-anak didik yang melanggar peraturan ini dengan cara kekerasan, dan hukuman fisik.[17] Sebab diakui oleh pihak Dinas bahwa penghukuman secara fisik rawan,

[16] Ahmad Rifqy, salah satu peserta didik dari Madrasah Aliyah KH.A. Wahid Hasyim, Pasuruan
[17]Tentang hukuman yang diterapkan di lembaga pendidikan ini cukup variatif.Jika di Madrasah Tsanawiyah KH.A. Wahid Hasyim adalah membeersihkan halaman Madrasah. Sementara di lembaga Pendidikan Pondo Besuk dengan cara menghafal surat-surat pendek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak lembaga akan menjadi sasararn tembak baik bagi LSM maupun orang tua sendiri, yang tidak jarang akan berujung pada pemolisian yang bersangkutan.

2. Strategi Akademik

Untuk meningkatan kualitas dan mutu pendidikan baik di Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan memfokuskan pada peningkatan akademik anak-anak didik melalui serangkaian seremonial yang terencana . Seperti mengadakan lomba dan olimpiade anak-anak didik tingkat Kabupaten. Materi yang dilombakan tidak hanya materi umum, tapi juga materi-materi keagamaan dan kepesantrenan, hampir semua lembaga memberikan kontribusi pada kategori penetapan strategi-strategi akademik. Strategi-strategi tersebut meliputi alokasi waktu belajar tambahan, implementasi kurikulum 2013, mengadakan kelas-kelas pendalaman materi dan intensifikasi belajar, serta mengimplementasikan program “pembibitan” (pengembangan bakat). Strategi ini mencerminkan perhatian Dinas Pendidikan, terutama Pergurag terhadap pengembangan aspek kurikululum dan instruksional dari lembaga-lembaga. Sejalan dengan strategi-strategi ini, Dinas Pendidikan berinisiatif meningkatkan kapasitas para pendidik dalam proses profesional mereka. Waktu belajar-mengajar tambahan juga dialokasikan, sebagaimana keterangan kepala Madrasah Aliyah KHA.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahid Hasyim, untuk memecahkan masalah pencapaian target kurikulum. Ia mengatakan:[18]

> *Untuk meningkatkan akademik, kami sudah menerapkan kurikulum 2013 atau K-13. Ini sebagai bukti bahwa kami selalu open mind untuk melakukan perubahan baik dari sisi akademik maupun non-akademik.*[19]

Terkait dengan penerapan kurikulum 2013 ini telah disadari oleh semua pihak termasuk Dinas Pendidikan Pasuruan. Tuntutan masa depan bangsa semakin kompleks, diantaranya masih ditemukannya kenakalan remaja, tawuran antar anak-anak didik, narkoba, kecurangan dan *nyontek* saat ujian adalah hal-hal yang menjadi pemikiran masyarakat banyak termasuk dunia pendidikan. Maka kurikulum 2013 yang menekankan pada pembangunan karakter anak-anak didik. Pengembangan kurikulum di lembaga pendidikan apapun harus memandang anak-anak didik sebagai pewaris budaya bangsa yang kreatif dan budaya positif.

Banyak terobosan dari Dinas Pendidikan untuk memberikan materi-materi tambahan sebagai wujud peran dan kepedulian terhadap dunia pendidikan, diantaranya mewajibkan semua lembaga mengadoptir materi BTQ (Baca Tulis Qur'an). Inisiatif ini melahirkan kreatifitas seua pengajara dan pendidik untuk memberikan wawasan terhadap anak-anak didik untuk memiliki kemampuan dari sisi baca tulis al-Quran. Sehingga semua pengajar dan pendidik wajib berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk pengawas di masing-masing Satminkal. Penekanan ini

[18] Wawancara tanggal 25 Mei 2017
[19] Wawancara dengan Ahmad Wildan Khumaini Amrullah, 24 Mei 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkait dengan mayoritas masyarakat Pasuruan adaah muslim yang religius, hal ini dibuktikan dengan menjamurnya Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren.

3. Strategi Non-Akademik

Hampir semua pimpinan lembaga percaya akan pentingnya prestasi non-akademik. Karena itu, selain strategi akademik, Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan menetapkan strategi non-akademik. Beberapa responden mendukung kategori ini, yang meliputi program ekstra-kurikuler, program Imtaq, dan pengabdian masyarakat.Program ekstra-kurikuler bebas dipilih oleh anak-anak didik sepanjang kegiatan tersebut merupakan bentuk eksplorasi bakat dan minat anak-anak didik. Menurut Nur Aini Mustafidah,[20]anak-anak didik memilih program yang sesuai dengan minat dan waktu mereka. Program yang ditawarkan mencakup kegiatan fisik, termasuk olahraga, non fisik, termasuk pengembangan keagamaan dan seni serta kepramukaan. Dibidang olah raga, anak-anak didik dapat memilih sepak bola, bola voli, atau bola basket, dan pencak silat, sedangkan dalam bidang seni mereka dapat memilih kaligrafi Islam atau melukis, gambus, banjari. Meskipun pihak Dinas Pendidikan dianggap kurang memperhatikan program ekstra-kurikuler baik dari sisi anggaran maupun evaluasi, namun prestasi anak- anak didik di masing-masing lembaga pada aspek tersebut, khususnya dalam bidang olah raga, banjari, gambus sangat baik. Seperti diakui oleh anak-anak didik yang

[20]Salah satu guru di Madrasah Aliyah KH. A. Wahid Hasyim, Pasuruan, mengatakan bahwa semua peserta didik wajib mengikuti ekstra kuirkuler sesuai bakat dan minatnya. Olehnya perlu mengikuti seleksi sebelum benar-benar mengikutinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diwawancarai, mereka juga ada yang menjadi juara sepak bola dan bola basket, qira'ah, kaligrafi dalam kompetisi-kompetisi lokal.[21]

Program-program Imtaq merupakan strategi non-akademik lain yang semakin maju dirasakan masing-masing lebaga semenjak Dinas Pendidikan melalui Pergurag konsen dalam hal perkembangan Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren. Ahmad Yusuf mengatakan: Setiap dua minggu, kami mengadakan 'tadarus' (pembacaan al-Qur'an). Dan pada setiap hari atau perayaan agama, kami berkumpul untuk bersama-sama mendengarkan ceramah agama. Pada bulan Ramadhan, kami juga menyelenggarakan program-program khusus untuk anak-anak didik.[22]

Program religius lainnya adalah Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) yang digekar oleh Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Kemenag yang dilombakan antar anak-anak didik semua lembaga pendidikan baik yang umum maupun berbasis agama diberbagai jenjang. Nuansa religius di hampir semua lembaga pendidikan di Kabupaten Pasuruan, telah meningkat sejak Kepala Dinas Pendidikan mengadakan terobosan terhadap lembaga-lembaga pendidikan terutama terbentuknya Kasi Bidang Perguruan agama (Pergurag). Hal ini sejalan dengan kenyakinan pimpinan-pimpinan lembaga pendidikan baik agama maupun umum dan anggota komunitas sekolah lain akan pentingnya pembinaan keimanan dan ketakwaan pada diri anak-anak didik. Salah seorang dari anak-anak didik mengatakan:

---

[21] Sebagaimana wawancara dengan Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan

[22] Hasil wawancara dengan Ahmah Yusuf, Kepala Bidang Pergurag, Dinas Pendidikan, Pasuruan, 24 Mei 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *Kami mendukung gagasan Bapak Kepala Dinas Pendidikan untuk membangun moralitas agama di Madrasah ini. Sehingga, di Madrasah ini tidak ada kenakalan remaja, tawuran atau hak-hal lain yang bisa menurunkan derajat moral dan akhlak yang luhur.*[23]

Dinas Pendidikan juga menerapkan program pengabdian masyarakat untuk membekali anak-anak didik dengan pengalaman-pengalaman sosial dan kepemimpinan yang dapat membantu mereka dalam kehidupan di masa mendatang. Menurut Ahmad Mustofa, program ini sangat membantu anak-anak didik untuk mengembangkan bakat dan minatnya dalam rangka membekali diri untuk persiapan masa depan. Sekalipun kami adalah anak-anak didik Diniyah, yang selama ini dicitrakan sebagai pendidikan apa adanya, tetapi kami telh mengenal apa tiu kepemimpinan, bahkan soal tata kelola perkoperasian kami telah berkembang cukup luar biasa, diantaranya adalah yang dilakukan anak-anak didik Diniyah Sidogiri.

Kemampuan non akademik ini justru menentukan kesiapan dan kesigapan anak-anak didik dalam rangka mencari bentuk yang cocok sesuai dengan naluri psikologis yang selanjutnya dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan yang telah akomodir masing-masing lembaga. Tentu hal ini akan disesuaikan dengan karakter dan landasan filosofis visi dan misinya masing-masing lembaga di lingkungan pendidikan Kabupaten Pasuruan.

---

[23] Sebagaimana obrolan dengan Fathiyyah Jazilah, Salah satu santri Pondok Pesantren Putri Besuk, 25 Mei 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Strategi Pendukung

Untuk mendukung strategi-strategi di atas, Dinas Pendidikan Pasuruan menetapkan beberapa strategi lain untuk memfasilitasi perubahan yang direncanakan, diantaranya adalah meningkatkan fasilitas lembaga-lembaga agama dan membangun kekuatan ekonomi di kalangan anak-anak didik dan para santri melalui pemberdayaan koperasi di lembaga masing-masing.

Strategi-strategi akademik dan non-akademik tidak akan berfungsi dengan baik jika fasilitas-fasilitas pendukung tidak ditingkatkan. Itulah mengapa Dinas Pendidikan berusaha keras untuk meningkatkan fasilitas, meskipun sulit baginya untuk melaksanakannya karena hampir dana dimasing-masing lembaga sangat terbatas. Karena itu, sebagaimana diindikasikan sebelumnya, Dinas Pendidikan berusaha mencari sumber dana baik dari DIPA maupun melalui peningkatan sumber daya yang ada. Karena disinilah titik lemah dari Dinas Pendidikan, yaitu soal dana, karena memang Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan ini lebih pada pengembangan perencanaan secara program. Hal ini disadari oleh Ahmad Yusuf, Kabid Pergurag:

> *Kami menyadari bahwa pendanaan merupakan masalah yang dihadapi Dinas Pendidikan. Pimpinan lembaga pendidikan harus mencari cara bagaimana supaya mendapatkan dana tanpa membebani orang tua. Dan ini semua demi pengembangan madrasah, diniyah, dan Pondok Pesantern dan untuk mengurangi beban finansial pada anak-anak didik. Khusus untuk pesantren, mungkin hal ini tidak begitu bermasalah. Hal ini dikarenakan dari masing-masing pengasuh dan pengurus selalu "cerdas" mencari*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terobosan-terobosan untuk pengembangan finansial melalui pemberdayaan ekonomi pesantren.[24]

Terobosan secara finansial khususnya digunakan untuk meningkatkan fasilitas lembaga, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Selama masa jabatan kepala Dinas Pendidikan yang sekarang, peningkatan fasilitas menjadi salah satu prioritas utamanya. Kasi Bidang Pergurag, Ahmad Yusuf, mendorong kepada seluruh lembaga untuk meningkatkan daya saing dalam hal pembenahan dan pengadaan fasilitas internet di lembaga-lembaga pendidikan termasuk Pondok Pesantren. Hal ini terkait dengan perkembangan zaman yangsecara global menjadikan multimedia sebagai patron utama.

C. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pendidikan Agama

Merujuk pada Pasal 11 ayat [1], melalui Pergurag untuk mengimplementasikan terkait dengan program-program pendidikan madrasah, diniyah, dan pondok pesantren sebagaimana Peraturan Bupati adalah:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pergurag[25]

[24] Hasil wawancara dengan Ahmah Yusuf, Kepala Bidang Pergurag, Dinas Pendidikan, Pasuruan, 24 Mei 2017

[25] Hal ini telah dijelaskan secara jelas dalam Perbup Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tata kelola lembaga-lembaga pendidikan terutama madrasah, diniyah, dan pondok pesantren memiliki peran yang sangat penting di dalam meraih sebuah lembaga pendidikan yang baik dan mampu mengantarkan anak-anak didik yang memiliki kualitas keagamaan, sosial, dan akhlak yang baik, tentu harus melalui manajemen yang baik dan profesional. Sehingga kebijakan-kebijakan sangat perlu dirumuskan secara cermat dan akurat. Perumusan ini telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan kabupaten Pasuruan sebaagi institusi yang memiliki kewenangan atas keberangusngan pendidikan yang berada di wilayah tanggungjawabnya, termasuk lembaga pendidikan madrasah, diniyah, dan pondok pesantren. Kebijakan teknis ini sangat menentukan atas berjalannya hampir semua lembaga pendidikan yang selama ini dikembangkan. Kebijakan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan melalui Pergurag terhadap lembaga-lembaga pendidikan terkait dengan hal-hal teknis, diantaranya; 1) penentuan pagu bagi lembaga pendidikan yang ditentukan berdasarkan ketersediaan ruang belajar dan juga kebutuhan rombongan kelas, 2) pendistrubusian guru-guru bagi madarah-madarash yang secara kuantitas memiliki anak-anak didik yang cukup besar akan tetapi tidak didukung dengan ketersediaan pendidik yang memadai, dan 3) memasukan sebagaian materi yang harus diterapkan di masing-masing lembaga-lembaga baik itu madrasah, diniyah, dan pondok pesantren sebagai bentuk penguatan karakater masyarakat Pasuruan secara umum dalam bentuk materi Baca Tulis al-Qur’an (BTQ) baik sekolah maupun madarsah. Disamping penerapan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BTQ masing-masing lembaga baik itu sekolah maupun madrasah wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan madrasah diniyah sebagai bentuk pengenalan dan pendalaman materi-materi agama melalui kitab-kitab klasik.

2. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan pada TPQ, Madrasah, dan Pondok Pesantren.[26]

   Koordinasi antar pengawasa disetpa lembaga pendidikan menjadi sangat penting terkait dengan evaluasi dan tindaklanjut atas peningkatan mutu dan kualitas pendidikan baik di Madarsah, Diniyah, dan Pondok Pesantren. Dari pengawas inilah, seluruh aktifitas dan kegiatan yang telah diprogramkan oleh *stakeholder* baik Dinas Pendidikan maupun rencana kerja madrasah bisa diukur tingkat ketercapaiannya dengan baik.

3. Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan program pendidikan di TPQ, Madrasah, dan Pondok Pesantren;

   Setiap program kegiatan di masing-masing lembaga pendidikan baik itu Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren telah dibuatkan rancangan dalam bentuk petunjuk pelaksanaan yang telah dijadualkan sesuai dengan kebutuhan (Tabel: 2). Kisaran kegiatan bisa mencakup bulanan, tribulan, dan satu semester. Program-program ini bisa diakses oleh lembaga pendidikan baik itu madrasah, diniyah, dan pondok pesantren dengan kesesuaian secara silmultan.

[26] Secara khusus tentang pembelajaran al-Quran ini, Dinas Pendidikan Pasuruan dengan mengacu pada Perda Pasuruan 2015 tentang Baca Tulis Qur'an ini sebagai acuan bagi semua lembaga pendidikan baik umum maupun berbasis agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pelaksanaan peningkatan mutu tenaga pendidik pada madrasah pondok pesantren dan TPQ;

   Terkait dengan peningkatan mutu pendidikan yang telah diupayakan semaksimal mungkin, maka Dinas Pendidikan Pasuruan memberikan bekal dengan mengadakan workshop atau Bimtek dalam rangka meningkatkan kualitas pendidik yang profesional. Disatu sisi, penjaringan pendidik mulai dilakukan semenjak awal-awal perekrutan.

5. Pelaksanaan penyiapan dan penyelenggaraan ujian akhir semestes (UAM), ujian akhir *imtihanun niha'i* (IMNI);

   Sebagaimana yang telah penulis bahas pada bab sebelumnya, maka terkait dengan pelaksaaan ujian baik itu ujian akhir semester atau penilaian akhir semester (PAS) atau penilaian akhir tahun (PAT) semuanya telah dirancang dengan baik oleh Dinas Pendidikan. Hal ini tidak lain sebagai bentuk kehadiran dan keterlibatan pihak dinas dalam rangka mengawal semua proses pendidikan muali dari berbagai jenjang. Tentu hal ini tidak serta merta dilaksanakan sendiri oleh dinas, akan tetapi peran dari semua pihak termasuk *stakeholder* lembaga-lembaga pendidikan baik madrasah, diniyah, dan pondok pesantren. Termasuk adalah Lembaga Pendidikan Ma'arif NU (LP Ma'arif NU) Kabupaten Pasuruan.[27]

   Peranan lembaga-lembaga terkait dengan pembuatan soal yang dibuat oleh dari kelompok musayawarah guru mata pelajaran (MGMP), dalam

[27]Kerjasama antara Dinas Pendidikan Pasuruan, terutama Pergurag dengan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, Perguruan Muhammadiyah, dan lainya selama ini berjalan dengan baik dan saling melengkapai.Demikian hasil wawancara dengan A. Farid, Sekretaris Dewan Pendidikan dan juga Pengurus LP. Ma'arif Kabupaten Pasuruan, 25 mei 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tataran ini, dinas hanya memiliki tanggungjawab memperbanyak atau penggadaan soal yang nantinya akan disebar ke seluruh lembaga-lembaga pendidikan.[28]

D. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat

1. Faktor pendukung

a. Budaya masyarakat

Pasuruan yang termasuk daerah tapal kuda memiliki banyak kekhususan, diantaranya masyarakatnya yang terkenal dengan masyarakat yang religius. Hal ini wajar dan dibuktikan dengan banyaknya lembaga-lembaga pendidikan keagamaan; Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren, semua itu sangat mempengaruhi secara signifikan untuk membangun masyarakat yang memiliki dimensi dan kapatuhan dalam beragama lebih kuat. Sehingga banyak yang menyebut bahwa Pasuruan merupakan masyarakat yang terkenal dengan masyarakat santri. Dalam tata nilai kehidupa santri sungguh unik dibanding dengan tata nilai yang lahir dari masyarakat *abangan.* Hal ini dinyatakan Ahmad Yusuf:

> *Budaya masyarakat Pasuruan yang mayoritas santri menjadikan tatanilai yang terbangun mudah untuk terbentuk sekaligus membentuk. Terbentuknya sikap dan perilaku yang selalunya mereka mempertimbangkan baik buruk, halal haram, dan pantas dan tidak pantas telah menjadi karakter yang secara otomatis berjalan menjadi sebuah kebiasaan. Begitu juga membentuk budaya santri yang religius akan terbangun dan*

[28] Sebagaimana yang dinyatakan Kasi Pergurag, bahwa dalam pembuatan soal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pasuruan selalu berkoordinasi dengan Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, 24 Mei 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *terkondisikan mulai tertata dari sebuah keluarga. Bagi keluarga yang satu atau dua keluarganya sedang atau telah nyantri atau sekolah dan menyekolahkan di Madrasah, Diniyah, atau Pondok Pesantren secaratidak lagsung akan membentuk karakter dan sikap masyarakat yang ideal, atau saya menyebutnya masyarakat santri.*[29]

Dengan budaya santri inilah, program-program pemerintah, termasuk tekait dengan pendidikan praktis tidak mengalami persoalan pelik. Sebab dari faktor inilah, semua *stakeholder* lembaga-lembaga pendidikan bersama-sama dengan masyarakat selalu bersinergi untuk menjadikan masyarakat Pasuruan secara umum tidak terlalu mempersoalkan semua program dan rencana Dinas Pendidikan untuk mencita-citakan sebuah lembaga pendidikan yang selalu menjadikan anak-anak didik mampu mencapai keinginannya sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Pendidikan sesuai dengan Perbup No.21 Tahun 2016. Siti Aisyah, selaku Pengasuh Pondok Putri mengamini apa yang selama ini telah diprograkan oleh Dinas Pendidikan tentang peningkatan mutu dan kualitas di seluruh lembaga baik umum maupun yang berbasis agama. Walau beliau juga mengauki bahwa sebaian dari pimpinan lembaga merasa terintervensi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah melalui Dinas Pendidikan.[30] Namun secara umum hal itu tidak mengurangi ketercapaian program-program yang telah dicanangkan.

---

[29] Ahmad Yusuf, Kepala Bidang Pergurag, Pasuruan, 24 Mei 2017
[30] Siti Aisyah, selaku Pengasuh Pondok Putri, 25 Mei 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dukungan Para Tokoh

Berangkat dari terebntuknya budaya santri tersebut, menjadikan semua pihak baik dari para pemimpin lembaga, pengasuh dan tokoh-tokoh agama selalu berkoordinasi atas segala apa yang menjadikan program Dinas Pendidikan terkait dengan perkembangan dan kemajuan lembaga-lembaga mereka. Hal ini wajar, sebab ternyata hampir semua tokoh-tokoh agama memiliki lembaga-lembaga baik pendidikan formal maupun non formal, baik umum maupun yang bebasis agama; Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren.Apalagi adanya LP Ma'arif, sebuah lemabaga yang *consern*menangani dan mendapingi serta mewadahi lembaga-lembaga baik umum maupun agama seluruh lembaga pendidikan yang berada di naungan Nahdlatul 'Ulama'.Bahkan profesionalisme telah menjadi tolok ukur dan penekanan secara menyeluruh yang titik kontrolnya adalah pada tokoh-tokohnya.[31]

Ahmad Farid, sekretaris LP Ma'arif Pasuruan memberikan penjelasan bahwa karena mayoritas Pasuruan adalah warga *nahdliyin* maka dipastikan tugas kami cukup besar untuk mengoordinasikan segala bentuk kebijakan terkait dengan pendidikan, baik itu kebijakan yang lahir secara internal LP. Ma'arif maupun kebijakan yang secara eksternal yang lahir dari Peraturan Bupati atau kebijakan Dinas Pendidikan.Kenapa besar?Karena hampir semua lembaga pendidikan

[31]Sebagimana yang telah dituturkn oleh KH. Chamzah Ahmad, Pengasuh Pondok Besuk, 05 Juni 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

swasta apakh itu lembaga Madrasah, Diniyah, atau Pondok Pesantren jumlahnya cukup luar biasa besar dan mendominasi kultur-kultur masyarakat pendidikan hampir di seluruh Kabupaten Pasuruan.[32]

Dari sinilah, tokoh-tokoh agama baik dari lintas Ormas dan agama selalu bermusyawarah tentu dalam rangka memperbincangkan bagaimana lembaga-lembaga pendidikan secara umum di Pasuruan berjalan dan tercapai seara baik.Sehingga program-program pendidikan terutama di lembaga Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren sebagai obyeknya tidak pernah mendapati kendala yang berarti.Pihak lembaga sebagai obyek sekaligus lahan implementasi atas kebijakan Pemerintah tidak mengalami perdebatan yang riskan kaena hal itu telah dibicarakan pada tataran tokoh-tokoh masyarakat dengan Pemerintah, termasuk lahirnya Perbup adalah produk pemikiran antara tokoh-tokoh masyarakat dengan pemerintahan Kabupaten Pasuruan.Sehingga sebanayak apapun lembaga pendidikan yang dimuncul, tidak ada kesulitan yang pelik untuk diselesaikan dan point inilah yang dianggap urgen atas keberlangsungan semua kebijakan tentang pendidikan bisa dengan mudah direalisasikan.

c. Dukungan Dana Pemerintah

Sebesar apapun ekspektasi masyarakat dan Dinas Pendidikan untuk mencita-citakan sebuah lembaga pendidikan yang ideal dan mencapai ketercapaian yang memuaskan akan terasa sulit diwujudkan,

[32] A. Farid, Sekretaris Dewan Pendidikan Pasuruan, 25 Mei 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika saja tidak didukung dengan dana yang selalu *ready.* Ahmad Yusuf menyadari bahwa sebaik apapun program yang dicanangkan oleh Pemerintah jika tanpa dukungan dana maka dipastikan program-program yang teah dicanangkan akan terasa mandek di tengah jalan, implemenatsi kebijakan-kebijakan akan mati suri. Maka untuk mengimplementasikan semua program atas kebiajakn yang telah disepakati bersama harus diimbangi dengan alokasi dana APBD yang memadai.[33]

Dana merupakan komponen yang signfinikan terutama untuk mewujudkan langkah-langkah secara infrastruktur bagi perkembangan masing-masing lembaga pendidikan, terutama sekali lembaga-lembaga pendidikan swasta; Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren. Terhadap ketiga bentuk lembaga tersebut, Pasuruan termasuk dalam hal ini Bupati sangat serius untuk mengawal program-program peniddikan berbasis keagamaan dengan mengalokasikan anggaran dana yang cukup signifikan.

Dari sisi pengajar dan pendidik bagi lembaga-lembaga pendidikan Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren telah disiapkan tunjangan-tunjangan bagi mereka termasuk guru-guru TPQ.Hal ini, disamping sebagaimana kebijakan yang dibuat oleh Pemprov Jawa Timur yang memberikan tunjangan bagi guru-guru TPQ dan Diniyah, Kabupaten Pasuruan pun tidak ketinggalan selalu mempriortaskan

[33] Sebagaimana laporan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, 25 Mei 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi mereka yang telah mengabdi bertahun-tahun yang sebelumnya gaji mereka sangat minim dan tidak layak untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun dengan adanya Perbup tentang program-progra pendidikan yang lebih mengarah pada penguatan secara agamis, maka keberlangsungannya telah disiapkan dana khusus untuk mengawal keberhasilan baik itu lembaga pendidikan Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren yang berada di Pasuruan.

2. Faktor penghambat

Disisi yang sama, implementasi program lembaga-lembaga pendidikan agama; Madrasah, Dmiyah, da Pondok Pesantern di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan pun akan terancam/terkendala dengan beberapa faktor penghambat. Hal ini penulis temukan setelah melakukan observasi dan tentunya didukung oleh wawancara secara mendalam dengan beberapa informan yang bisa diakui kriditabilitasnya. Adapun faktor-faktor penghambatnya adalah sebagai berikut:[34]

a. Luasnya Daerah

Faktor yang masih belum maksimalnya baik itu sosialisasi maupun bentuk pendampingan dalam rangka implementasi kebijakan dan program-program Dinas Pendidikan adalah luasnya daerah Kabupaten Pasuruan 1.474 km^2 dengan 24 Kecamatan, 341 desa dan 24 kelurahan. Sebenarnya bukan karena jumlah kecamatan atau desa

[34] Hasil wawancara dengan Ahmad Yusuf, Kepala Bidang Pergurag, 24 Mei 2017; Kepala Dinas dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, 25 Mei 2017, dan juga A. Farid, Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Pasuruan, 05 Juni 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kelurahaan. Tetapi secara geografis terutama bagian barat daya merupakan wilayah pegunungan, dengan puncaknya Gunung Arjuno dan Gunung Welirang. Bagian tenggara adalah bagan dari Pegunungan Tengger, dengan puncaknya Gunung Bromo. Hal ini menggambarkan bahwa medan dan lintasan kedaerahan cukup sulit untuk dijangkau.

b. Lemahnya SDM *Stakeholder*

Dalam rekrutmen tenaga pengajar dan pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan sudah dilakukan seleksi secara ketat yakni melalui tes tulis dan tes lisan (wawancara) serta praktek mengajar.Akan tetapi masih sulit untuk mendapatkan tenaga pengajar dan pegawai yang sesuai harapan yaitu ustadz-ustadz yang betul-betul mampu mengajar kelas/program secara profesional dan kompeten.

Dan juga pegawai atau karyawan yang betul-betul ahli dan profesional dalam bidangnya. Akhirnya Dinas Pendidikan terpaksa harus mengambil yang terbaik dari para pelamar.Sedangkan untuk dapat memenuhi harapan di atas maka Dinas Pendidikan masih harus memberikan pembinaan, bimbingan dan pelatihan.Hal ini termasuk salah satu hal yang dapat menghambat kelancaran serta keberhasilan implementasi peningkatan kualitas pendidikan.[35]

[35] Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pergurag, Ahmad Yusuf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Minimnya kualitas Input calon anak didik

Harapan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan adalah santri-siswi yang masuk di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan sudah mampu menguasai materi-materi keagamaan yang memadai. Ternyata hal ini tidak mudah didapatkan, dimungkinkan karena lemahnya output dari lembaga-lembaga sebelumnyaterutama dalam penguasaan materi al-Qur'an. Seksi Madin dan Pontren Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, Basori, mengatakan bahwa selama ini santri-siswi yang mendaftarkan diri atau mengikuti tes masuk di lembaga-lembaga pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan yang sudah mampu menguasai dan memeiliki kematangan tentang keagamaan hanya kira-kira 20%. Oleh karena itu pendidikan pesantren harus kerja keras untuk memberikan matrikulasi dan bimbingan serta kursus khususnya tentang materi BTQ dan keagamaan lainnya.[36] Dengan sulitnya mendapatkan serta memiliki santri baru yang sudah mampu menguasai materi-materi yang terkait dengan kemampuan baca kitab kuning, atau penguasaan ilmu alat.

d. Terbatasnya anggaran dana Pemerintah.

Bukan rahasia lagi mulai sejak dulu sampai sekarang perhatian serta dukungan pemerintah terhadap pendidikan-pendidikan terutama swasta yang ada di pesantren sangat minim sekali. Sedangkan dukungan serta bantuan dari pemerintah sangat diharapkan atau

[36] Hasil wawancara dengan Seksi Madin/Pontren

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan strategi implementasi peningkatan kualitas pendidikan yang ada di madarsah, diniyah, dan pesantren yang berkualitas. Lembaga-lembaga keagamaan baik itu madrasah, diniyah, dan pondok pesantren sangat membutuhkan sumber daya tenaga pengajar dan pengelola yang profesional serta siap untuk melaksanakan atau menerapkan peningkatan kualitas pendidikan, juga membutuhkan sarana dan prasarana yang lengkap serta memadai, perpustakaan yang standar dan juga masih banyak persyaratan-persyaratan lainnya yang harus dipenuhi.

Maka disini dukungan dan bantuan dari pemerintah sangat dibutuhkan, baik itu berupa pembinaan peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM), bantuan sarana dan prasarana serta melengkapi buku-buku perpustakaan yang dibutuhkan, guna membantu pendidikan-pendidikan swasta agar dapat meningkatkan mutu pendidikan dan khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dapat berhasil dalam mengimplementasi peningkatan kualitas pendidikan.

Jadi dengan minimnya kepedulian atau perhatian dan dukungan serta bantuan dari pemerintah terhadap pendidikan swasta yang ada, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan termasuk dapat menghambat keberhasilan mengimplementasi peningkatan kualitas pendidikan.Karena pendidikan pesantren harus menanggung serta memenuhi sendiri segala kebutuhan yang dibutuhkan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengimplementasikan peningkatan kualitas pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan.

Dari data Dinas pendidikan 2017 secara statistik jumlah madrasah, baik mulai RA sampai dengan Madrasah Aliyah dan Diniyah sejumlah 3.782 (Tabel: 1) yang tersebar di 24 kecamatan. Hal ini membuktikan betapa besar jumlah lembaga-lembaga pendidikan yang harus mendapatkan perhatian dan monitroing secara berkala dari Dinas Pendidikan terutama Perguruan Agama (Pergurag) Kabupaten Pasuruan. Sebaran lembaga pendidikan itu mayoritas berada di pedesaan yang secara geografis cukup sulit untuk melakukan pengawasan dan monitoring.Sehingga kerap mengalami kesulitan untuk melakukan program-program secara simultan.Apalagi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dari Dinas Pendidikan sendiri.[37]

E. Pendidikan Agama Visioner

Berdasarkan cita-cita dan keinginan bersama baik itu Pemerintahan daerah Pasuruan, *stakeholder* lembaga-lembaga pendidikan serta masyarakat untuk mewujudkan lembaga-lembaga pendidikan Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren yang visoner, maka berbagai upaya telah dilakukan oleh semua pihak. Mereka menyadari bahwa lembaga pendidikan harus selalu bisa berbenah untuk lebih maju dari yang sebelumnya. Dalam konteks pendidikan

[37] Kepala Dinas dan kebudayaan, Pasuruan, menyatakan bahwa semakin banyaknya lembaga-lembaga pendidikan yang muncul kerapkali juga menjadi penghambat untuk menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebidayaan, hal ini tidak lain karena personel dan staff yang masih jauh dari tingkat yang dibutuhkan selama ini, 25 Mei 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama yang visioner selalu terbangun dari beberapa perangkat dasar, diantaranya:

1. **Jiwa Ketauhidan**

Sebagaimana keinginan *stakeholder* dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, ciri utama pendidikan yang selalu melihat kedepan adalah bagaimana internalisasi nilai-nilai aqidah mampu dijadikan tatanilai dalam berkehidupan bagi anak-anak didik. Senada dengan pernyataan Ahmad Yusuf, Kepala Bidang Pergurag:

> *"apalah arti sebiah kesuksesan dari lembaga-lembaga pendidikan manakala mereka tidak mampu mewarnai anak-anak didiknya untuk mengenal Allah SWT. Karena sejatinya inilah yang menjadi tujuan pendidikan itu yang sebenarnya. Sehingga upaya apapun dalam program-program pendidikan harus terkait erat dengan pengenalan anak-anak didik terhadap keesaan Allah SWT, tanpa itu, maka pendidikan menjadi gagal"*[38]

Dalam Islam mempercayai hakikat Allah SWT adalah mutlak dan hanya ada satu akidah, yaitu percaya kepada Allah SWT serta meyakini bahwa Muhammad adalah utusan-Nya. Daam kontesk proses pembelajaran yang menerapkan kurikulum 2013 tertuang dalam kopetensi inti 1 (KI-1), yaitu Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Hal semacam ini akan selalu mengikat semua muslim tertutama anak-anak didik. Sehingga menjadikan anak-anak didik untuk selalu beriman kepada Allah SWT. Upaya penanaman kepercayaan kepada Allah SWT ini harus terus dibangun melalui proses pembelajaran

[38] Ahmad Yusuf, 24 Mei 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada materi apapun, karena ini merupakan kebutuhan dasar bagi umat manusia, maka cara penyapaian materi terutama kepada anak-anak didik kelas dasar harus dengan hati-hati, sebab kesalahan dalam memberikan konsep soal kekukuhan akidah akan berakibat fatal pada pemahaman dan keyaikan anak-anak didik dalam jangka yang panjang.

2. Penguatan Pendidikan Agama

Pendidikan agama merupakan hal yang sangat urgen untuk menempah para anak-anak didiknya agar memiliki kekuatan dan daya tahan terhadap segala guncangan perubahan zaman. Karena masa depan akan selalu datang dengan perubahan-perubahan yang luar biasa, maka menuntut dunia pendidikan untuk siap mengantisipasinya sebagai *problem solving.*[39]Dalam kontek inilah, pesantren menyadari bahwa kajian materi agama Islam sekaligus pemahaman terhadap keberagamaan menjadi prioritas. Sebagaimana pernyataan Ahmad Farid pengurus LP Ma'arif NU Kabupaten Pasuruan:

> *"Sebegitu pentingnya penyampaian materi agama, sehingga semua lembaga pendidikan baik umum maupun yang berbasis agama wajib untuk memasukan materi Baca Tulis Qur'an (BTQ) dan menyertakan Madrasah Diniyah yang mengkaji kitab-kitab klasik sebagai penguatan keagamaan bagi anak-anak didik"*[40]

Lembaga pendidikan yang memberikan penguatan materi keagamaan secara ekstra dan menyediakan jam lebih bagi guru-guru untuk mendampingi anak-anak didik merupakan bentuk upaya menjadikan anak-

[39] Sojetamiko, Manusia dan Dunia yang Sedang Berubah, dalam Conny R. Seniawan et. All (ed), Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional Menjelang Abad XXI, (Jakarta: Grasindo Utama, 1993), 3

[40] A. Farid, Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Pasuruan dan Pnegurus LP. Ma'arif NU, Pasuruan, 05 Juni 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak didik memiliki ketahanan spiritual. Ketahanan spirit agama akan menjadi ciri utama posisi pendidikan masa depan yang mengutamakan kekuatan mental spiritual.

3. Menanamkan Keberagamaan Inklusif

Lembaga-lembaga pendidikan yang visioner akan selalu mempertimbangkan peran o*ut came* ditengah-tengah pluralitas masyarakat sebagai ciri negara-bangsa Indoensia, termasuk Kabupaten Pasuruan. Lembaga-lebaga pendidikan yang mampu mengajarkan dan mengembangkan kepada anak-anak didiknya untuk ber-theologi inklusif. Hal ini tidak bisa dihindari oleh lembaga pendidikan, terutama Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren saat maraknya radikalisme, kerapkali pendidikan keagamaan terutama pesantren di pandang secara sinis. Radikal dan teroris dianggap produk pesantren. Dalam konteks inilah, maka pesantren (sebenarnya) sejak awal berdiri telah mengembangkan faham keagamaan yang inklusif, yaitu: *tawazzun, tawasuth, tasamuh,* dan *I'tidal.* Hal ini disadari pesantren bahwa dunia masa depan adalah dunia pluralistik. Hal ini disadari oleh mayoritas Pengasuh Pondok Pesantren di Pasuruan, bahwa pesantren harus bisa menetralisir kesan dan stigma yang disangkaan kepada pesantren selama ini. Pesantren yang telah dianggap sebagai penggagas pemikiran radikal dan perilaku teroris tidak selamanya benar. Apalagi pesantren selama dikenal sebagai lembaga pendidikan bengkel moral yang melahirkan sosok alumni yang kerap memliki peran penting dalam percaturan pembangunan bangsa melalui daerahnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing. Dan jika ada pesatren yang notabene melahirkan santrinya memiliki kemampuan merakit bom sekaligus menjadi bom bunuh diri adalah segelintir pesantren dari sekian ribu pesantern di Indonesia.

Penanaman pemikiran keagamaan yang inklusif, terbuka dan membangun sikap toleran dengan agama lain merupakan ranah penting yang menjadi prioritas bagi semua lembaga pendidikan. Karena pendidikan yang baik akan menjadikan para lulusannya menjadi sosok yang baik, lembaga pendidikan yang mampu membangun karakter keindonesiaan yang matang akan menjadikan masa depan bangsa ini akan selau menjanjikan. Bangsa yang besar dengan ribuan lembaga pendidikan keagamaan akan mampu meramalkan kesuksesan bangsa di masa depan.

4. Menggerakan Etos Kerja

Lembaga pendidikan yang mampu menggerakkan etos kerja, etos ekonomi, dan etos pengetahuan, sebab ketiga etos inilah yang menjadi penggerak utama globalisasi. [41] dalam hal etos kerja, telah banyak Madrasah, Diniyah, Ponok Pesantren yang mengajarkan para anak-anak didik dan para santrinya untuk berwirausaha, bertani, perbengkelan, dan pengembangan koperasi. [42] Sementara dalam hal etos ekonomi telah diajarkan pula sistem ekonomi yang berbasis syari'ah, dan pengembangan pendidikan seperti perguruan tinggi adalah bukti bahwa Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren telah mendesain terhadap anak-anak didik

[41] Syahrin Harahap, Islam & Modernitas, Dari teori Modernisasi Hingga Penegakan Kesalehan Modern, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), ha. xiii

[42] PP. Sidogiri, Pasuruan Jawa Timur adalah salah satu Pesantren di Pasuruan atau bahkan salah satu pesantren di Indonesia yng memiliki koperasi yang asetnya trilyunan dan memiliki BMT yang menyebar hampir diseluruh Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan santri-santrinya untuk terus menerus mencintai dan mengembangkan pengetahuan.

5. Intelektual-aqliyat

Lembaga pendidikan dan Pesantren yang mampu mendorong para anak didik dan santrinya untuk mengembangkan intelekual atau pengasahan dimensi *aqliyat* dan keteguhan hati nurani untuk membangun spiritual yang *kâffah.* Dan inilah yang dimaksud dengan capaian *al-azmat al-Ruhiyah.* Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren yang mampu memberikan kesadaran kepada anak-anak didiknya untuk menyadari bahwa dirinya adalah *khalîfat Allâh fî al-ardh.* Pada tataran inilah, pendidikan agama Islam model seperti inilah yang selalu dikembangkan di Pasuruan untuk menghantarkan para anak-anak didiknya agar tidak hanya menjadi penonton, pengonsumsi namun siap menjadi pioner dan pemroduk.

6. Penguatan karakter dan Akhlak Mulia

Seperti yang dijelaskan oleh Scupin,[43] bahwa masyarakat Muslim memiliki beberapa ciri yang terpotret dalam adat istiadat sebagai tradisi yang terkait dengan kehidupan dan reasi antar sesama masyarakat, seperti ritual, kesopanan, saling menghargai, berkata jujur kepada setiap orang. Tradisi yang baik inilah dalam konteks pendidikan agama Islam disebut akhlak mulia. Baik dan buruknya sebuah kebiasaan yang ditampilkan oleh

[43] Raymond Scupin, "South Thailand: Politics, Identity, and Culture," *The Journal of Asian Studies*, 72 (Mei 2013), hlm. 432.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para anak-anak didik Madrasah, Diniyah, dan santri Pondok Pesantren sangat tergantung bagaimana keteladanan dari semua *stakeholder,* bapak ibu guru serta orangtu mereka untuk mengajarkan nilai-nilai berkarakter.

Tradisi atau kebiasaan-kebiasaan di atas merupakan kebiasaan yang sudah dilakukan oleh masyarakat lembaga-lembaga sejak dahulu dan secara terus-menerus akan diupayakan yang tidak hanya dikenalkan namun didinternalisasikan anak-anak didik. Di antara institusi sosial yang terlibat dalam proses pewarisan adat istiadat adalah lembaga-lembaga pendidikan yang tidak hanya berbasis agama saja, namun hampir disetiap sekolahpun selalu enitikberatkan pada bagaimana anak-anak didik memiliki kepekaan secara kebiasaan yang baik dan didasari akhlak yang baik.Sebab, karakter merupakan potret atatnilai yang termanifestasi dari sebuah tradisi dan manifestasi keagamaan yang dikonstruksi secara sosial berdasarkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama Islam menurut interpretasi para ulama sesuai dengan mazhab keislaman yang mereka ikuti. Dalam konteks pendidikan madrasah, diniyah, dan pesantrenakhlak merupakan pendidikan uatama dan prioritas bagi anak-anak didik dan santri-santrinya.

Sebagaimana lembaga-lembaga pendidikan agama baik itu madrasah, diniyah, dan pondok pesantren yang diteliti ini telah melakukan fungsi dan peran preservasi penguatan akhlak mulia sebagai salah satu *goal* atas keberhasilan pendidikan dari sisi pembangunan karakter religius.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Profil lembaga pendidikan madrasah, diniyah dan pesantren di Pasuruan.

   Madrasah adalah institusi pendidikan atau sekolah umum yang memiliki kurikulum dengan penambahan pelajaran-pelajaran tentang keislaman.Berbeda dengan sekolah lainnya yang pembinaanya di bawah Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, Madrasah dikelola di bawah pembina Kementerian Agama. Terdapat tiga jenjang Madrasah yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang setara dengan SD, Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang setara SMP, dan Madrasah Aliyah (MA) yang setara SMA. Sedangkan RA adalah jenjang pendidikan anak usia dini yang setara dengan Taman Kanak-Kanak (TK) dengan pengelolaan di bawah binaan Kementerian Agama.

   Sistem pendidikan Diniyah yang dikembangkan di Pasuruan adalah sejatinya untuk memenuhi target bagi peserta didik di lembaga formal yang tidak mondok di pondok pesantren. Sehingga inisiasi dari Diknas Pasuruan melalui peraturan bupati materi-materi pendidikan diniyah masuk di lembaga-lembaga formal.Agar tidak terlalu menambah beban kurikulum yang harus diselesaikan oleh peserta didik, maka materi-materi pokok yang telah dikemas dan disesuaikan dengan kurikulum formal yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajib tersaji di pendidikan formal, diantaranya adalah berlakuknya BTQ, baca-tulis-qur'an.

Potret lembaga-lembaga pendidikan terutama madrasah, diniyah, dan pondok pesantren di Kabupaten Pasuruan cukup diperhitungkan di Jawa Timur. Hal ini terkait dengan kebijakan-kebijakan yang selama ini dikembangkan oleh Dinas Pendidikan melalui Pergurag terhadap lembaga-lembaga pendidikan terkait dengan hal-hal teknis, diantaranya adalah mewajibkan bagi seluruh lembaga baik umum maupun yang berbasis agama untuk menerapkan materi Baca Tulis al-Qur'an (BTQ).Disamping penerapan BTQ, masing-masing lembaga wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan madrasah diniyah (Madin) sebagai bentuk pengenalan dan pendalaman materi-materi agama melalui kitab-kitab klasik.Sehingga bisa dikatakan bahwa lembaga pendidikan di Pasuruan sekalipun SD sampai dengan SMA serasa madrasah, begitu juga sebaliknya.

2. Pelaksanaan dan sistem pendidikan madrasah, diniyah dan pesantren di Pasuruan. Potret dan tolok ukur peningkatan pendidikan yang telah direncanakan dan diimplementasikan secara baik. Sistem yang dibangun pada lembaga-lembaga pendidikan adalah mengadopsi pendidikan-pendidikan modern yang diterapkan juga pada lembaga-lembaga pendidikan madrasah, diniyah, dan pondok pesantren. Sekaligus menerapkan sistem salaf pada lembaga-lembaga pendidikan formal, termasuk mewajibkan materi BTQ dan juga madrasah diniyah dan sekolah umum. Ini membuktikan bahwa sejatinya pendidikan yang baik adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha mengawinkan antara pendidikan modern dengan pendidikan klasik atau tradisional.

3. Sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap proses pendidikan di Kabupaten Pasuruan, maka Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan melalui Peruguran agama (Pergurag) melakukan langkah-langkah strategis diantaranya:
   a. Bidang Pergurag mempunyai tugas melaksanakan bimbingan pendidikan pada Perguruan Agama Islam, Madrasah dan Pondok Pesantren. Bidang Pergurag dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.Bimbingan yang dilakukan oleh Pergurag terlaksana secara sistemik dan terencana dengan baik.
   b. Perumusan kebijakan teknis terhadap tata kelola lembaga-lembaga pendidikan terutama madrasah, diniyah, dan pondok pesantren memiliki peran yang sangat penting di dalam meraih sebuah lembaga pendidikan yang baik dan mampu mengantarkan anak-anak didik yang memiliki kualitas keagamaan, sosial, dan akhlak yang baik, tentu harus melalui manajemen yang baik dan profesional. Kebijakan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan melalui Pergurag terhadap lembaga-lembaga pendidikan terkait dengan hal-hal teknis, diantaranya; 1) penentuan pagu bagi lembaga pendidikan yang ditentukan berdasarkan ketersediaan ruang belajar dan juga kebutuhan rombongan kelas, 2) pendistrubusian guru-guru bagi madarah-madarash yang secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kuantitas memiliki anak-anak didik yang cukup besar akan tetapi tidak didukung dengan ketersediaan pendidik yang memadai, dan 3) memasukan sebagaian materi yang harus diterapkan di masing-masing lembaga-lembaga baik itu madrasah, diniyah, dan pondok pesantren sebagai bentuk penguatan karakater masyarakat Pasuruan secara umum dalam bentuk materi Baca Tulis al-Qur'an (BTQ) baik sekolah maupun madarsah. Disamping penerapan BTQ masing-masing lembaga baik itu sekolah maupun madrasah wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan madrasah diniyah sebagai bentuk pengenalan dan pendalaman materi-materi agama melalui kitab-kitab klasik.

c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan pada TPQ, Madrasah, dan Pondok Pesantren. Koordinasi antar pengawas disetiap lembaga pendidikan menjadi sangat penting terkait dengan evaluasi dan tindaklanjut atas peningkatan mutu dan kualitas pendidikan baik di Madarsah, Diniyah, dan Pondok Pesantren. Dari pengawas inilah, seluruh aktifitas dan kegiatan yang telah diprogramkan oleh *stakeholder* baik Dinas Pendidikan maupun rencana kerja madrasah bisa diukur tingkat ketercapaiannya dengan baik.

d. Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan program pendidikan di TPQ, Madrasah, dan Pondok Pesantren. Setiap program kegiatan di masing-masing lembaga pendidikan baik itu Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren telah dibuatkan rancangan dalam bentuk petunjuk pelaksanaan yang telah dijadualkan sesuai dengan kebutuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Tabel:2.1). Kisaran kegiatan bisa mencakup bulanan, tribulan, dan satu semester. Program-program ini bisa diakses oleh lembaga pendidikan baik itu madrasah, diniyah, dan pondok pesantren dengan kesesuaian secara silmultan.

e. Pelaksanaan peningkatan mutu tenaga pendidik pada madrasah pondok pesantren dan TPQ. Terkait dengan peningkatan mutu pendidikan yang telah diupayakan semaksimal mungkin, maka Dinas Pendidikan Pasuruan memberikan bekal dengan mengadakan workshop atau Bimtek dalam rangka meningkatkan kualitas pendidik yang profesional. Disatu sisi, penjaringan pendidik mulai dilakukan semenjak awal-awal perekrutan.

f. Pelaksanaan penyiapan dan penyelenggaraan ujian akhir semestes (UAM), ujian akhir imtihanun niha'i (IMNI). Sebagaimana yang telah penulis bahas pada bab sebelumnya, maka terkait dengan pelaksaaan ujian baik itu ujian akhir semester atau penilaian akhir semester (PAS) atau penilaian akhir tahun (PAT) semuanya telah dirancang dengan baik oleh Dinas Pendidikan. Hal ini tidak lain sebagai bentuk kehadiran dan keterlibatan pihak dinas dalam rangka mengawal semua proses pendidikan mulai dari berbagai jenjang. Tentu hal ini tidak serta merta dilaksanakan sendiri oleh dinas, akan tetapi peran dari semua pihak termasuk *stakeholder* lembaga-lembaga pendidikan baik madrasah, diniyah, dan pondok pesantren. Termasuk adalah Lembaga Pendidikan Ma'arif NU (LP Ma'arif NU) Kabupaten Pasuruan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dengan hasil temuan penelitian terhadap peran Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan terhadap peningkatan mutu dan kualitas pendidikan Madrasah, Diniyah, dan Pondok Pesantren, maka saran peneliti sebagai berikut:

1. Strategi dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang dikembangkan hendaknya betul-betul dikonsep dan diformulasikan dengan matang. Hal ini penting dilakukan agar tawaran tentang pendidikan yang dikembangkan di madarsah, diniyah, dan pesantren tidak sekadar menjadi pendidikan alternatif, namun layak jual dan akan tetap diperhitungkan banyak umat karena memiliki ciri khas dan terobosan yang inovatif.
2. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan yang berada di madrasah, diniyah, dan pesantren, sangatlah perlu untuk tetap mengkaji ulang segala kebijakan yang secara makro tidak menguntungkan lembaga pendidikan itu sendiri, diantaranya, pola-pola modern yang secara kedaerahan tidak menunjang terhadap penguatan karakter dan budaya lokal. Sebab hal itu secara perlahan-lahan bisa menggerus ciri khas tertutama pesantren yang sejak awal berdiri mengajarkan dan mengembangkan budaya-budaya islami.
3. Perlu peningkatan sumber daya manusia (SDM) diberbagai sektor baik itu yang berada di Dinas Pendidikan maupun di semua lini lembaga pendidikan apakah itu terkait dengan kualitas dan profesional pendidik maupun kependidikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Proposisi-Proposisi

Proposisi ini lebih ditujukan kepada semua pihak terutama dinas dan kalangan akademisi lainnya, bahwa penelitian tentang peningkatan kualitas pendidikan kiranya perlu ditingkatan secara intensif. Mengapa? Karena saat penelitian seperti ini menjadi silmutan jelas kedepan akan menjadi proyek besar, karena selalu saja melibatkan berbagai komponen, mulai dari Pemerintah Daerah, yang akan membuat kebijakan-kebijakan yang berbentuk Perda terkait dengan bagaimana pendidikan kedepan sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah. Dnas pendidikan pun akan selalu menjadikan pola dan strategi sebagai prioritas yang akan dituangkan dalam program-program baik itu jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.

Pada sisi lain, yang tak kalah pentingnya adalah berbagai upaya akan selalu dilakukan oleh *stakeholder* dari masing-masing lembaga-lembaga untuk selalu bersaing secara sehat antar lembaga. Dan menjadi fakta pendidikan bahwa semakin banyak lembaga pendidikan akan semakin mendorong dari semua lembaga untuk berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Sekalipun Pasuruan tekah memulai dengan Perdanya tentang kewajiban semua lembagalembaga pendidikan untuk menerapkan BTQ dan Madin, akan tetapi segala bentuk implementasinya di lapangan sangat perlu untuk di kawal dan butuh pengawasan yang mendalam. Hal ini dengan tujuan agar semua program-program bisa berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

AM, Masyhuri. dkk., *Problematika Madrasah*, (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 2001)

Agustino, Leo. *Dasar-dasar Kebijakan public* (Bandung: Alfabeta, 2014)

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendektan Praktik*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

Asy'ari, Syeikh Muhammad Hasyim. *Adabul 'Alim wal Muta'allim*, Alih Bahasa, Rosidin, (Malang; Genius, 2013)

Azra, Azyurmadi, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002)

Bakar, Usman Abu. dan Surohim, *Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam, Respon Kreatif terhadap Undang-Undang Sisdiknas*, Yogyakarta, Safira Insania Press, 2005)

Basit, Abdul. *Analisis Terhadap Kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas di Bidang Sosial keagamaan*, (Purwokerto: JPA P3M, 2008), Vol. 9, No. 2

Brown, Daniel J. *Desentralization and School Based Management* (New York: The Palmer Press, 1990)

Bogdan, Robert L. dan Biklen Sarri Knoop. *Qualitative Research for Education, an Introduction to Theory and Methods* (Boston: Allin and Bacon, 1982)

Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Media Group, 2008)

Commbs, Philip H. *What is Educational Planning*, (Paris United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 1970)

Creswell, John. *Educational Research, Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative*, Edisi Ke-5, terj, Helly PS, dkk (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)

Dauly, Haidar Putra. *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004)

Departemen Agama RI, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah* (Jakarta: Direktorat Jederal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Direktorat Pembinaan Perguruan Agama Islam, 1998)

_____. *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah: Pertumbuhan dan Perkembangannya* (Jakarta: Depag RI Direjen Kelembagaan Agama Islam, 2003)

Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Study tentang Pandangan Hidup Kiai* (Jakarta: LP3ES,

Duhou, Ibtisam Abu. *School Based Management*, penerj. Noryamin Aini dan Suparno (Jakarta: Logos, 2002)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Esman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady. *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)

Freire, Paulo. *The Politic of Education: Culture, Power, and Liberation*, terj, Agung Prihantoro, dkk (Yogyakarta: REäD, 2007)

Glossop, Ronald J. *Philosophy: An Introduction the it problems and vocabulary* (New York: Dell Publising Co. Inc, 1974)

Goleman, Daniel. *Emotional Intelligence,* Alih Bahasa; T. Hermaya, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2002)

Hadiwijoyo, Suryo Sakti. *Gubernur: Kedudukan, Peran dan kewenangannya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)

Harahap, Syahrin. *Islam & Modernitas, Dari teori Modernisasi Hingga Penegakan Kesalehan Modern,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015)

Ikruq (al) Amirullah, dkk, *Studi Kebijakan Pemerintah Daerah Di Bidang Pendidikan Agama; Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Madrasah Ibtidaiyah di Kota Surabaya dan Kota Malang,* (Surabaya: Lemlit-IAIN, tth)

Jalal, Fasli. dan Supriadi, Dedi. *Reformasi Pendidikan dlam Konteks Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Adicita, 2001)

Kadir, Abd. *Visi Spiritual dalam Islam; Pengembangan Implementatif Kepribadian Muslim.*Surabaya; UIN Sunan Ampel, 2016)

Kebijakan Strategi Ditjen Kelembagaan Agama Islam Tahun 2003-2005, (Jakarta, Ditjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2003)

Kemmerer, Fransisca. "*Desentralization of Schooling in Developing Nation*", dalam *Ensiclopedia of Education*, (tp)

Khozin, *Jejak-Jejak Pendidikan Islam di Indonesia* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001)

Ludjito, Ahmad. "*Pendekatan Integralistik Pendidikan Agama pada Sekolah di Indonesia*", dalam Chabib Thoha, dkk., *Reformasi Filsafat Pendidikan Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)

Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LkiS, 1994)

Maksum, *Madrasah: Sejarah dan perkembangannya* (Jakarta: Logos, 1996)

Mardalis, *Metode Penelitian, Sutau Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)

Marzawi, Komunikasi dan Humas Ala Islam I Studi Tentang Silaturrahmi Dalam Mendukung MBS (Jambi : Pasca Sajana IAIN Sulthan Thoha Saifudin Jambi, 2008

Mas'ud, Abdurrahman. *Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik: Humanisme Religius sebagai Paradigma Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Milles, Mathew B. dan Huberman, A. Michael. *Analisis Data Kualitatif*, ter. Cecep Rohindi (Jakarta: UI Press, 1992)

Muchsin, *Politik Hukum Dalam Pendidikan Nasional*, (Surabaya: Pascasarjana UNSURI, 2007)

Muhaimin, dkk, *Manajemen Pendidikan; Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*, (Jakarta; Prenadamedia Group, 2015)

Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)

Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1966)

_____. *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996)

Murata, Sachiko & Chittick, William C. *Trilogi Islam; Islam, Iman & Ihsan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997)

Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Trisino, 1996)

Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian* (Jakarta : Erlangga, 1999).

Narkubo, Colid dan Ahmadi, Abu. *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997)

Nuruzzaman, Davy. *Permasalahan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah*, (Jurnal-Kebijakan-Publik Pemerintah, 2012), Tahun II-Nomor 2.

Qomar, Mujamil. *Dimensi Manajemen Pendidikan Islam* (Erlangga, 2015)

Raihani, *Keepmimpinan Sekolah Tranformatif*, (Jogyakarta: LkiS, 2010)

Rasyid, Riyaas. Afan Gaffar dan Saukani, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*

Riyadi, Ahmad Ali. *Politik Pendidikan: Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional*, Ar-Russ, 2006, Jogjakarta.

Rosyada, Dede. *Paradigma Pendidikan Demokratis SebuahMoudl Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta : Prenada Media, 2004)

Scupin, Raymond. "South Thailand: Politics, Identity, and Culture," *The Journal of Asian Studies*, 72 (Mei 2013)

Sojetamiko, *Manusia dan Dunia yang Sedang Berubah*, dalam Conny R. Seniawan et. All (ed), *Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional Menjelang Abad XXI*, (Jakarta: Grasindo Utama, 1993)

Steenbrink, Karel A. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* (Jakarta: LP3ES, 1986).

Suprayoga, Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001)

Suprayogo, Imam. *Qun Vadis Madrasah; Gagasan, Aksi & Solusi Pembangunan Madrasah*, (Yogyakarta, Hikayat Publishing, 2007)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Supriyoko, Ki. “Hakikat Politik Pendidikan Nasional” dalam Ali Muhdi Amnur (Ed.), *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional,* (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007)

_____. “Problema Besar Madrasah”, dalam *Republika*, 18 Maret 2008.

Sulalah, *Pendidikan Mulikultural,* (Malang; UIN Maliki Press, 2012)

Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998)

Sumanto, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Yogyakarta: Anda Offset, 1990)

Suyanto, “Persoalan Pendidikan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah” dalam Edy Suandi Hamid dan Sobirin Malian (Ed), *Memperkokoh Otonomi Daerah: Kebijakan, Evaluasi, dan Saran,* (Yogyakarta: UII Press, 2004)

Taylor J. dan Bogdan, Steven. *Introduction to Qualitative Research Methods : The Search for Meaning* (New York : John Wiley dan son Inc., 1984)

Tilaar, H.A.R.. *Kekuasaan dan Pendidikan; Suatu Tinjauan Dari Perspektif Studi Kultural,* (Magelang: Indonesia Tera, 2003)

_____. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional,* (Jakarta : Rineka Cipta, 2004)

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasioal, (ttp: Pustaka Widyatama, tt)

Tolhah, Imam. *Membuka Jendela Pengurai Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Irianto, M.Pd,Yoyon Bahtiar. *Kebijakan Pembaruan Pendidikan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012

Wahab, Sholihin Abdul. *Anaisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kbeijakan Publik,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015)

Wahid, Abdurrahman. *Bunga Rampai Pesantren*, (Jakarta: CV.Dharma Bhakti, tt.)

Zenrif, M. Fauzan. *Tafsir Fenomenologi Kritis: Interrelasi Fungsional antara Teks dan Realitas,* (Malang: UIN-Press, 2012)

Ziemek, Manfred. *Peantren dalam Perubahan Sosial* (Jakarta: P3M, 1986)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id